

Mochamad Ilham

Orang Pendalungan



Orang Pendalungan



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Mochamad Ilham

Orang Pendalungan



Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2024 Mochamad Ilham

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Orang Pendalungan/Mochamad Ilham–Jakarta: Penerbit BRIN, 2024.

xx + 199 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-8372-76-8 (*e-book*)

1. Orang Pendalungan
3. Jember

2. Kebudayaan Pendalungan
4. Kota Pendalungan

306.4

Editor Akuisisi	:	Mayasuri Presilla
<i>Copy editor</i>	:	Anton Surahmat
<i>Proofreader</i>	:	Annisa' Eskahita Azizah, S. Imam Setyawan, & Rahma Hilma T.
Penata Isi	:	S. Imam Setyawan
Desainer Sampul	:	S. Imam Setyawan
Edisi pertama	:	Juni 2024

Diterbitkan oleh:



Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repozitori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: +62 811-1064-6770
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

- PenerbitBRIN
- @Penerbit_BRIN
- @penerbit.brin



Daftar Isi

Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel.....	xi
Pengantar Penerbit.....	xiii
Prakata	xv
Ucapan Terima Kasih.....	xix
Bab 1 Pendalungan sebagai Kebudayaan.....	1
A. Identitas Pendalungan.....	1
B. Memahami Kebudayaan.....	6
C. Pendalungan sebagai Platform.....	10
D. Kajian dan Politik Kebudayaan	14
Bab 2 Menelisik Asal Kata Pendalungan	17
A. Pendalungan, Sebuah Eksonim	17
B. Pendalungan, Definisi Kamus	19
C. Mêndhalungan dalam Serat Centhini	20
D. Pendalungan, Definisi Masyarakat.....	22
E. Pendalungan, Sebuah Perspektif.....	26
Bab 3 Mengenal Orang Pendalungan.....	29
A. Rumpun Budaya.....	29
B. Masyarakat Pendalungan	35
C. Pendalungan Raya: Entitas yang Tidak Tunggal	39
D. Para Tetangga.....	42

Buku ini tidak diperjualbelikan.

E.	Jember dan Para Pendatang	47
F.	Migrasi Orang Madura	51
G.	Migrasi Orang Jawa	53
H.	Jember, Hari Ini.....	54
I.	Identitas Kultural Pendalungan	56
J.	Kebudayaan Urban di Jember.....	58
K.	Pendalungan: Mencari Bentuk.....	62
L.	Jember Kampung Halaman Pendalungan.....	65
Bab 4	Pluralisme, Multikulturalisme, dan Pendalungan.....	71
A.	Menjaga Pluralisme dan Multikulturalisme	79
B.	Pendalungan: Masihkah Sebuah Proses?.....	81
C.	Pembentukan Masyarakat Baru.....	89
Bab 5	Bahasa dan Kesenian Pendalungan: Eksistensi di tengah Ekspansi Globalisasi.....	95
A.	Pertemuan Bahasa-Bahasa	95
B.	Bahasa Jemberan.....	98
C.	Bahasa Daerah yang Makin Hilang.....	100
D.	Orang Pendalungan Berkesenian.....	103
E.	Peta Kesenian Pendalungan	105
F.	Aneka Kesenian Pendalungan	108
G.	Kesenian Tradisional.....	111
H.	Upaya Menciptakan Kesenian khas.....	120
I.	Pengembangan Kesenian.....	122
J.	Kentrung Djos, Seni Produk Pendalungan	124
Bab 6	Globalisasi, Pariwisata, dan Strategi Bertahan	131
A.	Globalisasi Membelit Dunia.....	132
B.	Globalisasi Media dan Konsumerisme	133
C.	Globalisasi di Tapal Kuda.....	136
D.	Strategi Bertahan.....	139
E.	JFC, Wujud Sebuah Tradisi	141
F.	<i>City Branding:</i> Jember Kota Pendalungan	149

Bab 7 Pendalungan di Ruang Proses: Sebuah Penutup	175
A. Membangun Seni Budaya Daerah	178
B. Beberapa Langkah Strategis.....	182
Daftar Pustaka	185
Tentang Penulis	193
Indeks	195

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Opera Pendalungan Hasil Kreasi Para Seniman Jember	4
Gambar 3.1	Wilayah Kebudayaan Pendalungan Raya.....	39
Gambar 3.2	Grup Seni Hadrah dari Pondok Pesantren Al Falah, Silo, Jember	43
Gambar 4.1	Pertemuan Sejumlah Kebudayaan Pendukung Pendalungan.....	91
Gambar 5.1	Para Remaja dalam Tren Baru Kesenian <i>Mini Sound</i>	109
Gambar 5.2	<i>Can-macanan Kaddhuk</i> di Jember (Di Bondowoso Biasa Disebut Singo Wulung)	111
Gambar 5.3	Musik patrol ialah salah satu produk kesenian khas masyarakat Pendalungan.	112
Gambar 5.4	Sebuah grup musik patrol mengikuti festival dan berkeliling kampung di malam hari pada bulan Ramadan di Jember.	112
Gambar 5.5	Seni Barongsai dan Leang Leong, Kesenian Khas Masyarakat Tionghoa.....	113
Gambar 5.6	Seni jaranan digemari masyarakat Jember terutama di bagian selatan.	115
Gambar 5.7	Seni Jaranan: Para penonton muda sering mengalami <i>entrance</i> (kesurupan) secara massal.	115

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gambar 5.8	Seni ludruk melibatkan banyak pemain laki-laki yang berperan sebagai tokoh perempuan.	118
Gambar 5.9	<i>Mamacah/macapat</i> adalah seni membaca cerita dengan dilakukan dan menggunakan bahasa Madura.	119
Gambar 5.10	<i>Kothekan lesung</i> masih terus dipertahankan oleh Komunitas Pandhalungan Jember.....	120
Gambar 5.11	Tari lahbako menggambarkan para perempuan yang sedang memetik dan mengolah tembakau.....	121
Gambar 5.12	Para Penari Muda Sanggar Tari Kartika Budaya.....	122
Gambar 5.13	Grup Kentrung Djos, Salah Satu Pengusung Kesenian Khas Pendalungan	125
Gambar 5.14	Grup Kentrung Djos dengan Model Pementasan Drama-Dialog.....	128
Gambar 6.1	Peserta JFC tampil dengan konsep utamanya yang terkesan glamor dan <i>grande</i>	142



Daftar Tabel

Tabel 3.1 Persebaran Penduduk di Tapal Kuda	43
---	----

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Pengantar Penerbit

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Penyediaan terbitan ilmiah yang berkualitas adalah salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pendalungan adalah istilah yang disematkan oleh pihak lain kepada masyarakat yang hidup di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Orang Pendalungan merupakan masyarakat multikultur yang menetap di area Pendalungan Raya yang tersebar di sembilan wilayah administratif kota dan kabupaten mulai Kabupaten Pasuruan di utara hingga Kabupaten Banyuwangi di selatan. Masyarakat Pendalungan memiliki identitas kultural yang beragam yang telah menjaga dan mempraktikkan multikulturalisme dan pluralisme sejak lama, bahkan sebelum memasuki era kemerdekaan.

Buku *Orang Pendalungan* ini berusaha memperkenalkan siapa dan bagaimana masyarakat Pendalungan. Meskipun turut mengupas karakteristik masyarakat Pendalungan yang ada di beberapa wilayah Tapal Kuda, buku ini secara khusus mengungkapkan identitas masyarakat Pendalungan yang berada di wilayah Jember, baik dalam

konsep Pendalungan, kesenian, bahasa, hingga tantangan-tantangan global yang mesti diantisipasi.

Kami berharap hadirnya buku ini dapat menjadi referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Prakata

Hampir dua dasawarsa yang lalu ketika guru sekaligus sahabat penulis, Prof. Dr. Ayu Sutarto, menyusun artikel pendeknya yang berjudul “Sekilas tentang Masyarakat Pendalungan” (2006), beliau mengakui bahwa tulisan, buku, dan kajian tentang masyarakat Pendalungan masih sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ternyata kelangkaan referensi mengenai masyarakat dan kebudayaan Pendalungan itu masih tetap terjadi sekarang—ketika penulis menyusun buku ini.

Para mahasiswa yang ingin mengkaji pernak-pernik kehidupan masyarakat Pendalungan pun selalu mengeluhkan hal itu. Para peneliti kebudayaan seolah-olah hanya sekilas saja melirik Pendalungan dengan tingkat ketertarikan yang rendah. Pendalungan seolah terselip di balik limpah ruah kajian tentang Using, Tengger, dan Madura.

Basis-basis intelektual, untuk menggali dan mengenalkan budaya Pendalungan, belum didirikan di Jawa Timur sebelum ini. Namun, beberapa institusi pendidikan tinggi, seperti Universitas Jember (Unej) dan Universitas Muhammadiyah (Unmu) Jember, mulai tertarik. Unej sudah memulainya dengan memasukkan topik penelitian Pendalungan ke dalam Puslit Budaya Etnik dan Komunitas pada tahun 2016, kemudian Unmu Jember menyusulnya pada awal tahun 2017.

Buku ini secara umum membahas kebudayaan masyarakat Pendalungan yang tersebar di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Walaupun demikian, buku ini secara lebih khusus membahas masyarakat Pendalungan yang berada di Kabupaten Jember. Tentu saja berbagai permasalahan kebudayaan yang terjadi di Jember dan sekitarnya tidak terlepas dari dinamika politik, baik regional maupun nasional. Akan tetapi, tulisan ini tidak akan secara spesifik mengkritisi permasalahan geopolitik yang akibatnya adalah hanya menghasilkan sebuah pembahasan yang relatif sederhana dengan jangkauan sempit dan tidak terlalu mendalam.

Pendek kata, penulisan buku ini memang tidak dilandasi ambisi akademik yang berlebihan, tetapi sekadar respons pribadi penulis sebagai orang Jember yang berasal dari luar daerah (sudah sejak lama penulis tidak lagi merasa sebagai orang Kediri yang tinggal di Jember). Penulis juga menghindari gagasan ambisius mengenai pembahasan posisi kebudayaan Pendalungan di tengah kancah pergulatan kebudayaan nasional meskipun hal itu asyik dan menggiurkan. Bolehlah dikatakan tulisan ini sekadar unek-unek, keluh-kesah, jalan-jalan santai, tanpa teori dan metodologi yang *rigid* serta rapi. Ya, ini memang bukan skripsi apalagi disertasi.

Berkenaan dengan identitas budaya, selama ini para peneliti lebih menyukai bertanya mengenai cara-cara bagaimana suatu etnis merepresentasikan perbedaan budayanya jika dibanding dengan etnis-ethnis lain. Di sepanjang buku ini, penulis lebih suka bertanya tentang bagaimana mereka merepresentasikan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Upaya mencari berbagai perbedaan antaretnis tidak terlalu sulit dilakukan, tetapi penulis tidak tertarik memilih cara demikian untuk menjelaskan persoalan identitas budaya. Dalam perspektif modern keunggulan suatu etnis lebih bermanfaat jika digali daripada sekadar mengungkap perbedaan-perbedaan yang ada padanya dan dibanding dengan etnis lainnya.

Dalam hal penggunaan istilah, baik tulisan maupun pengucapannya, dalam buku ini penulis memilih istilah *Pendalungan* (bukan Pendhalungan, Pandalungan, Pandhalungan, atau

Mendalungan). Alasan sederhana, tetapi cukup rinci mengenai hal ini penulis uraikan pada bab khusus yang secara spesifik membahas etimologi istilah Pendalungan.

Meskipun cakupan pembahasan dalam buku ini meliputi keseluruhan wilayah kebudayaan “Pendalungan Raya”, sebagian besar contoh-contoh kasus yang penulis kedepankan adalah kasus-kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat Pendalungan di Jember. Hal ini didasari sejumlah pertimbangan. *Pertama*, masyarakat Jember cukup representatif untuk menjadi contoh konkret apa sesungguhnya “peristiwa Pendalungan” itu. Jika dibanding dengan daerah-daerah lainnya di Tapal Kuda, percampuran Jawa-Madura secara cukup berimbang terjadi di Jember. *Kedua*, intensitas dan daya jangkau penelitian untuk menelusik seluruh wilayah Pendalungan Raya sungguh-sungguh terbatas. Sehubungan dengan hal ini, yakni untuk menutup celah dan kekurangan cakupan buku ini, masih diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Karena telah aktif dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan sejak belia, dalam tulisan ini penulis tidak akan menghindar dari kesan aktivisme. Walaupun demikian, karena menjadi dewasa di lingkungan akademis, penulis se bisa mungkin berusaha tetap menjaga agar tulisan ini bersifat reflektif dan analitis.

Buku ini penulis maksudkan sebagai upaya sederhana untuk membantu siapa saja yang ingin memahami masyarakat dan kebudayaan Pendalungan, kemudian berdasarkan pemahaman tersebut sudi berbesar jiwa untuk belajar menanam serta menyemaikan sikap saling memahami, menghormati, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya di tengah masyarakat Tapal Kuda yang majemuk. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang vakum dari perbedaan.

Semoga bermanfaat.

Mochamad Ilham



Ucapan Terima Kasih

Tidak mudah untuk menggali dan merefleksikan pikiran serta pandangan-pandangan penulis mengenai masyarakat dan kebudayaan Pendalungan secara sistematis. Salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan referensi tentang masyarakat dan kebudayaan Pendalungan. Oleh karena itu, penulis bersyukur kepada Allah Swt. yang atas rahmat-Nya buku ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini. Buku ini sebelumnya berjudul *Orang Pendalungan: Pengayam Kebudayaan di Tapal Kuda* dengan jumlah eksemplar tertentu. Meskipun pada mulanya buku ini telah diterbitkan secara terbatas oleh Penerbit Paguyuhan Pandhalungan Jember (PPJ), penulis yakin bahwa melalui penerbitan ulang yang diinisiasi oleh BRIN maka buku ini dapat dijangkau oleh lebih banyak masyarakat sehingga akan lebih bermanfaat.

Penulis berterima kasih kepada para sahabat penulis tercinta di Rumah Budaya Pandhalungan (RBP) yang telah memberi banyak informasi dan masukan berharga dalam penyusunan buku ini. Kepada mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Di RBP kita telah memulai banyak hal dan masih banyak hal lainnya

yang harus terus dilakukan bersama-sama. Keberhasilan dalam upaya penguatan kebudayaan tidak dapat diraih seorang diri tanpa berkolaborasi secara berkesinambungan.

Penulis juga wajib berterima kasih kepada para sahabat penulis di Asosiasi Tradisi Lisan (ATL). Dengan berbagai kegiatan ATL, baik di tingkat nasional maupun daerah, penulis telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi pemakalah. Dalam kesempatan tersebut topik yang penulis angkat hampir semuanya berkaitan dengan kebudayaan Pendalungan. Dengan cara itulah penulis terus-menerus diajak untuk berpikir dan merefleksikan gagasan penulis tentang kebudayaan Pendalungan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bersedia memfasilitasi proses penerbitan dan penyebarluasan buku ini dengan judul yang lebih padat dan sederhana: *Orang Pendalungan*.

Jember, Desember 2023
Mochamad Ilham



Bab 1

Pendalungan sebagai Kebudayaan

Siapakah sesungguhnya orang Pendalungan itu? Dari mana mereka berasal? Apa yang menjadi ciri utama sehingga mereka dapat dikenali dengan cukup mudah? Itulah sejumlah pertanyaan mendasar yang hendak penulis diskusikan dalam buku ini. Tentu saja bukan hal mudah untuk menjelaskan semua itu karena hingga saat ini secara akademis *pendalungan* masih berupa sebuah gagasan yang belum cukup populer dan masih jauh dari kemapanan. Oleh karena itu, penulis akan membahas perihal siapa dan bagaimana sesungguhnya orang Pendalungan secara bertahap dan berselang-seling serta turut mengulas sejumlah hal lain yang terkait. Demikian pula halnya dengan pembahasan mengenai beberapa tulisan terdahulu yang mengangkat isu-isu Pendalungan. penulis akan singgung pada saat yang tidak bersamaan, tetapi ketika kita sedang mendiskusikan topik yang sejenis.

A. Identitas Pendalungan

Istilah *pendalungan* telah cukup lama digunakan secara luas oleh masyarakat kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, terutama untuk mengidentifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan identitas kultural

mereka. Masyarakat di luar kawasan ini pun menggunakan istilah tersebut ketika hendak memahami atau sekadar menandai keberadaan suatu masyarakat unik yang tersebar luas di bagian timur Provinsi Jawa Timur tersebut. Artinya, *pendalungan* bukan kosakata yang sama sekali baru. Bukan pula gagasan yang baru muncul “kemarin sore”. Bahkan, sebagian daerah kawasan ini telah mantap menyebut masyarakatnya sebagai masyarakat Pendalungan. Hal ini menjadi implikasi yang jelas bahwa sejak saat itu segala kebijakan resmi yang diambil harus mempertimbangkan identitas kultural mereka sebagai orang Pendalungan.

Kota Probolinggo, misalnya, melalui sebuah acara temu ilmiah telah memproklamasikan dirinya sebagai “Ibu Kota Pendalungan” pada tahun 2010. Sejak itu, Kota Probolinggo cukup giat menyelenggarakan berbagai acara yang bersifat promotif untuk memasyarakatkan identitas kultural *baru* tersebut. Salah satu ajang yang mereka selenggarakan adalah “Apresiasi Seni Probolinggoan” yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kota Probolinggo bersama Dewan Kesenian Kota Probolinggo. Pada acara temu ilmiah tersebut sejumlah pengkaji kebudayaan dari Universitas Jember diundang—penulis merupakan salah satu di antara mereka—khusus untuk berbicara tentang sejarah, perkembangan, dan masa depan kebudayaan Pendalungan.

Di sisi lain, masyarakat Situbondo mengidentifikasi diri mereka sebagai orang *Pandhelungan Paseseran* (Pendalungan Pesisir). Mereka menciptakan sebuah tari berjudul *Lajhar Pandhelungan*, atau disingkat menjadi *Landhung*, yang digali dari nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Situbondo yang berlatar belakang Madura-Jawa pesisir. Konsepsi Pendalungan dijadikan titik tolak penggarapan idiom gerak tari dengan memasukkan unsur gerak yang ada dalam berbagai seni tradisi yang mereka miliki, seperti silat, *rodhad* (saman), dan *pojhien*. Musik pengiring tari digali dari unsur musik tradisional yang berkembang di Situbondo, seperti karawitan, hadrah, dan musik kentongan.

Di Jember sesungguhnya kata *pendalungan* sudah cukup lama dikenal. Namun, ketika menginjak tahun 2016, tiba-tiba kata ini menjadi buah bibir masyarakat. Tambahan lagi, setelah Bupati Faida, yang belum genap setahun memimpin Jember, mendeklarasikan wilayah ini sebagai Kota Pandhalungan,¹ tepatnya pada 14 Mei 2016. Dalam skala tertentu, bagi masyarakat Jember, deklarasi Bupati merupakan sebuah *cultural bomb* yang menyentak, mengundang tanya dan pemikiran, serta kesinisan dan cibiran dari segelintir orang.

Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, acara-acara bertajuk pendalungan lebih sering digelar di Jember. Pada tahun 2016, misalnya, “Festival Pandhalungan” yang menampilkan berbagai aktivitas dan kreasi seni budaya digelar. Ada pula “Pandhalungan Night Show” yang diinisiasi oleh koran *Radar Jember* (Jawa Pos Group) yang menampilkan berbagai potensi seni kelompok-kelompok masyarakat, khususnya para remaja, pelajar, dan mahasiswa.

Para seniman, akademisi, serta orang-orang yang memiliki perhatian dan kepedulian tinggi terhadap pengembangan seni budaya daerah juga menggagas “Rumah Budaya Pandhalungan” dan “Komunitas Pandhalungan” yang bahkan telah berdiri sebelum ada deklarasi Bupati. Mereka mencetak kaus bertuliskan “Pandhalungan”, dijual dan laris manis. Kaus itu selanjutnya dikenakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak muda hingga para pejabat tinggi Kabupaten Jember. Mereka juga merancang penutup kepala khas (*udheng*) dari bahan batik jemberan dan ternyata disukai masyarakat sehingga laris manis pula. Di Kecamatan Ambulu sekelompok remaja pencinta musik mendirikan “Ndalungnesia”, sebuah grup musik beraliran campursari-rege yang manajemennya dikelola oleh Sanggar Seni Kartika Budaya. Sanggar seni ini adalah salah satu contoh kelompok pegiat seni muda yang penuh inspirasi dan memiliki komitmen terhadap cara baru mengelola seni tradisional, yang bercorak kekinian. Sekelompok anak muda pencinta sastra juga

1 Mengenai cara penulisan dan pengucapan kata Pendalungan (Pandhalungan, Pendhalungan, dll.) penulis bahas di bab khusus mengenai etimologi atau asal-usul kata tersebut.

telah mendirikan “Komunitas Sastra Pendalungan”. Kegiatan mereka, antara lain, secara berkala membahas dan membaca puisi.

Sementara itu, di bidang kerajinan, para perajin di Desa Balung Tutul memproduksi tas-tas unik bertuliskan “Pandhalungan” yang dirancang sebagai cendera mata. Tas-tas tersebut dibuat dari bahan dasar buah mojo yang dikeringkan. Di bidang kuliner, muncul Depot Soto Pendalungan dan Warung Ndalung di Kota Jember. Yang pertama khusus menjual nasi soto, yang kedua berupa kafe untuk anak-anak muda.

Pada acara “Pandhalungan Night Show”, yang berlangsung enam kali sepanjang bulan Januari hingga Maret 2017, para seniman Jember menyuguhkan lagu Pendalungan, tari (*flashmob*) Pendalungan, tari Jathil Pendalungan, dan opera Pendalungan. Bahkan, Bupati Jember ikut bermain sebagai tokoh utama dalam pertunjukan opera Pendalungan yang model pertunjukannya mirip dengan ketoprak (Gambar 1.1).²



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 1.1 Opera Pendalungan Hasil Kreasi Para Seniman Jember

² Bupati Jember, dr. Faida, berperan sebagai Dewi Rengganis. Lakon *Dewi Rengganis* diangkat dari cerita rakyat setempat. Naskah ditulis Ilham Zoebazary, sutradara oleh Supartu.

Di Hotel Aston Jember, sebuah hotel berbintang tiga, menu-menu istimewanya menggunakan nama Pendalungan. Diskusi-diskusi ilmiah mengenai identitas budaya Pendalungan diselenggarakan di berbagai tempat, baik oleh kalangan perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, seniman, maupun pihak birokrasi dalam rangka menggali lebih dalam pemahaman mengenai identitas kultural yang dari waktu ke waktu terlihat makin *sexy* tersebut.

Mengapa masyarakat Jember tampak begitu antusias merespons gagasan Pendalungan sebagai identitas kultural? Ada tiga hal yang mendasarinya. *Pertama*, mereka sudah mengenal konsep Pendalungan sebelumnya meskipun pengenalan mereka belum berupa pemahaman yang utuh. *Kedua*, identitas kultural tersebut dinyatakan secara langsung oleh figur politik tertinggi di Kabupaten Jember, yaitu Bupati. *Ketiga*, identitas kultural *baru* tersebut mampu menjawab *kegamangan posisi etnisitas* masyarakat. Kegamangan ini—tidak benar-benar Jawa, tetapi juga tidak benar-benar Madura; tidak benar-benar Arab, tetapi juga tidak benar-benar Cina—adalah suatu kegamangan posisi etnisitas yang di dalam benak setiap orang harus mendapatkan penjelasan rasional serta memadai.

Pada tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Jember masih cukup konservatif untuk tidak menyebut dirinya sebagai Jawa, Madura, atau etnis lainnya. Perbedaan yang mencolok antara budaya Jawa dan Madura menyebabkan terjadinya segregasi antara kedua kebudayaan tersebut. Secara umum masyarakat Jawa dikategorikan sebagai masyarakat yang halus, sedangkan masyarakat Madura keras. Sebetulnya, segregasi formal secara geografis tidak pernah ada di Jember. Sekarang setelah promosi identitas Pendalungan dilakukan cukup gencar oleh pihak Pemkab Jember, masyarakat menganggap isu Pendalungan sebagai *isu biasa* yang dapat ditanyakan kepada lebih banyak orang pada berbagai kesempatan. Hal demikian juga terjadi sebelumnya di Probolinggo dan Lumajang.

Jauh hari sebelum terjadi hiruk-pikuk seputar penggunaan identitas Pendalungan secara *resmi*, beberapa peneliti sosial-budaya di Universitas Jember telah menggunakan istilah dan konsep

Pendalungan (sebutan lainnya, yakni Pendhalungan, Pandalungan, Pandhalungan, dan sebagainya) dalam tulisan-tulisan mereka. Namun, sebagaimana disampaikan Raharjo (2006), Pendalungan dalam konteks wacana kebudayaan merupakan tema baru dan belum banyak mendapatkan perhatian serius dari para pakar budaya.

Di samping itu, masyarakat Pendalungan dianggap masih kurang memiliki atraksi kultural yang bisa dijadikan ikon budaya, seperti halnya wilayah kebudayaan lain di Jawa Timur sehingga kurang menarik untuk dijadikan bahan kajian. Banyuwangi, misalnya, memiliki akar kultural Using dan Blambangan yang menancap cukup dalam dan jelas terbaca dari beberapa ratus tahun silam. Malang, Surabaya, dan sekitarnya memiliki akar budaya Arek yang dapat ditelusuri hingga era Majapahit dan bahkan era Singasari. Kediri, Madiun, dan daerah-daerah di sekitarnya memiliki akar budaya Mataraman yang bersumber pada Kerajaan Mataran, bahkan mereka juga memiliki kekayaan budaya Panji yang bersumber dari era kerajaan yang berumur lebih tua lagi. Begitu juga daerah-daerah lain di luar Jawa Timur, yaitu Bali, Jawa Tengah, tanah Pasundan di Jawa Barat, dan lain-lain. Jika dibanding dengan wilayah-wilayah tersebut, Pendalungan bak masih berupa hutan belantara kebudayaan yang selama ini jarang dieksplorasi.

Pertanyaan yang dapat diajukan kemudian, apakah yang disebut kebudayaan Pendalungan itu benar-benar ada? Jika memang ada, apakah sesungguhnya kebudayaan Pendalungan itu sampai di *unit terkecil*-nya? Tentu tidak mudah menjawabnya. Kita harus lebih dahulu berputar-putar demi memperoleh pemahaman yang komprehensif.

B. Memahami Kebudayaan

Sebelum turun ke ranah konkret kebudayaan Pendalungan, penulis perlu menguraikan konsep-konsep kebudayaan yang menjadi landasan dalam berpikir. Dengan demikian, trek mana saja yang penulis ikuti atau hindari (karena berbagai pertimbangan) akan tampak.

Definisi kebudayaan yang disusun Edward Burnett Taylor termasuk salah satu definisi tertua, tetapi masih cukup relevan untuk

digunakan hingga sekarang. Menurut Taylor (1871), budaya adalah keseluruhan hal yang kompleks, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan lain yang dimiliki manusia. Sementara itu, Koentjaraningrat (1994) mendefinisikan budaya sebagai sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Senada dengan hal itu, Spradley (1980) mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar. Sistem ini kemudian mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekelilingnya sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekitarnya.

Meskipun sekarang istilah *budaya* dan *kultur* biasa digunakan secara simultan dan keduanya merujuk pada makna yang identik, sesungguhnya keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal). Budaya diartikan sebagai segala sesuatu yang melulu bersangkut-paut dengan akal-budi. Sementara itu, kultur atau *culture* dalam bahasa Inggris (berasal dari bahasa Latin *cultura*, dari akar kata *colere*) memiliki arti mengolah tanah atau mengerjakan tanah dalam kaitannya dengan aktivitas bercocok tanam. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa asal-usul istilah *budaya* merujuk pada aktivitas mental, sedangkan *kultur* merujuk pada aktivitas fisik.

Baik budaya, kebudayaan, maupun kultur harus kita maknai sebagai suatu konsep abstrak yang rumit dan total, yang melekat pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, budaya tidak dapat direduksi cakupannya sebagai sekadar rujukan pada ras, bangsa, etnis, apa lagi bagian kecil saja dari hidup mereka, yakni kesenian. Budaya dalam arti seluas-luasnya mencakup totalitas proses kehidupan sehari-hari umat manusia, mulai dari tindakan-tindakan nyata hingga cara berpikir. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, penulis merumuskan budaya sebagai “seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi pengetahuan, gagasan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, tindakan, serta kebiasaan lain yang dimiliki manusia, yang

diperoleh melalui proses belajar untuk digunakan dalam menafsirkan, menjalani, dan memaknai kehidupan sehari-hari.”

Sejak lama penulis telah beranggapan bahwa budaya adalah hasil karya cipta terbaik manusia yang menjadi pendukung sekaligus tumpuan kehidupannya sehari-hari. Suatu kebudayaan tidak mungkin bisa dipahami sebagai sebuah entitas beku, stabil, dan steril. Kebudayaan adalah totalitas proses kehidupan umat manusia yang menggelinding ke arah masa depan. Namun, ia menerima berbagai gesekan, benturan, ujian, dan ganjalan dari segala sisinya. Bahkan, sembari menggelinding ke arah masa depan, kebudayaan juga terus-menerus berdialog dengan jejaknya sendiri yang ditinggalkannya di belakang, di masa lalu.

Menurut Saukko (2003), kajian-kajian budaya tidak bisa membuat rumusan teoretis dengan kesatuan konsep yang bersifat universal. Mengapa demikian? Karena kulturalisme dan materialisme tidak bisa dihubungkan dengan model hubungan yang *fixed*, bagaimanapun strukturnya. Semuanya tergantung pada konteks historis yang spesifik. Di sisi lain, model kajian budaya yang diusung Hall (1991) tetap tidak melupakan basis material. Mungkin di situlah letak sisi praksisnya. Dia merumuskan teori budaya yang bisa digunakan oleh para agen sosial untuk melakukan perubahan.

Sebagaimana dikatakan Barker (2004), kajian budaya dalam hal ini dianggap sebagai suatu proyek cair dan luar biasa yang mengisahkan citra tentang dunia yang tengah berubah dengan harapan agar umat manusia dapat memperbaikinya. Di lain pihak, Geertz (1973), melalui perspektif interpretatif/simbolis, memandang kebudayaan sebagai suatu sistem konsepsi yang digunakan manusia untuk menafsirkan hidup dan menentukan sikap terhadapnya. Adapun persoalan pokok dalam kebudayaan di sini adalah suatu metode untuk menemukan apa yang disebut dengan *kebudayaan suatu etnis* (Abdullah, 2006). Etnisitas menjadi konsep kunci dalam pengkajian dan pengembangan budaya karena setiap etnis tidak akan pernah berhenti memproduksi dan mereproduksi simbol-simbol kultural untuk bertahan hidup dan memperoleh pengakuan atas eksistensinya.

Dalam kaitannya dengan identitas budaya, penggunaan konsep etnisitas sering tumpang tindih dengan konsep ras. Jika *ras* dimaknai sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi manusia berdasarkan unsur genetik, *etnisitas* digunakan untuk mengidentifikasi suatu keanggotaan masyarakat tertentu, individu per individu, berdasarkan kriteria budaya yang mereka sepakati. Jadi, anggota suatu etnis dicirikan oleh budaya yang sama sehingga membuat para anggota memiliki rasa keterikatan dan kebersamaan di dalam kelompok mereka sendiri. Biasanya elemen-elemen budaya tradisional yang dipilih sebagai *representasi simbolis* identitas etnis.

Pada masa Orde Baru pemerintah menerapkan sistem politik yang lebih primordial mengenai etnisitas, termasuk terhadap Madura di Jawa Timur dan Using di Banyuwangi. Etnis diterjemahkan sebagai atribut kelompok berdasarkan batasan geografis. Oleh karena itu, masyarakat Madura di Jawa Timur dan masyarakat Using di Banyuwangi mendapatkan pelajaran bahasa Jawa di sekolah-sekolah, bukan bahasa ibu mereka. Pemerintah Orde Baru mereproduksi skema etnisitas dari pemerintah kolonial Belanda. Pembacaan yang lebih kritis mengenai hal ini secara nyata akan memperlihatkan variasi identitas budaya dan etnisitas di wilayah Tapal Kuda.

Pembahasan mengenai etnisitas yang selama ini dilakukan para peneliti kebudayaan biasanya dikaitkan dengan konsep “kelompok etnik” yang merujuk pada studi-studi antropologi klasik, seperti *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* (Barth [ed.], 1969). Kelompok etnik dianggap memiliki batas-batas nyata dan alamiah, misalnya, lokasi geografis dan bersifat permanen. Etnisitas dilihat sebagai bagian dari kebudayaan yang statis. Dengan demikian, identitas sosial-budaya membedakan kelompok etnik yang satu dengan yang lain secara jelas. Pada masa kini kita akan mudah terpeleset dalam mengartikan gagasan tentang identitas kultural suatu etnis jika hanya melihat kelompok etnis sebagai suatu kelompok statis, homogen, eksklusif, terikat, dan hanya membawa nilai budayanya sendiri. Perspektif semacam ini pada masa lalu memang cukup relevan ketika digunakan untuk memandang dan memahami masyarakat

Indonesia. Pada waktu itu masyarakat masih hidup terpisah-pisah, khususnya secara geografis sehingga berbagai perbedaan khas dan unik yang muncul serta berkembang di antara mereka cukup jelas terlihat. Mana masyarakat Jawa, mana masyarakat Bali, mana masyarakat Sunda, dan sebagainya, masih cukup mudah dipetakan dan dideskripsikan. Namun, ketika teknologi, terutama teknologi transportasi dan informasi, sudah berkembang sedemikian canggih dan interaksi antaretnis sudah begitu intens, batas-batas tradisional yang dahulu kokoh itu pun perlahan-lahan menipis dan memudar. Oleh karena itu, identitas etnisitas harus kita perhatikan berdasarkan proses dan faktor sosio-budaya yang menunjukkan bagaimana suatu etnis membangun, memelihara, dan mengubah atau sekadar menyesuaikan identitas mereka dengan dunia yang terus bergerak.

Bourdieu (1984) menyarankan agar kita melihat sebuah dunia kebudayaan yang selalu lahir akibat dari transisi dan sirkulasi pemikiran-pemikiran baru yang semula hanya beredar di kalangan terbatas, kaum intelektual. Kalangan ini juga ada di bidang seni, termasuk para akademisi yang disebutnya sebagai produsen simbol-simbol. Mereka memproduksi simbol-simbol kepada para produsen di tahap kedua, yaitu media yang menghasilkan budaya konsumen dan kebudayaan populer. Dengan melalui para agen perubahan itulah, batas-batas wilayah kebudayaan yang semula tertutup dapat diakses dan menjadi milik publik. Cara pandang Bourdieu terhadap kebudayaan ini memungkinkan kita untuk memahami umat manusia secara lebih luas dan mendalam.

C. Pendalungan sebagai Platform

Pendalungan memang *sexy* sekaligus kontroversial. Pada satu sisi, konsep yang belum begitu dipahami masyarakat secara luas ini mengundang daya tarik untuk ditelaah, tetapi di sisi lain merangsang perdebatan.

Merujuk pada pandangan Appadurai (2005), persoalan Pendalungan sesungguhnya adalah persoalan “*the production of locality*.” Pendalungan merupakan bangunan konseptual yang khas

untuk memahami suatu masyarakat, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh upaya pengembangan kebudayaan daerah. Artinya, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang diambil dan dijalankan harus didasarkan pada nilai-nilai tradisi, norma-norma agama, dan etika sosial, tidak mengacu secara membabi-butu pada proyek pencitraan dan pragmatisme politik. Sebagaimana dikatakan Hall (1991), “Bukan politik yang melegitimasi kebudayaan, melainkan kebudayaanlah yang melegitimasi politik.” Itulah sebabnya mengapa langkah-langkah pengembangan kebudayaan di setiap daerah membutuhkan suatu *platform* kebudayaan yang jelas agar upaya pengembangan tersebut terarah, tidak menjadi papan permainan catur para avonturir politik. Pengembangan kebudayaan berarti pengembangan daya hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Di Kabupaten Jember, Bupati Faida, dalam upayanya mengembangkan kebudayaan daerah, telah memilih suatu perspektif yang eksplisit. Dalam hal ini, Bupati memilih Pendalungan sebagai *platform*. Artinya, secara filosofis Pendalungan diandaikan sebagai kerangka konseptual penguatan kerukunan sosial antarmasyarakat di wilayah Jember. Pendalungan menjadi semacam ideologi yang diharapkan dapat mengakomodasi multikulturalisme supaya setiap warga memiliki hak hidup yang sejajar dalam konteks kemasyarakatan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis atas pilihan tersebut, elemen-elemen Pendalungan harus tergambar dalam semua kebijakan dan aktivitas pemerintahan, baik aktivitas fisik maupun mental-spiritual. Artinya, Pendalungan sebagai sebuah *platform* hendaknya diterjemahkan, dimaknai, dan diperlakukan menjadi semacam *blueprint* untuk mengembangkan seluruh potensi masyarakat Jember yang bercorak multietnik dan multikultur.

Pilihan Bupati Faida terhadap konsep Pendalungan sebagai *platform* dalam mengembangkan kebudayaan daerah tentunya telah melewati berbagai pertimbangan dan perenungan, baik yang bersifat normatif, akademik, maupun etik. Jember memiliki kekayaan kearifan lokal yang bersumber pada nilai-nilai kultural yang telah dikembangkan oleh nenek-moyang selama berabad-abad. Semua itu

dapat menjadi referensi Bupati dalam menentukan langkah panjang ke depan. Biasanya dalam menentukan pilihan konsep seperti itu, seorang pimpinan menggunakan sudut pandang *panopticon* (meminjam istilah Foucault). Istilah yang menggambarkan suatu kamera bergerak dari atas dan menguasai seluruh pandangan yang beraneka-ragam itu. Cara ini memungkinkan bagi sang pemimpin untuk melihat keseluruhan peta persoalan sehingga tidak ada satu pun bagian penting yang terlewatkan.

Panopticon adalah ilustrasi yang diberikan Foucault untuk menggambarkan bagaimana kuasa menggunakan pengetahuan untuk mengontrol tindak tanduk populasi. *Panopticon* adalah model penjara yang bentuknya melingkar dan di tengah-tengah lingkaran itu ada menara pengawas yang diisi oleh sipir penjara. Akibatnya, para tahanan akan tetap merasa diawasi dengan atau tanpa sipir dalam menara pengawas tersebut. Akan tetapi, agaknya Foucault kurang teliti dalam menggunakan istilah itu karena sapuan pandangan vertikal atau dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas disebut *tilt*, sedangkan *pan* adalah sapuan pandangan horizontal. Kekeliruan ini bisa mengakibatkan salah pengertian karena adanya *contradiccio in terminis*. Meskipun demikian, penulis hanya mengambil spirit yang ada di balik konsep yang ditawarkan Foucault tersebut. Jika Foucoult merujuk pada konsep *panopticon*-nya Jeremy Bentham, istilah yang tepat adalah *bird eye view* atau juga disebut *aerial shot*, yakni teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Hasilnya akan memperlihatkan lingkungan yang luas dan benda-benda yang ada di tempat itu tampak kecil dan bertebaran. Teknik ini merupakan variasi dari *crane shot* (Zoebazary, 2010).

Ketika budaya Pendalungan diposisikan sebagai identitas kultural oleh pemerintah daerah, dalam konteks semacam ini sebaiknya budaya Pendalungan tidak difungsikan sebagai sumur tempat menimba nilai-nilai bagi masyarakat, tetapi sebagai sebuah kerangka untuk membangun solidaritas secara kolektif. Dengan demikian, kita tidak lagi memandang nilai-nilai budaya sekadar berdasarkan nilai historis yang dimilikinya.

Dalam mengembangkan kebudayaan daerah, salah satu tantangan terberat yang kita hadapi adalah berdialog tentang wacana globalisasi. Hal ini harus kita lakukan karena globalisasi diklaim sebagai era yang tak terhindarkan. Globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima oleh siapa pun yang berada di muka bumi. Pada era globalisasi, dunia beserta seluruh isinya mengerucut menjadi sebuah “desa global” yang tidak lagi memiliki sekat-sekat geografis, politik, dan kebudayaan (McLuhan, 1964).

Sejumlah pihak menuduh bahwa globalisasi telah menjadi *mode of domination* baru kaum kapitalis Barat yang menempatkan mereka sebagai aktor kunci yang memiliki posisi istimewa dan memainkan peran global dalam melakukan kontrol terhadap berbagai aspek kehidupan umat manusia, seperti ekonomi, politik, sains dan teknologi, serta sosial dan budaya. Sebagai sistem dominasi baru, globalisasi digunakan kaum kapitalis Barat untuk melanjutkan hasrat dominasi sekaligus mempercanggih proses eksplorasinya terhadap segenap potensi sosial masyarakat dunia ketiga.

Proses globalisasi cenderung eksplotatif terhadap masyarakat dunia ketiga dan dalam pola relasi yang tidak berimbang di antara keduanya. Namun, masih ada ruang yang patut disyukuri karena ternyata globalisasi juga menghasilkan paradoks, yaitu Etnisitas, kultur, dan nilai-nilai tradisi justru menemukan momentum terbaiknya untuk menguatkan fondasi dan perspektif masing-masing.

Upaya pembangunan kesadaran kebudayaan masyarakat Pendalungan sudah selayaknya harus merujuk pada historisitas dan lokalitas masyarakat Pendalungan. Dengan kata lain, membangun masyarakat kekinian yang berakar pada sejarah dan kekayaan tradisi yang dimilikinya. Apa yang dalam tulisan ini penulis posisikan sebagai entitas lokal dan bersifat spesifik tidak perlu dipertentangkan dengan gagasan kemodernan yang menjadi wacana global. Artinya, tradisi dan lokalitas tidak perlu direduksi atau disimplifikasi menjadi persoalan praktik romantisme-rekreatif ketika berhadapan dengan pasar dan pariwisata. Tradisi dan lokalitas, bagaimanapun, harus dipandang sebagai arena keseharian umat manusia.

Seharusnya diskusi dan bahkan perdebatan sengit mengenai upaya pengembangan kebudayaan lebih sering terjadi di kalangan birokrat dan politikus dengan melibatkan potensi para akademisi. Namun, sayangnya mereka tampak lebih gemar memusatkan perhatian pada isu-isu kekuasaan yang diberi embel-embel primordialisme, agama, dan ideologi. Tentu saja hal ini berimplikasi pada prioritas pengalokasian dana keuangan pemerintah dan penyusunan berbagai peraturan daerah yang akan ditetapkan dan kemudian dijalankan.

D. Kajian dan Politik Kebudayaan

Suatu etnik yang secara tradisional berada dalam suatu wilayah kebudayaan tertentu, sebagaimana halnya masyarakat Jawa di Jawa Timur, lambat laun akan terbagi ke dalam sejumlah subetnik sehingga ekspresi simbolis suatu kelompok masyarakat tidak bisa lagi digeneralisasi dan dimaknai secara statis. Hal semacam itu telah terjadi di mana-mana, termasuk di Jawa Timur yang kemudian memiliki beberapa wilayah kultural. Jawa tidak homogen. Madura juga tidak tunggal. Tambahan pula, pada saat ini masyarakat telah memiliki keberanian besar untuk meredefinisi kebudayaan mereka sendiri. Suatu praktik yang oleh Giddens (1995) disebut sebagai “reproduksi lokalitas”, yakni suatu proses pendefinisian ulang atau pencarian makna yang lebih representatif di dalam ruang-ruang kebudayaan oleh masyarakat lokal terhadap kebudayaan mereka sendiri sesuai dengan kondisi psikologis, geografis, dan sosiokultural yang mereka hadapi pada saat ini.

Apa yang telah kita alami pada masa silam—ketika kita harus berhadapan dengan politik kebudayaan Orde Baru yang mengarah pada keseragaman dan totaliterisme—merupakan hal yang menyesakkan dan patut disesalkan. Kebijakan Orde Baru tidak mengakomodasi realitas bangsa Indonesia yang majemuk, yang terdiri atas lebih dari 1.300 suku bangsa,³ dengan kekayaan bahasa pengantar

³ Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah total penduduk suku Jawa 40,22%, suku Sunda 15,5%, suku Batak 3,58%, suku Madura 3,03%, suku Betawi 2,88%, suku Minangkabau 2,73%, suku Bugis 2,69%, dan suku Melayu 2,27% (Badan Pusat Statistik, 2010).

lebih dari 700 bahasa daerah. Jika kondisi semacam itu dibiarkan berlangsung secara terus-menerus, hal ini tentu akan berpotensi untuk menyemaikan bibit-bibit perpecahan bangsa. Becermin pada pengalaman getir tersebut maka kita harus tak henti berjuang agar politik kebudayaan nasional dapat secara otomatis menular, menjadi model, dan diteladani oleh daerah-daerah. Hal itu berlandaskan pada pemikiran bahwa setiap produk kebudayaan memiliki keunggulannya masing-masing. Oleh sebab itu, tidak ada satu kebudayaan pun di tanah air yang perlu diklaim lebih superior dibanding dengan kebudayaan lainnya. Keragaman budaya selayaknya dipahami dan disepakati sebagai modal sosial dalam proses pembangunan bangsa.

Pelaksanaan pengkajian budaya, khususnya yang berkaitan dengan etnisitas dan identitas budaya, menjadi sangat berbahaya jika dilakukan secara serampangan, tanpa melihat konteks yang lebih mendasar. Kajian budaya model “kacamata kuda” seperti itu biasanya hanya berputar-putar pada deskripsi teori dan etimologi, tidak kunjung menuik ke bumi. Akibatnya, proses dan hasil kajian rentan terjebak dalam permainan wacana yang sepintas terlihat penting, tetapi sesungguhnya hanya remeh-temeh belaka. Hal semacam itu justru dapat mengganggu perjuangan untuk mengupayakan gerak perubahan kehidupan berkebudayaan masyarakat ke arah yang lebih beradab.

Kajian budaya, meskipun dilakukan dalam kerangka akademik, tidak disarankan melulu bersifat reflektif. Ia harus memberi ruang pada sisi praksis. Dengan kata lain, kajian budaya harus mampu melahirkan rumusan-rumusan yang dapat menjadi acuan dalam membangun kesadaran kolektif untuk bertransformasi. Oleh karena itu, para pengkaji budaya sudah saatnya mempertimbangkan keberpihakan—and keberpihakan berarti memiliki agenda perubahan.

Kajian budaya yang melulu menghamba pada basa-basi dan formalitas akademik, yang tampak gagah di permukaan karena menggunakan bahasa-bahasa “melangit”, pada akhirnya hanya akan memenuhi rak perpustakaan dan selanjutnya menjadi sampah peradaban.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab 2

Menelisik Asal Kata Pendalungan

A. Pendalungan, Sebuah Eksonim

Pendalungan adalah istilah yang disematkan oleh pihak lain kepada masyarakat yang hidup di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Hal semacam itu disebut dengan *eksonim* (nama/sebutan untuk suatu tempat/masyarakat yang diberikan oleh pihak lain) dan hal semacam ini sering kita jumpai di berbagai tempat. Lawan katanya adalah *endonim* atau *otonim*, yang berarti nama/sebutan yang diberikan untuk diri sendiri. Sebutan Wong Using untuk orang-orang asli Banyuwangi adalah eksonim, sedangkan sebutan Wong Tengger untuk orang-orang yang mendiami kawasan Pegunungan Tengger adalah endonim. Penamaan terhadap suatu masyarakat semacam ini penting dilakukan dalam rangka menandai keberadaan masyarakat tersebut sekaligus memahami mereka, baik untuk kepentingan akademis maupun non-akademis. Pemberian nama atau sebutan terhadap suatu masyarakat biasanya dilakukan karena tidak adanya sebuah penanda yang dianggap khas atau otentik secara internal.

Terkait penamaan terhadap masyarakat Tapal Kuda tersebut, selama ini berseliweran pertanyaan mendasar, seperti Apa makna kata *pendalungan*? (Pertanyaan lain tentang siapa yang memberi sebutan

tersebut dan sejak kapan nama itu digunakan telah penulis uraikan pada bab terdahulu.) Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* oleh Departemen Pendidikan Nasional (1985), secara etimologis konsep *pendalungan* berasal dari kata *dalung* yang berarti ‘dulang besar dari logam’. Senada dengan penjelasan tersebut, Prawiroatmodjo (1989) dalam *Bausastra Jawa-Indonesia II* menjelaskan bahwa konsep *pendalungan* berasal dari kosakata bahasa Jawa *dhalung* yang berarti ‘periuk besar’. Sehubungan dengan penggunaan *dalung* atau *dhalung* yang berarti ‘periuk besar’ tersebut, Yuswadi (2001) menekankan bahwa “ini adalah sebuah metafora untuk menggambarkan keberadaan suatu wilayah yang menampung beragam kelompok etnik dengan latar belakang budaya berbeda, yang kemudian melahirkan proses hibridisasi budaya.”

Ketika mengartikan istilah *pendalungan*, Sutarto (2006) dan Raharjo (2006) dalam tulisan mereka juga menggunakan kamus *Bausastra Jawa – Indonesia* sebagai dasar. Di dalam kamus tersebut kata *pendalungan* juga mengandung arti ‘berbicara/berkata dengan tiada tentu adabnya/sopan-santunnya’. Dalam konteks realitas masyarakat dan kebudayaan di kawasan Tapal Kuda, menurut Sutarto (2006), definisi itu bisa berarti bahwa bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat adalah bahasa yang kasar (ngoko) atau bahasa yang struktur gramatikanya belum mapan. Sementara itu, Raharjo (2006) juga menjelaskan bahwa secara etimologis kata *pendalungan* berasal dari dasar bahasa Jawa *dhalung* yang berarti ‘periuk besar’. Dalam konsep simbolis, “periuk besar” bisa didefinisikan sebagai tempat bertemuannya bermacam masyarakat yang berbeda etnis dan kebudayaan, kemudian saling berinteraksi dalam ruang dan waktu sehingga melahirkan suatu varian baru kebudayaan yang disebut Pendalungan. Metafora “periuk besar” sebagai tempat bertemuannya bermacam masyarakat dan kebudayaan ini, dalam pandangan penulis, hingga saat ini masih cukup relevan untuk digunakan dalam rangka menjelaskan keberadaan masyarakat Pendalungan, baik Jember maupun Pendalungan Raya.

B. Pendalungan, Definisi Kamus

Dalam kamus *Javanese English Dictionary* (Robson & Wibisono, 2002) tercantum dua makna yang berasal dari kata *mendhalung* atau *mendhalungan*, yaitu

- 1) *of mix blood*, dan
- 2) *confused (esp in applying the rules of speech level)*.

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) hanya diberikan penjelasan mengenai dalung, yaitu

dalung/da•lung:

- 1) *n dulang besar dibuat dari logam (perak),*
- 2) *n Jw lampu besar dibuat dari logam (tembaga) dipakai pada pertunjukan wayang kulit; belencong.*

Sementara itu, *Kamus Bahasa Jawa* (daring) yang disusun oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bekerja sama dengan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas Dikpora DIY (t.t.) mencantumkan beberapa kata yang berhubungan dengan *pendalungan*.

- 1) *mendhalungan* [mənðaluŋan] kn:
 - a) *engg. pranakan campuran.*
 - b) *pc. guneman ora karuan unggah-ungguh; kc. gendhalung.*
- 2) *gendhalungan* [gənðaluŋan]:
kn: *guneman tanpa tata-krama (ora trep enggoné nganggo unggah ungguhing basa).*
- 3) *dhalung* [ðaluŋ] engg. kn:
1 *kendhil gedhe, blencong.*
- 4) *bendhalungan* [bənðaluŋan] engg. kn;
guneman kang ora bener enggoné ngetrapaké unggah-ungguh.

Sementara itu, dalam *Baoesastrā Djawa*, sebuah kamus bahasa Jawa yang disusun Poerwadarminta (1939), yang selama ini sering menjadi rujukan utama suatu pembahasan yang berkaitan dengan

terminologi berbahasa Jawa, tercantum kata *pendhalungan* dengan penjelasan sebagai berikut.

pendhalungan

: kn. ak. *gunêman ora karuhan unggah-ungguhe*.

Dalam kamus yang disusun Poerwadarminta tersebut, kosakata *pendhalungan* digolongkan sebagai kata yang “kn” (kromongoko; berdasarkan levelnya) dan “ak” (*arang kanggone*; jarang dipergunakan). Perlu “digarisbawahi” bahwa hampir semua kamus tersebut, kecuali yang disusun Poerwadarminta, tidak memiliki entri beserta penjelasan yang memadai mengenai kata *pandhalungan*, *pandalungan*, *pendhalungan*, *pendalungan*, *padalungan*, ataupun *pedalungan*. Yang bisa ditemukan adalah penjelasan mengenai *dhalung/dalung*. Sementara itu, kata *mendhalungan* muncul dalam *Serat Centhini*. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa kata *pendalungan* merupakan kosakata yang secara khas muncul berdasarkan pengucapan orang-orang di wilayah Tapal Kuda. Masyarakat Jawa Tengah atau Jawa Mataraman tidak mengenal kata tersebut dalam penggunaan sehari-hari. Yang mereka kenal adalah kata *dhalung*, *mendhalungan*, *gendhalungan*, atau *bendhalungan*.

C. Mêndhalungan dalam Serat Centhini

Kata *mêndhalungan* telah tercantum dalam *Serat Centhini*, tepatnya pada jilid ke-6, halaman 92, pupuh ke-85.⁴

*Pamurunge pan télung prékawis
dhingin wani wanuh asèmbrana
tan mituhu ing wékase
ambadalakén wuwus
asring-asring anyémpaluki
basane mêndhalungan
diksura dhahulu
nganggo atine priyangga*

4 Sumber yang penulis rujuk adalah *Pustaka Centhini: Ikhtisar Seluruh Isinya* oleh Adisasmita (1979).

*kang mangkono tan winahyu bangsa inggil
andhap sêsaminira*

Berikutnya kata *mêndhalungan* digunakan lagi dalam jilid ke-9 halaman 292, pupuh ke-19.

*Jayèngraga gumujèng jro galih
ngunandika e lah iki beka
anukup wong turu ijèn
têmbose dene aku
mêndhalungan tan wasis ing ling
kêburu karêpira
layak durung tau
linge gêrok pêgat-pêgat*

Pada kedua pupuh tersebut kata *mêndhalungan* memiliki arti sebagaimana yang dijabarkan dalam sejumlah kamus bahasa Jawa, yakni berkaitan dengan seseorang yang dianggap “tidak cakap berbahasa Jawa dengan baik, tanpa mengenal tata krama,” dan hal seperti itu dianggap sebagai “tidak tergolong priayi, melainkan masuk golongan masyarakat rendah.”

Serat Centhini ini harus kita posisikan sebagai sumber penting untuk memperoleh gambaran sekaligus pemahaman yang lebih memadai mengenai penggunaan kata *mêndhalungan* secara praktis. Buku ini adalah salah satu karya besar dari khazanah kesusastraan Jawa. *Serat Centhini* ditulis dalam bahasa dan tulisan Jawa serta berbentuk tembang macapat. Tembang khas Jawa ini terdiri atas beberapa jenis lagu yang memiliki irama, jumlah suku kata, serta akhir kata tertentu pada setiap baris dan baitnya. Setiap tembang menghasilkan efek suasana tersendiri yang ingin ditimbulkan. *Serat Centhini* selesai ditulis pada tahun 1814 dengan judul asli *Serat Suluk Tambangrasas*. Pemrakarsa proyek penulisan serat ini adalah KGPA Anom Amengkunagoro III, putra Pakubuwono IV (raja Surakarta yang memerintah pada tahun 1788–1820). Selanjutnya, KGPA Anom Amengkunagoro III menggantikan ayahandanya sebagai raja dengan gelar Pakubuwono V (memerintah pada tahun 1820–1823). Tim

penyusun *Serat Centhini* terdiri atas beberapa orang, di antaranya adalah Ki Ng. Ranggasutrasna dan R. Ng. Yasadipura II. Keduanya adalah pujangga kerajaan.

Serat Centhini lengkapnya terdiri atas 12 jilid dan berjumlah lebih dari 3.500 halaman. Buku ini sering dianggap sebagai “ensiklopedia kebudayaan Jawa” karena berisi berbagai pengetahuan, tata cara, adat istiadat, legenda, cerita, dan hal lainnya yang beredar di kalangan masyarakat Jawa pada sekitar abad ke-16–17. Isi *Serat Centhini* mencakup berbagai sisi kebudayaan Jawa.

Pokok ceritanya adalah kisah pelarian dua orang putra dan seorang putri Sunan Giri III (Giri Parapen) ketika ditaklukkan oleh Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1636. Putra pertama bernama Jayengresmi yang diiringi oleh dua santri, yaitu Gathak dan Gathuk. Dia berpisah dengan kedua adiknya—Jayengsari dan Niken Rancangkapti—diiringi oleh santri Buras. Kisah pelarian inilah yang direkam, terutama ketika sang tokoh menemukan banyak peristiwa serta berjumpa dengan berbagai tokoh di seluruh Jawa yang menceritakan berbagai cerita, legenda, adat istiadat, dan pelbagai ilmu. Buku ini juga dilengkapi dengan kisah perjalanan Mas Cebolang. Ia adalah seorang santri yang nantinya akan menjadi suami Niken Rancangkapti dan berganti nama menjadi Syech Agunrimang. Kisah perjalanan para tokoh cerita ini adalah dalam rangka mencari kesempurnaan hidup sebagai orang Islam.

Serat Centhini terus-menerus dikutip dan dipelajari, baik oleh para peneliti Indonesia maupun asing. Buku ini dipuji oleh Denys Lombard sebagai salah satu karya agung kesusastraan dunia yang terlahir di Jawa. Elizabeth D. Inandiak melakukan penulisan kembali *Serat Centhini* dalam bentuk prosa liris dalam bahasa Prancis pada tahun 2002 yang diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2008.

D. Pendalungan, Definisi Masyarakat

Di beberapa tempat di Jawa Tengah dan kawasan Mataraman, Jawa Timur, masyarakat sering menggunakan kata *mendalungan* untuk menyebut jenis bebek pedaging hibrida hasil kawin silang. Jika bebek sawah (lokal) betina dikawinkan dengan bebek persia jantan, hasilnya adalah bebek tiktok. Jika bebek sawah (lokal) jantan dikawinkan dengan bebek persia betina, hasilnya bebek mendalungan.

Kata *mendalungan* juga digunakan untuk menyebut salah satu jenis dalang wayang kulit berdasarkan karakter pribadi serta fungsi sosial yang diembannya. Menurut Safari (2010), terdapat sepuluh jenis dalang wayang kulit. Salah satunya adalah *dalang mendalungan*. Definisi dalang mendalungan adalah *asal laris ditanggap akeh rabine ora ngurus panjak* (yang penting laris, banyak penanggap, suka kawin, tidak suka mengurus para pemusiknya).

Padmodiwirio (2011, 124) dalam sebuah memoar yang ditulisnya juga menggunakan kata *mendalungan* secara spesifik, yakni ketika bercerita tentang seorang kawannya yang berasal dari Jawa Timur “Soegiarto tertawa bebas, lalu memaki-maki (ia seorang *mendalungan Besoeki Jatim*).” Kutipan dialog dari memoar tersebut menegaskan bahwa yang patut mendapatkan sebutan *mendalungan* adalah orang Jawa Timur bagian timur (Besoeki) dan mereka menunjukkan sifat ekstrover (tertawa bebas dan memaki-maki).⁵

Bagong Pujiono (dalam Hadi, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep dan Penerapan Mendhalungan dalam Pertunjukan Wayang Golek Kebumen” menjelaskan konsep *mendhalungan* sebagai suatu kreasi campur dalam tokoh pewayangan wayang golek di Kebumen. *Mendhalungan* merupakan ekspresi totalitas dalang dalam pertunjukan wayang golek Kebumen yang di dalamnya terdapat unsur (1) *pilah, pilih, dan polah* serta (2) *gathuk, runtut, jebles, manjing, dan cicut* sebagai elemen estetikanya. Pertama, konsep *mendhalungan*, dalam pengertian ini, terletak pada unsur *catur* (bertutur). Dengan

⁵ Raden Suhario Padmodiwirio bin Raden Kusnendar Padmodiwirio atau kerap disapa Hario Kecik adalah seorang veteran pejuang dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal dengan jabatan Pangdam IX Mulawarman.

kemampuan dalam mempraktikkan *catur*, seorang dalang akan mampu melukiskan kejadian pada adegan dan sosok karakter tokoh wayang yang dimainkannya. Hal ini akan memunculkan kesan “hidup” dalam alam riil penonton. Artinya, kemampuan *catur* dalang mampu menghadirkan realitas kejadian dalam imajinasi penikmat wayang. Ketiga unsur tersebut menjadi luluh dalam satu kesatuan yang utuh dalam pertunjukan wayang golek Kebumen yang berkualitas dan menarik bagi penonton. Kedua, *mendhalungan* sebagai sebuah konsep estetika *garap catur* yang dalam penerapannya memiliki unsur-unsur *pilah*, *pilih*, dan *polah*. *Pilah* adalah kemampuan seorang dalang dalam membedakan karakter tokoh wayang. *Pilih* adalah kemampuan dalang dalam memilih dan menentukan kosakata sesuai dengan bahasa pedalangan yang disajikan ke dalam *janturan*, *kocapan*, dan *ginem*. Adapun *polah* adalah kemampuan seorang dalang dalam mengekspresikan *pilah* dan *pilih* dalam *pakeliran* sehingga melahirkan suatu sajian pertunjukan wayang golek Kebumen yang berkualitas.

Berdasarkan penelitiannya di Alas Niser, Probolinggo, Konstantinos Retsikas (dalam Prasisko, 2016 dan Hadi, 2016) menemukan bahwa kata *pedalungan* berasal atau terbentuk dari rangkaian kata *medal* (bahasa Jawa kromo, yang berarti ‘keluar’, ‘pergi’, ‘merantau’ atau ‘meninggalkan’) dan *lunga* (bahasa Jawa ngoko, yang berarti ‘berangkat’, ‘pergi’ atau ‘keluar’). Istilah tersebut diperuntukkan bagi orang asli Madura yang tinggal dan menetap di luar Pulau Madura, khususnya di Jawa bagian timur. Sebutan ini disematkan oleh orang Jawa yang tinggal di Surabaya dan Yogyakarta.

Penulis menganggap penjabaran Retsikas mengenai kata *pedalungan* tersebut cukup problematik. Istilah itu sangat ganjil jika diucapkan oleh orang Jawa dengan cara menggabungkan dua kata yang berasal dari tataran bahasa atau *level of speech* yang berbeda. Penggabungan dua kata *medal* (dari level kromo/tinggi) dan *lunga* (dari level ngoko/rendah) adalah tidak masuk akal. Jika orang Jawa menggabungkan kedua kata tersebut, hasilnya adalah *medalkesah* (*medasah*) atau *metulunga* (*metulung*). Jadi, *pedalungan* yang berasal dari *medal* dan *lunga* ini hanyalah hasil kerja *othak-athik gathuk* atau

mencari-cari arti yang pas dengan cara menghubung-hubungkan sesuatu agar tampak sesuai.

Dalam penggunaan bahasa Jawa, ada tradisi *kerata basa* atau *jarwa dhosok*, yakni upaya memahami makna suatu kata berdasarkan asal-usul (suku) kata atau penjabaran (*jarwa*) secara singkat (*dhosok*). Misalnya, kata *dhalang* memiliki arti ‘*ngudhal piwulang*’ (menjabarkan ajaran). *Selasa* berarti ‘*selas-selane mangsa*’ (waktu yang paling kosong). *Desember* berarti ‘*gedhe-gedhene sumber*’ (sumber air paling besar). *Guru* berarti seseorang yang harus ‘*digugu lan ditiru*’ (dipercaya dan dicontoh).

Yuswadi (2005) mendefinisikan kata *pendalungan* sebagai (1) sebuah percampuran antara budaya Jawa dan Madura dan (2) masyarakat Madura yang lahir di wilayah Jawa dan beradaptasi dengan budaya Jawa. Sementara itu, sebagian masyarakat secara sederhana mengartikan *orang Pendalungan* sebagai *hasil perkawinan antarsuku/ras*. Cuplikan yang diambil dari hasil penelitian Kusnadi (dalam Raharjo, 2006) berikut ini dapat memperjelas hal tersebut.

Pak Mangun (51 tahun) adalah warga Desa Tegal Boto, Jember. Dia dilahirkan di Panaongan, Sumenep Utara, Madura. Ketika bermigrasi dan bekerja di Jember, dia menikah dengan seorang perempuan Tegal Boto yang disebutnya sebagai orang Jawa. Ketika Kusnadi bertanya tentang siapa saja yang bisa disebut sebagai orang Pendalungan, Pak Mangun menjawab, “Saya ini kan orang Madura. Istri saya orang Jawa. Dari perkawinan tersebut saya dikaruniai dua anak perempuan. Nah, dua anak saya itu yang bisa disebut sebagai orang Pendalungan.” Senada dengan hal tersebut, Pak Komari (57 tahun), seorang nelayan yang tinggal di kampung Payangan, Watu Ulo, kepada penulis mengaku bahwa dirinya merupakan orang Pendalungan karena ayahnya beretnis Jawa dan ibunya beretnis Madura. (Wawancara pribadi, 1 September 2019)

Pak Mahawan (46 tahun), mantan wartawan dan karyawan pabrik gula di Jember, memiliki pemahaman yang sama dengan Pak Mangun dan Pak Komari bahwa orang Pendalungan adalah

seseorang yang lahir dari perkawinan antara orang Jawa dan orang Madura. (Wawancara pribadi, 21 November 2020)

Adapun Mbah H. Husni (98 tahun), sesepuh para nelayan di kampung Payangan, beranggapan bahwa orang Pendalungan tidak harus keturunan Jawa-Madura. “Ayah saya asli orang Mandar, ibu saya orang Sumenep, Madura, dan saya ini adalah orang Pendalungan,” ujar Mbah Husni. (Wawancara pribadi, 1 September 2019)

Sementara itu, Pak Joko Tri (52 tahun), seorang guru SMP di Jember, memiliki pengertian yang agak berbeda. Menurutnya, orang Pendalungan adalah seseorang yang lahir dari perkawinan campuran antara orang Jawa atau Madura dengan orang Eropa, misalnya orang Belanda, Inggris, atau Portugis. (Wawancara pribadi, 21 November 2020)

Uraian yang disampaikan berdasarkan wawancara tersebut memperlihatkan bahwa pemaknaan istilah *pendalungan* di kalangan masyarakat cukup bervariasi. Namun, ada suatu kesamaan dalam berbagai pendapat yang berbeda tersebut (kecuali pendapat Retsikas), yakni anggapan atau pemahaman tentang orang Pendalungan sebagai suatu produk percampuran etnis.

E. Pendalungan, Sebuah Perspektif

Boas (1989), seorang pencetus pemikiran antropologi modern, menyatakan bahwa apabila kita benar-benar bermaksud memahami pemikiran manusia, seluruh analisis pengalaman harus berdasarkan pada konsep mereka, bukan berdasarkan konsep kita.

Dalam kaitannya dengan penentuan kata mana yang lebih tepat untuk digunakan, apakah kata *pedalungan*, *pendalungan*, *pendhalungan*, *pandalungan*, ataukah *pandhalungan*, penulis menganggap bahwa adanya perbedaan dalam penggunaan kata tersebut adalah wajar dan biasa. Hal semacam ini sering terjadi pada masyarakat yang berbasis kelisanan. Meskipun demikian, dalam persepsi penulis—merujuk pada gagasan Franz Boas—kata *pendalungan* adalah yang

lebih tepat untuk digunakan. Kata *pendalungan* memiliki kesamaan secara lisan ataupun tulisan. Sejak dulu masyarakat di wilayah Tapal Kuda, mulai dari Pasuruan hingga Banyuwangi, menggunakan kata tersebut setidaknya secara lisan. Berdasarkan perspektif emik (*native's point of view*), apabila ingin memahami suatu masyarakat, kita harus menggunakan sudut pandang masyarakat tersebut. Hal ini berbeda dengan pendekatan etik (*scientist's point of view*) yang menganalisis suatu gejala sosial berdasarkan pandangan pihak lain di luar masyarakat yang dianalisis. Studi emik di bidang kebudayaan lebih komprehensif dalam menjelaskan fenomena sosiokultural suatu masyarakat. Studi ini menggunakan asumsi bahwa pelaku atau aktor suatu tindakan lebih tahu tentang proses-proses yang terjadi dalam dirinya daripada orang lain. Selain itu, pengetahuan mengenai proses mental tersebut diperlukan dalam rangka memahami alasan mengapa seseorang atau suatu masyarakat melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Pelto, 1970; Foster & Anderson, 1978; Harris, 1988).

Dikotomi emik-etik dalam antropologi diperkenalkan oleh Marvin Harris (1988). Mula-mula seorang ahli bahasa, Kenneth Lee Pike, membangun istilah emik dan etik berdasarkan perbedaan dalam linguistik antara fonetik dan fonemik. Keduanya merujuk pada keterkaitan secara objektif antara *bunyi* di satu pihak dan *makna suatu bunyi* di pihak lain. Dalam pengertian sederhana, emik mengacu pada pandangan warga masyarakat yang dikaji, sedangkan etik mengacu pada pandangan si peneliti.

Pengucapan suku kata *da* dalam kata *pendalungan* sama dengan *da* dalam kata *pendakian* atau *pendahuluan* dalam bahasa Indonesia. Dalam ejaan bahasa Jawa suku kata dengan bunyi seperti itu ditulis dengan *dha*, sedangkan dalam bahasa Indonesia cukup dengan *da*. Dengan demikian, penggunaan kata *pendalungan* adalah perspektif masyarakat Tapal Kuda sekaligus sesuai dengan kaidah tulis bahasa Indonesia. Jika kita menggunakan kata *pendhalungan* atau *pandhalungan*, kaidah yang digunakan adalah kaidah bahasa Jawa/Madura dan hal itu terkesan Jawa/Madura-sentrism.

Demikian penjabaran ringkas atas pemilihan kata *pendalungan* dalam penulisan buku ini. Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa pemilihan kata *pendalungan* ini tidak penulis maksudkan sebagai bentuk penegasian penggunaan (khususnya secara tertulis) kata *pandhalungan* dan lain-lain. Dalam konteks tertentu, seseorang bisa menggunakan suatu istilah sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun ditulis dan diucapkan secara berbeda, nama/kata *Jawa*, *Jowo*, atau *Java* merujuk pada substansi yang sama. Perbedaan itu terletak pada konteks penggunaan, bukan makna.



Bab 3

Mengenal Orang Pendalungan

A. Rumpun Budaya

Pemahaman terhadap wilayah Tapal Kuda dan pada kebudayaan Pendalungan adalah suatu proses *imagined community* sebagaimana pernah digagas Anderson (2008). Kita tidak pernah tahu apa, siapa, dan bagaimana sesungguhnya masa lalu kawasan Tapal Kuda. Kita hanya bisa sebatas menduga-duga, berspekulasi, berimajinasi berdasarkan aneka referensi yang dapat kita percaya kebenarannya.

Siapakah penduduk asli Tapal Kuda? Tidak ada penjelasan yang benar-benar mampu memberi gambaran menyeluruh mengenai hal itu. Namun, keberadaan situs-situs kuno yang tersebar dari daerah Bondowoso hingga Jember membuktikan bahwa di kawasan ini telah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Kemungkinan mereka itulah yang menjadi *indigenous people* di kawasan Tapal Kuda yang pada era selanjutnya mengembangkan kebudayaan dan menyatu dengan para pendatang.

Kita mengenal suatu etnik karena kebudayaannya. Menurut Naroll et al. (1964), umumnya kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang secara biologis

- 1) mampu berkembang biak dan bertahan;
- 2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya;
- 3) membentuk jaringan interaksi dan komunikasi sendiri;
- 4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain yang dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Begitulah masyarakat Pendalungan dikenal oleh pihak lain, terutama karena kekhasan kebudayaannya. Orang Jawa yang berasal dari wilayah *kulonan* (Mataraman dan Panaragan), misalnya, memahami orang Pendalungan dengan pandangan stereotipe sederhana, yakni sekelompok masyarakat Jawa Timur yang berada di bagian timur *yang berbicara/berkata dengan tiada tentu adab/sopan-santunnya*. Tolok-ukur utama yang mereka pergunakan dalam mendefinisikan masyarakat Pendalungan hanya tunggal atau melalui satu sisi pandangan, yakni cara berbahasa. Mereka tidak melihat bagaimana sepak terjang orang Pendalungan secara umum, misalnya dalam berkesenian, berpolitik, bercocok tanam, mengembangkan sisi religiositas, dan memajukan dunia pendidikan. Hal itu bisa dimaklumi karena cara termudah untuk membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya adalah dengan memperhatikan bahasanya. Sekelompok masyarakat akan dianggap berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya jika bahasa yang mereka gunakan berbeda. Bagi setiap etnis, bahasa telah menjadi simbol utama eksistensi etnisitasnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa adalah kulit terluar kebudayaan.

Inti suatu kebudayaan adalah nilai-nilai yang disepakati masyarakat pendukungnya sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari mereka. Tindakan tertentu akan dianggap sebagai cerminan kebudayaan suatu masyarakat jika secara moral tindakan tersebut dapat diterima dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati. Oleh karena itu, ini tidak mengherankan jika kemudian kebudayaan suatu masyarakat di suatu area memiliki perbedaan dengan masyarakat di area lainnya. Untuk mempermudah pelaksanaan studi sosiokultural, tempat keberadaan suatu masyarakat

dengan kebudayaan yang berbeda dari lainnya itu disebut sebagai “wilayah kebudayaan”. Dengan pemetaan wilayah kebudayaan semacam itulah Hatley (1984) memperlihatkan bagaimana keragaman peradaban Jawa tampak pada pola bahasa, makanan, pakaian, dan sebagainya.

Secara teoretis, sosiolog Hatley dari Australia, dalam penelitiannya yang berjudul “Mapping Cultural Regions of Java” (1984), membagi Provinsi Jawa Timur menjadi enam wilayah kebudayaan, yaitu

- 1) Arek,
- 2) Tengger,
- 3) Madura,
- 4) Mataraman,
- 5) Pendalungan, dan
- 6) Using.

Sementara itu, penelitian Sutarto dan Sudikan (2004) membagi Jawa Timur menjadi sepuluh wilayah kebudayaan, yaitu

- 1) Jawa Mataraman,
- 2) Jawa Panaragan,
- 3) Arek,
- 4) Samin (Sedulur Sikep),
- 5) Tengger,
- 6) Osing (Using),
- 7) Pendalungan,
- 8) Madura Pulau,
- 9) Madura Bawean, dan
- 10) Madura Kangean.

Pembagian wilayah kebudayaan Jawa Timur tersebut berbeda dengan yang dilakukan Koentjaraningrat (1994), yang meliputi

- 1) Pesisir Wetan,
- 2) Mancanegari,
- 3) Madura,
- 4) Surabaya,

- 5) Tanahsabrang Wetan, dan
- 6) Blambangan.

Daerah Mancanegari berarti ‘daerah luar’ karena merupakan daerah pinggiran dari kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Jawa Mataram pada abad ke-17 hingga ke-19. Daerah Mancanegari meliputi Madiun, Kediri, dan daerah delta Sungai Brantas yang sekarang kita sebut sebagai daerah kebudayaan Mataraman. Adapun sebutan Tanahsabrang Wetan ditujukan pada daerah yang sekarang kita sebut sebagai daerah Pendalungan.

Persebaran masyarakat Jawa Mataraman meliputi daerah

- 1) Ngawi,
- 2) Madiun,
- 3) Pacitan,
- 4) Magetan,
- 5) Kediri,
- 6) Nganjuk,
- 7) Blitar,
- 8) Tulungagung,
- 9) Trenggalek,
- 10) Tuban, dan
- 11) Bojonegoro.

Sementara itu, persebaran masyarakat Jawa Panaragan hanya terbatas di Kabupaten Ponorogo. Adapun masyarakat Arek tersebar di wilayah yang terbentang mulai dari Kabupaten Lamongan di sebelah utara hingga ke Kabupaten Malang dan Batu di selatan. Kemudian, melintasi daerah Gresik, Kota Surabaya, Mojokerto, dan Sidoarjo. Di sisi lain, masyarakat Samin berada di seputar daerah Tuban dan Bojonegoro serta berbatasan dengan Cepu dan Blora di Jawa Tengah. Masyarakat Tengger hidup di sekitar Pegunungan Tengger dan tersebar di Kecamatan Tosari, Puspo (Kabupaten Pasuruan), Kecamatan Ngadisari, Sukapura (Kabupaten Probolinggo), dan beberapa desa di Kabupaten Malang serta Kabupaten Lumajang. Masyarakat Using

tinggal di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Madura tinggal di Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya.

Sementara itu, masyarakat Pendalungan tersebar secara luas di

- 1) Kabupaten/Kota Pasuruan,
- 2) Probolinggo,
- 3) Situbondo,
- 4) Bondowoso,
- 5) Lumajang,
- 6) Jember, dan
- 7) Banyuwangi.

Wilayah tempat persebaran masyarakat Pendalungan ini juga sering disebut sebagai daerah Tapal Kuda karena jika diamati dari atas peta, secara sekilas bentuknya menyerupai ladam atau sepatu kuda. Untuk memudahkan proses identifikasi dan pembahasan, penulis menyebut keseluruhan daerah dan masyarakat Pendalungan di wilayah Tapal Kuda ini secara spesifik dengan sebutan “Pendalungan Raya”. Jika wilayah Tapal Kuda juga mencakup wilayah budaya Tengger dan Using, sebutan Pendalungan Raya dimaksudkan sebagai wilayah yang dihuni masyarakat Pendalungan.

Sutarto (2006) menganggap bahwa secara administratif kawasan kebudayaan Pendalungan meliputi

- 1) Kabupaten dan Kota Pasuruan,
- 2) Kabupaten dan Kota Probolinggo,
- 3) Kabupaten Situbondo,
- 4) Kabupaten Bondowoso,
- 5) Kabupaten Jember, dan
- 6) Kabupaten Lumajang.

Namun, penulis perlu menambahkan bahwa berdasarkan pertimbangan sosiokultural, sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi harus dimasukkan ke dalam kawasan budaya Pendalungan. Jadi, tidak seperti pendapat Sutarto tersebut, penulis beranggapan bahwa tidak semua wilayah Kabupaten Banyuwangi

dapat diklaim sebagai kawasan budaya Using. Justru sebagian besar wilayah Banyuwangi tercakup dalam wilayah budaya Pendalungan dengan komposisi utama penghuninya ialah masyarakat Jawa dan Madura.

Di dalam penelitiannya, Hatley (1984) menempatkan Tapal Kuda secara antropologi ke dalam wilayah kebudayaan Pendalungan. Dia mencatat bahwa di kawasan Tapal Kuda, yang merupakan “negeri kedua” orang Madura, berdiam masyarakat Madura dalam jumlah cukup besar meskipun secara kultural dan historis tetap harus dibedakan identitas budayanya dengan orang Madura di Pulau Madura. Bagi Hatley, kawasan Tapal Kuda merupakan tempat bertemunya masyarakat dan kebudayaan Jawa-Madura yang kemudian membentuk suatu kebudayaan yang unik.

Jika dibanding dengan wilayah-wilayah kebudayaan lain di Jawa Timur, selama ini wilayah kebudayaan Pendalungan mendapat perhatian yang relatif sedikit dalam kajian-kajian akademis. Kemungkinan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Pendalungan dengan seluruh aspek yang melingkupinya merupakan entitas yang—if dipertimbangkan secara akademis—belum stabil dan belum menemukan wujudnya yang konkret, padahal wilayah ini cukup lantang berbicara selama ini, baik dalam kancah politik regional maupun nasional. Daerah Tapal Kuda adalah daerah yang dikenal cukup *panas* dan responsif dalam menghadapi berbagai momentum politik.

Sebagaimana telah dicatat oleh Raharjo (2006), wilayah Tapal Kuda sering dianggap sebagai wilayah yang rawan konflik. Beberapa peristiwa yang dapat dijadikan sebagai pemberar atas justifikasi tersebut, antara lain, seperti berikut.

- 1) Peristiwa Jenggawah: suatu konflik antara petani dan pihak PTPN X di Jember.
- 2) Aksi pembakaran gereja di Situbondo pada tahun 1995.
- 3) Kasus perebutan tanah antara penduduk dan militer di Sukorejo, Jember.
- 4) Aksi pembantaian isu ninja pada tahun 1998.

- 5) Aksi masyarakat ketika Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan pada tahun 2002.

Namun, sejauh yang penulis perhatikan, apa yang sebenarnya terjadi di wilayah Tapal Kuda sampai jatuhnya rezim Orde Baru secara umum tidak pernah mencapai titik kulminasi yang bisa dianggap sungguh-sungguh *membahayakan* keamanan dan stabilitas politik nasional. Di wilayah ini tidak pernah ada kerusuhan sosial dan perlawanan yang cukup berarti terhadap pemerintah. Kalaupun terjadi, skalanya cukup kecil dan cepat teratasi.

Hal ini penting untuk dicatat bahwa peran para kiai tetap besar dan dianggap penting di wilayah Tapal Kuda, khususnya sebagai perantara yang menjembatani warga dengan pihak penguasa, terutama jika muncul gejala konflik atau ketidaksepahaman di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pada masa-masa kampanye pemilu, dalam kaitannya dengan pilpres atau pilkada, para kiai berubah menjadi selebritas dadakan yang diperebutkan oleh parpol. Pondok-pondok pesantren besar selalu menjadi *jujugan* para pejabat (atau para calon pejabat) sebagai pelambangan kedekatan para (calon) pejabat tersebut dengan masyarakat muslim.

B. Masyarakat Pendalungan

Meskipun secara sepintas berbagai elemen kebudayaan Pendalungan dan kebudayaan-kebudayaan lain di sekitarnya terdapat banyak kesamaan, hal itu tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Tapal Kuda untuk tetap bangga dengan identitas Pendalungan. Dalam pandangan penulis, hal itu terjadi karena apa yang seharusnya diperkuat dan ditonjolkan oleh masyarakat bukanlah aneka perbedaan di antara mereka, melainkan berbagai keunggulan yang mereka miliki.

Sesungguhnya tidak pernah ada batas-batas resmi dan permanen yang bisa menandai lokasi persebaran masyarakat Pendalungan di daerah Tapal Kuda. Apa yang oleh Sutarto (2006) disebut sebagai pembagian wilayah kebudayaan secara administratif itu sesungguhnya hanyalah suatu teknis untuk mempermudah proses identifikasi. Pada

periode kolonial Hindia Belanda, daerah ujung timur Jawa ini juga disebut *Oosthoek*. Divisi teritorial Kerajaan Mataram menyebut daerah ini *Bang Wetan* (menunjuk pada beberapa daerah di sebelah timur Surabaya). Wilayah-wilayah tersebut kemudian dikategorikan sebagai *Pesisir Wetan* (Pesisir Timur), sebuah wilayah yang para penguasanya diwajibkan membayar upeti dan melakukan kerja wajib untuk kerajaan Mataram (Winarni, 2012).

Wilayah Pendalungan adalah daerah pertanian yang didominasi oleh tanaman keras, seperti karet, kakao, kopi, teh, dan kelapa. Tidak semua tanah di wilayah ini berupa lahan subur seperti yang terdapat di wilayah Mataraman dan Arek. Meskipun beberapa sungai mengalir melintasi daerah ini, iklim di daerah Pendalungan terasa lebih kering sehingga akses masyarakat terhadap air tidak sebanyak di Mataraman dan Arek. Bagian utara wilayah Pendalungan lebih kering daripada yang di selatan. Jika dibanding dengan kawasan-kawasan budaya lainnya di Jawa Timur, kawasan ini terdapat lebih banyak keluarga miskin (Purwandaya, 2011).

Pergaulan yang intens dan berlangsung dalam waktu relatif lama antara masyarakat Jawa dan Madura menjadi sebab utama berkembangnya budaya Pendalungan. Oleh karena itu, asal mula terbentuknya masyarakat Pendalungan dapat ditelusuri dan dilacak berdasarkan proses terjadinya pergaulan di antara kedua etnis tersebut. Penulis memperkirakan sebutan *Pendalungan* (atau semula *Mendalungan*) bagi masyarakat di kawasan Tapal Kuda itu mula-mula diberikan oleh orang-orang Jawa (Demak dan Mataram). Mereka sehari-hari telah biasa menggunakan istilah tersebut pada abad ke-16 ketika mulai intens mengadakan pergerakan ke arah Blambangan. Jadi, sebutan Pendalungan bukan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 sebagaimana diperkirakan beberapa peneliti, melainkan jauh lebih awal dari itu.

Setelah era kejayaan Majapahit berakhir, wilayah Jawa Timur bagian timur, yakni Blambangan, menjadi kerajaan yang berdiri sendiri, berdaulat, dan selanjutnya menjadi incaran perebutan berbagai pihak. Dalam kurun waktu dua abad (1546–1764) Blambangan menjadi

rebutan antara Kerajaan Demak dan Mataram di Jawa Tengah serta kerajaan-kerajaan di Bali. Kedua pihak yang secara politis berbeda tersebut, yaitu kerajaan Islam (Demak dan Mataram) di sebelah barat dan sejumlah kerajaan bercorak Hindu di sebelah timur Bali (Gelgel, Buleleng, dan Mengwi) secara bersamaan memperebutkan wilayah Blambangan untuk mendukung ambisi politik dan agama mereka masing-masing.

Demak mengirimkan ekspedisi militer ke Blambangan pada tahun 1546. Ekspedisi Sultan Demak ke Blambangan tersebut bekerja sama dengan Pasuruan dan akhirnya berhasil mengepung Panarukan sehingga Blambangan pun jatuh pada tahun itu. Selanjutnya, pada tahun 1639 Sultan Agung menggempur Blambangan dengan kekuatan besar dan berhasil melumpuhkannya. Ekspedisi militer Mataram ke Blambangan dilakukan dua kali lagi pada tahun 1648 dan 1665 sehingga memaksa Blambangan memindahkan ibu kotanya secara berturut-turut ke Bayu dan selanjutnya ke Macanputih (Sudjana, 2001; Margana, 2007; Winarni, 2012).

Masyarakat Jawa pada era Kerajaan Mataram telah mencapai kemapanan budaya sehingga konsep budaya Jawa dapat dideskripsikan dengan jelas. Sebaliknya, masyarakat Pendalungan adalah masyarakat pinggiran yang tidak pernah secara sungguh-sungguh mendapatkan sentuhan kultur keraton yang feodalistik dan *terpelajar*. Dengan demikian, cukup wajar jika kemudian kebudayaan masyarakat Pendalungan berkembang sesuai dengan ekologinya sendiri. Masyarakat menjadi lebih terbuka, moderat, dan demokratis. Namun, pada tahap berikutnya, selama beberapa abad, terdapat juga sentuhan kultur feodalistik-birokratis model perkebunan yang dihasilkan dari perilaku orang-orang Belanda yang menjadi penguasa perkebunan. Hal ini kemudian diadopsi oleh para bawahannya yang terdiri atas orang-orang pribumi. Menjelang masa kemerdekaan, identitas Pendalungan berproses lagi secara meyakinkan menjadi bagian integral bangsa Indonesia. Berbagai perlawanan yang dilakukan tentara Indonesia terhadap pemerintah Kolonial Belanda, dengan dukungan masyarakat Tapal Kuda, menjadi penanda dinamika identitas kultural Pendalungan.

Secara umum karakter masyarakat Pendalungan adalah terbuka dan mau menerima perbedaan, religius, lugas, egaliter, temperamental, serta suka bekerja keras. Selain itu, mereka memiliki solidaritas tinggi meskipun pada akhirnya solidaritas yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pendalungan lebih bersifat pragmatis daripada kultural. Sifat-sifat positif yang telah disebutkan tadi jika tidak dibina secara cepat, tepat, dan terarah pada akhirnya juga tidak akan mampu beroperasi secara efektif dalam mengusung konsensus kultural Pendalungan.

Oleh karena perkembangan teknologi komunikasi modern yang demikian dahsyat, dengan daya jangkau yang begitu mendasar terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, entitas kebudayaan yang berkembang di wilayah Pendalungan tidak lagi hanya diwarnai budaya Jawa, Madura, dan sejumlah etnis minoritas lainnya, tetapi juga telah menyusup ke dalamnya nilai-nilai nasional dan internasional. Nilai-nilai tersebut terutama masuk melalui media massa dengan intensitas yang nyaris tak terukur.

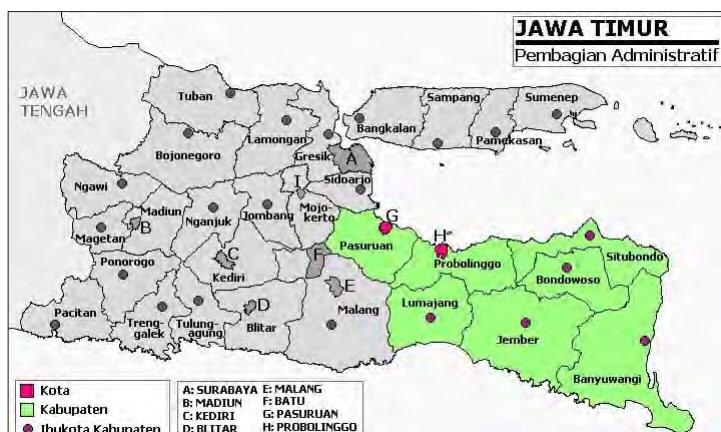
Jika dibanding dengan masyarakat Jawa Mataraman, Madura, dan Using yang memiliki akar kebudayaan yang menancap lebih dalam—setidaknya dalam aspek akar historis—masyarakat Pendalungan memiliki memori kolektif yang secara kualitatif dan kuantitatif lebih rendah. Untuk memiliki memori kolektif yang kokoh dan dalam, suatu masyarakat harus membangunnya dalam jangka waktu lama, bahkan terkadang butuh waktu turun-temurun. Dalam tata pergaulan sosiokultural, masyarakat Pendalungan tampaknya masih belum merasa berkepentingan terhadap keberadaan memori kolektif yang kokoh tersebut. Akibatnya, dasar-dasar kepercayaan bersama terhadap nilai-nilai yang harus dijunjung, dihormati, dan ditaati seluruh warga masyarakat lebih sulit dibangun pada masyarakat Pendalungan.

Masyarakat Pendalungan juga memiliki pandangan yang lebih simpel terhadap tradisi, yakni sebagai sesuatu yang dinilai kurang penting, tidak perlu mendapat prioritas tinggi, dan bahkan dalam beberapa hal dianggap kuno. Secara sepintas hal ini akan memperlihatkan bahwa masyarakat Pendalungan tidak memiliki

karya budaya yang bernilai. Memang inilah, antara lain, kelemahan mendasar yang melekat pada masyarakat Pendalungan serta masyarakat campuran pada umumnya. Namun, sesungguhnya hal itu juga bisa dinetralkan dan dikelola untuk dijadikan sebagai sesuatu yang menguntungkan, yakni suatu kondisi psikologis masyarakat Pendalungan yang tidak memiliki beban kultural seberat para tetangganya tersebut.

C. Pendalungan Raya: Entitas yang Tidak Tunggal

Masyarakat Pendalungan secara administratif berada di sembilan kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda (Gambar 3.1). Secara kultural wilayah persebaran mereka dapat disebut sebagai Pendalungan Raya. Cakupan wilayah yang luas tersebut tidak memungkinkan bagi mereka untuk seragam dan berciri sama. Artinya, masyarakat Pendalungan adalah masyarakat yang tidak tunggal. Identitas kultural Pendalungan masing-masing kelompok di Pendalungan Raya tidak mungkin ditunggal-kan. Jadi, upaya memahami konsep Pendalungan adalah, pertama-tama, kesediaan untuk memahami ketaktungan galan tersebut.



Sumber: Dimodifikasi dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (t.t.)

Gambar 3.1 Wilayah Kebudayaan Pendalungan Raya

Identitas Pendalungan lahir dalam konteks pergulatan panjang masyarakat Jawa dan Madura—juga etnis-ethnis lain—yang secara bergelombang datang ke wilayah Tapal Kuda dalam relasinya dengan perkebunan dan para penguasa kolonial pada masa lalu. Pembentukan identitas Pendalungan tidak bersifat serta-merta, tetapi melalui tahap yang berlapis-lapis. Sungguhpun demikian, secara umum tahap-tahap tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga periode utama, yaitu (1) periode sebelum era perkebunan, (2) periode perkebunan, dan (3) periode kontemporer (pascaperkebunan). Periodisasi ini cukup penting untuk disusun guna lebih memudahkan upaya pemahaman terhadap proses pembentukan identitas masyarakat Pendalungan.

Pada periode pertama, yakni sebelum era perkebunan, masyarakat Jawa setempat berinteraksi dengan masyarakat Madura pendatang. Pola interaksi mereka kemungkinan masih bersifat sederhana dan temporer dalam hubungannya dengan transaksi perdagangan. Barulah pada periode kedua, yakni ketika mereka memasuki era perkebunan, pola baru dalam praktik sosial dan ekonomi diinternalisasi oleh kedua belah pihak karena mereka mulai dikenalkan pada teknik berkebun yang relatif modern serta tata pergaulan para pemilik kebun. Apa pun praktik kebudayaan masyarakat Pendalungan pada masa itu, rujukan utamanya adalah pemerintah lokal (yang disokong oleh pemerintah kolonial) di satu sisi serta tokoh informal agama Islam di sisi lain. Setelah melampaui era kemerdekaan, pola sosial masyarakat Pendalungan mengalami pergeseran lagi yang seirama dengan perkembangan zaman. Ada persinggungan secara intens dengan berbagai kelompok masyarakat dari wilayah kebudayaan lain di Indonesia—ditambah keadaan alam yang menjadi tempat kelompok-kelompok masyarakat Pendalungan tinggal—mendorong munculnya perbedaan di antara mereka. Memang secara umum kebudayaan Pendalungan yang terbentang mulai dari Pasuruan hingga Jember memiliki dasar yang sama. Akan tetapi, kompleksitas dan intensitas relasional antar kebudayaan tersebut berbeda kadarnya. Itulah sebabnya jika diamati secara lebih seksama, akan tampak nuansa perbedaan-perbedaan sosiokultural tersebut.

Kebudayaan manusia selalu terbentuk secara bertahap berdasarkan hubungan timbal balik yang diciptakannya dengan alam lingkungannya. Itulah sebabnya masyarakat Pendalungan di Tapal Kuda tidak akan menunjukkan keseragaman sebagaimana masyarakat monokultural karena mereka hidup di lingkungan yang tidak seragam. Masyarakat Pendalungan yang hidup di pesisir, misalnya yang berada di Situbondo, akan berbeda dengan mereka yang menetap di daerah perkebunan dan pertanian, misalnya di Jember. Lingkungan mereka itulah yang pertama-tama menstimulasi terjadinya perubahan kebudayaan dan terciptanya kebudayaan baru. Masyarakat Pendalungan yang hidup sebagai nelayan di pesisir pada umumnya bersifat keras, temperamental, dan pemberani karena terbiasa bekerja di tengah alam yang ganas dan berbahaya. Di lain pihak, masyarakat Pendalungan yang menjadi petani atau peternak di pedesaan berwatak relatif tenang dan lunak, cenderung komunal, serta memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkesenian. Sementara itu, masyarakat Pendalungan di wilayah perkotaan memiliki mentalitas dan jenis kepribadian yang lebih dinamis, berwatak materialistik, dan individual.

Secara “garis besar”, berdasarkan karakter sosiokultural masyarakatnya, wilayah kebudayaan Pendalungan saat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) Pendalungan Barat (Pasuruan dan Probolinggo), (2) Pendalungan Timur (Situbondo dan Bondowoso), dan (3) Pendalungan Selatan (Lumajang, Jember, dan Banyuwangi). Masyarakat Pendalungan Barat lebih banyak terpengaruh kebudayaan Arek. Hal ini terutama tampak pada masyarakat Pendalungan di Pasuruan. Sementara itu, masyarakat Pendalungan Timur mendapat banyak pengaruh dari kebudayaan Madura. Akan tetapi, masyarakat Pendalungan Selatan lebih banyak terpengaruh kebudayaan Mataraman serta Using.

Penjelasan tentang pengelompokan sub-Pendalungan ini sesungguhnya masih membutuhkan studi yang lebih mendalam. Pemetaan yang penulis lakukan ini masih bersifat awal dan membutuhkan dukungan data serta analisis yang lebih mendalam. Sebagaimana tampak di lapis permukaan kehidupan masyarakat,

situasi percampuran antara masyarakat berkultur Jawa dan Madura tidak bersifat merata pada semua bagian di tiap-tiap daerah, termasuk di Kabupaten Jember. Kita dapat dengan mudah menemukan beberapa desa yang kultur Jawanya tampak dominan. Sebaliknya, ada desa-desa lain yang kultur Maduranya yang dominan. Bahkan, di sejumlah titik di wilayah perkotaan dominasi kultur Jawa-Madura tidak ada lagi, tetapi sudah bergeser menjadi generasi atau masyarakat baru yang ditandai oleh penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.

D. Para Tetangga

Masyarakat di kawasan Tapal Kuda memiliki suatu karakteristik yang cukup berbeda dengan masyarakat di kawasan-kawasan kultural lainnya di Jawa Timur. Sebagaimana dijelaskan Sutarto (2006), masyarakat di wilayah ini telah lama menjadi kantong pendukung Islam kultural dan kaum abangan. Pendukung Islam kultural dimotori oleh para kiai dan ulama, khususnya dari Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan kaum abangan dimotori oleh tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh yang tergabung dalam aliran kepercayaan. Di Banyuwangi, misalnya, pengaruh agama Islam tidak sekuat di Bondowoso, Situbondo, dan Jember. Di wilayah ini kaum abangan dan aliran kepercayaan lebih berpengaruh meskipun tidak menonjol dan kasat mata. Gambaran mengenai hal itu dikuatkan oleh kondisi objektif mengenai kehidupan berkesenian di Banyuwangi yang lebih subur dan semarak. Di seluruh Indonesia, di tempat-tempat di mana agama Islam terasa mendominasi, kesenian tradisional ataupun kontemporer tidak dapat berkembang secara agresif, kecuali kesenian yang diklaim khas Islam, seperti hadrah dan *terbangan*, sebagaimana tampak pada Gambar 3.2.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 3.2 Grup Seni Hadrah dari Pondok Pesantren Al Falah, Silo, Jember

Persebaran penduduk di kawasan Tapal Kuda serta luar wilayah tiap-tiap kota/kabupaten berdasarkan angka yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Persebaran Penduduk di Tapal Kuda

Daerah	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Jiwa
Kab. Lumajang	1.790,90	1.147.261
Kab. Jember	3.092,34	2.584.771
Kab. Banyuwangi	5.782,40	1.744.814
Kab. Bondowoso	1.525,97	784.192
Kab. Situbondo	1.669,87	694.081
Kab. Probolinggo	1.696,21	1.163.859
Kab. Pasuruan	1.474,02	1.626.029
Kota Probolinggo	56,67	243.200
Kota Pasuruan	35,29	211.497
Jumlah Total	17.123,67	10.199.704

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023)

Tabel 3.1 tersebut secara umum menunjukkan jumlah beserta persebaran masyarakat Pendalungan di wilayah Tapal Kuda. Angka-angka ini juga dapat memberikan gambaran mendasar mengenai apa yang terjadi selama ini di wilayah Pendalungan. Dalam 50 tahun terakhir berbagai perubahan besar telah mengemuka, baik dalam hal jumlah penduduk maupun orientasi kebudayaan masyarakat. Perubahan-perubahan ini tentu saja dapat dikaitkan dengan transformasi ekonomi, sosial, dan politik abad ke-20 di Indonesia, seperti industrialisasi, modernisasi pertanian, pendidikan, dan perbaikan pelayanan kesehatan. Efek berantainya ialah berupa ledakan penduduk, sulitnya mencari pekerjaan, urbanisasi, dan menurunnya moralitas masyarakat.

Dalam hal kebudayaan, masyarakat Pendalungan memiliki kaitan erat dengan masyarakat lain, terutama yang berasal dari wilayah kultural Mataraman, Panaragan, Arek, Madura, dan Using. Kelima daerah kebudayaan itulah yang menjadi sumber potensial kekayaan kultural masyarakat Pendalungan.

Kawasan budaya Mataraman didominasi oleh area pertanian karena tanahnya yang subur dan terbentang di sepanjang dua sungai besar. Tanaman utamanya padi yang diolah secara tradisional. Dua sungai besar yang melintasi daerah itu adalah Bengawan Solo dan Kali Brantas. Pengembangan sistem irigasi membantu pelaksanaan produksi beras di wilayah tersebut. Keberadaan dua sungai besar itu, menurut Purwandaya (2011), membawa berkah sekaligus kutukan bagi orang-orang di daerah tersebut karena banjir besar terjadi setiap tahun akibat terus kurangnya hutan di hulu sungai. Selain merendam daerah permukiman, banjir tahunan ini juga sering merugikan para petani karena menggenangi area persawahan yang luas sehingga menyebabkan petani gagal panen.

Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Mataraman pada masa lalu menerima banyak pengaruh dari masyarakat Jawa Surakarta dan Yogyakarta karena kawasan tersebut merupakan bagian integral dari daerah kekuasaan Kesultanan Mataram. Sistem nilai budaya Mataraman merupakan sistem nilai budaya feodalistik

yang bersumber pada nilai-nilai budaya keraton yang dikembangkan secara sistematis oleh Kerajaan Mataram. Nilai-nilai budaya keraton itulah yang pada akhirnya menjadi dasar sosiokultural masyarakat Surakarta-Yogyakarta secara turun-temurun, yang selanjutnya secara perlahan, tetapi pasti merembes ke wilayah Jawa Timur bagian barat.

Masyarakat Jawa Mataraman mempunyai pola kehidupan sehari-hari sebagaimana pola kehidupan orang Jawa pada umumnya. Selera berkesenian masyarakat di daerah Mataraman sama dengan selera berkesenian masyarakat Jawa Tengah sehingga kesenian yang berkembang dan populer di daerah ini adalah kesenian khas Jawa, seperti jaranan, ketoprak, wayang kulit, wayang orang, campursari, tayub. Namun, sayang saat ini kesenian ketoprak dan wayang orang hanya tinggal puing-puingnya saja, padahal dulu keduanya merupakan kesenian yang sangat digemari masyarakat. Berbagai upacara adat Jawa yang dianggap penting hingga sekarang masih tetap diselenggarakan masyarakat Jawa Mataraman, misalnya, upacara *tingkeban* atau *mitoni* (yang dilakukan pada saat usia kehamilan tujuh bulan [hanya pada kehamilan pertama]) dan *sepasaran* (dilakukan setelah bayi berusia lima hari). Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah ini adalah bahasa Jawa yang mengacu pada model bahasa Jawa masyarakat Surakarta dan Yogyakarta.

Masyarakat Jawa Panaragan tinggal di wilayah Kabupaten Ponorogo dan dikenal sangat menghormati tokoh informal tradisional yang disebut warok yang secara spiritual dianggap memiliki berbagai kelebihan dibandingkan orang biasa. Jenis kesenian yang paling populer di wilayah ini adalah reog. Daerah inilah yang merupakan daerah asal kesenian yang terkenal itu. Reog dan warok adalah dua hal yang nyaris tak terpisahkan. Kedua entitas ini sarat dengan muatan yang bersifat mistis-kejawen. Meskipun demikian, di wilayah ini juga terdapat cukup banyak pondok pesantren. Salah satu yang terkenal adalah Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak. Setiap tahun masyarakat Ponorogo menyelenggarakan serangkaian acara tradisional yang disebut Grebeg Suro. Grebeg Suro menampilkan bermacam ritual adat dan perlengaran

seni. Sungguhpun demikian, pergelaran yang terbesar dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah Festival Reog Nasional. Ada berbagai sanggar reog dari beragam penjuru tanah air—bukan hanya dari Pulau Jawa—berkumpul dan beradu kreasi.

Sementara itu, kawasan budaya Arek, yang terletak di bagian tengah Jawa Timur, sebagian besar berupa daerah perkotaan yang ramai dan berpenduduk padat, kecuali Lamongan dan Kabupaten Malang yang masih didominasi area pertanian. Sepanjang jalan raya Surabaya-Malang kini telah berkembang menjadi wilayah industri manufaktur. Wilayah industri ini secara historis dimulai dengan kemunculan pabrik-pabrik gula yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, muncul industri petrokimia yang terletak di Gresik, lantas diikuti oleh sejumlah besar pabrik barang-barang konsumsi di kawasan Surabaya dan Sidoarjo, serta industri tembakau yang terletak di sepanjang jalan utama Surabaya-Malang.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Sebuah kota metropolitan yang pada akhirnya menjadi pusat perdagangan, industri, komunikasi, pendidikan, dan hiburan sekaligus menjadi pusat kehidupan dan perkembangan hampir semua jenis kesenian, baik tradisional maupun kontemporer. Di kota ini pernah berkembang kesenian ludruk secara mengesankan. Namun, kini hanya tinggal puing-puing reruntuhan saja yang tersisa di pojok-pojok kampung.

Masyarakat Madura di Pulau Madura sejak lama telah dikenal sebagai kaum yang ulet dan tangguh. Beberapa peneliti meyakini hal itu disebabkan oleh alamnya yang kering dan tandus. Masyarakat Madura terdiri atas pemeluk agama Islam yang taat. Islam dijadikan sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat Madura menempatkan kiai sebagai rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari. Kiai dan dunia pesantren menempati posisi strategis dalam sistem sosial masyarakat Madura. Kesenian yang berkembang di wilayah ini banyak bernalaskan Islam, misalnya tari zapin, sandur, dan diba'an. Kesenian lain yang masih ada adalah topeng dalang, musik tuktuk, dan saronen yang biasa dimainkan

untuk mengiringi karapan sapi. Di beberapa tempat masyarakat secara massal mengembangkan kerajinan batik khas Madura, misalnya Desa Tanjung Bumi, Bangkalan. Mereka juga melakukan ritual petik laut atau *rokat tasse* (larung sesaji). Masyarakat Madura yang berada di daerah pedalaman hidup dengan cara berkebun atau beternak sapi, sedangkan yang berada di daerah pesisir bekerja sebagai nelayan atau pembuat garam tradisional. Sebagian masyarakat Madura tinggal secara berkelompok di rumah adat yang disebut *tanean lanjang*.

Masyarakat Using adalah masyarakat asli Banyuwangi yang dianggap sebagai pewaris langsung Kerajaan Blambangan. Istilah *using* pertama kali digunakan dalam tulisan seorang sejarawan Belanda, C. Lekkerkerker, pada tahun 1923. Arti *using* adalah ‘tidak’ atau ‘bukan’. Menurut Margana (2007), masyarakat Using merupakan konfigurasi etnis baru, peranakan Bali yang tidak berkasta (*out of caste*), yang terbentuk pada masa kolonialisasi Bali atas Blambangan selama lebih dari satu setengah abad. Pada saat ini masyarakat Using beserta kesenian dan tradisinya tersebar di sejumlah desa yang mengelilingi ibu kota kabupaten. Kesenian khas mereka yang tetap terjaga hingga sekarang, bahkan mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, antara lain gandrung, angklung, dan barong kemiren.

E. Jember dan Para Pendatang

Pada masa lalu, Jember menjadi tempat tujuan migrasi orang-orang Jawa dan Madura karena memiliki sejumlah faktor yang memancarkan daya tarik istimewa. Keputusan mereka untuk meninggalkan kampung halaman dan pindah secara permanen ke Jember tentunya tidak bisa disebut sebagai keputusan kecil dan mudah.

Lee (2000) dalam sebuah tulisannya, *Theory of Migration*, mengungkapkan bahwa volume migrasi di suatu wilayah akan berkembang sesuai dengan keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor yang bersifat positif, negatif, dan netral. Faktor positif adalah faktor yang menguntungkan, misalnya, seseorang memutuskan untuk bertempat tinggal di suatu daerah karena di sana terdapat sekolah, kesempatan kerja, atau iklim

yang baik. Faktor negatif adalah faktor kekurangan di daerah asal yang menyebabkan seseorang ingin pindah dari tempat itu. Perbedaan nilai kumulatif di antara kedua tempat tersebut cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk. Secara lebih spesifik Lee menguraikan apa yang dia sebut sebagai faktor-faktor pendorong dan penarik (*push and pull factors*) sebagai berikut.

Pertama, faktor-faktor yang terdapat di daerah asal (faktor pendorong atau *push factor*), antara lain, berupa faktor ekonomi. Seseorang ingin mengubah taraf hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Faktor ekonomi ini merupakan faktor pendorong terbesar terjadinya mobilitas penduduk untuk bermigrasi meninggalkan tempat tinggal mereka. Kedua, faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan (faktor penarik atau *pull factor*), antara lain, faktor tersedianya lapangan pekerjaan atau kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Jember pada mulanya secara administratif berada di bawah Besuki. Pada tahun 1743 daerah Besuki merupakan wilayah Blambangan yang menjadi daerah bawahan Mataram. VOC lalu mengambil alih daerah ini dengan berpedoman pada kontrak antara Gubernur Jendral Van Imhoff dan Susuhunan Pakubuwana II. Selanjutnya, pada tahun 1799 VOC dibubarkan dan sejak saat itu pemerintahan di Jawa, termasuk wilayah Besuki, berpindah tangan dari VOC pada pemerintah Belanda (Winarni, 2012).

Pada abad ke-19 Jember masih berupa sebuah daerah kecil, sepi, terisolasi, dan hanya berstatus sebagai salah satu distrik dari *regentschap* Bondowoso, Keresidenan Besuki. Pada tahun 1890 kepadatan penduduk Besuki hanya ada sekitar 65 orang per km². Sebaliknya, daerah terpadat penduduknya di Jawa, yakni daerah Bagelen, tingkat kepadatannya mencapai 390 orang per km². Faktor utama penyebab rendahnya jumlah penduduk di wilayah ini adalah kematian akibat peperangan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dan terus-menerus. Ada begitu banyak penduduk yang menjadi korban selama periode peperangan. Pembunuhan besar-besaran terjadi di pelbagai tempat, termasuk di daerah Besuki pada tahun

1709. Penyebab lain adalah ketidakstabilan politik sehingga memaksa penduduk untuk melarikan diri ke tempat-tempat lain. Sebagai contoh, sejumlah penduduk Besuki telah melarikan diri ke Pulau Nusa Barong dan Bali untuk menghindari penangkapan dan pembuangan (Winarni, 2012).

Namun, dalam waktu yang relatif singkat, Jember yang semula sepi menggeliat dan berubah menjadi kota paling besar di Keresidenan Besuki, bahkan menjadi lebih ramai dibanding dengan Panarukan, Bondowoso, dan Banyuwangi. Penyebab utamanya ialah munculnya sejumlah perkebunan partikelir. Pemberlakuan Undang-Undang Agraria tahun 1870 menjadikan Jawa Timur tumbuh sebagai kawasan perkebunan besar. Undang-undang ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak swasta untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi. Orang Belanda yang pertama kali merintis usaha perkebunan swasta di Jember adalah George Birnie dkk. pada tahun 1859. Mereka bergerak di bidang perkebunan tembakau dan disusul kemudian dengan aneka tanaman, seperti kopi, kakao, dan karet. Tidak lama kemudian muncullah sejumlah perkebunan lainnya di wilayah tersebut sehingga membawa berbagai perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Pada tahun 1883 terjadi perubahan status Kota Jember dari *distrik* menjadi *regentschap*. Artinya, Jember menjadi afdeling tersendiri dan terpisah dari Bondowoso (Arifin, 2006).

Sehubungan dengan kondisi tanahnya yang subur, pemerintah kolonial Belanda sejak awal merancang Jember sebagai daerah basis produksi yang menghasilkan berbagai komoditas yang bernilai jual tinggi. Hadirnya perkebunan-perkebunan swasta di Jember secara otomatis membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal itu menyebabkan terjadinya gelombang migrasi besar-besaran dari daerah Madura dan Jawa. Dalam rangka mempercepat proses produksi, sebagian pekerja sengaja didatangkan, tetapi ada pula yang datang sendiri.

Sarana transportasi darat menuju ke Jember, termasuk jalur kereta api, dibangun sehingga mobilitas sosial orang Madura, Jawa, Cina, Arab, dan juga orang-orang Belanda ke daerah ini menjadi tinggi.

Jumlah penduduk Jember meningkat dengan cepat. Pada tahun 1845 penduduk Jember hanya berjumlah 9.237 orang, kemudian meningkat menjadi 75.780 orang pada tahun 1867 dan pada tahun 1880 menjadi 129.798 orang. Gelombang migrasi besar-besaran orang-orang Jawa dan Madura ke Jember itu karena jumlah perkebunan swasta di Jember terus bertambah dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Seiring dengan perkembangan Jember, orang-orang Arab dan Cina yang dikenal sebagai kaum pedagang juga berdatangan. Perkembangan Jember tersebut ditandai dengan makin banyaknya jumlah desa. Pada tahun 1845 Jember hanya terdiri atas 36 desa, tetapi pada tahun 1874 berkembang menjadi 46 desa dan pada tahun 1883 menjadi 117 desa. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah desa terus bertambah karena banyaknya pemecahan desa (Arifin, 2006).

Sebelum terjadinya gelombang migrasi ke Jember, diperkirakan sejumlah orang Jawa sudah datang lebih dahulu sejak abad ke-18, terutama di wilayah Puger dan sekitarnya. Adapun mereka yang bermigrasi ke Jember dan sekitarnya pada abad ke-19 berasal dari berbagai daerah lain di Jawa Timur, seperti dari Malang, Bojonegoro, Ponorogo, Kediri, Trenggalek, dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Adapun orang-orang Using yang berada di wilayah itu merupakan penduduk asli Banyuwangi yang tersebar di sebagian besar wilayah tersebut. Sebenarnya, ada, orang-orang Using, yang sejak lama menempati sebagian wilayah Bondowoso, tetapi kemudian terdesak oleh orang-orang Madura. Di samping tiga kelompok penduduk utama tersebut, ada beberapa kelompok lain yang jumlahnya lebih kecil, yaitu orang-orang Eropa, Cina, Arab, Makassar, Sunda, dan Bali. Orang-orang Makassar yang hidup di daerah Besuki diduga keturunan Kraeng Galesong dan para pengikutnya yang melarikan diri dari Makassar pada tahun 1667 (Winarni, 2012).

Jika kita ingin memperdalam persoalan migrasi ke Jember serta bagaimana mereka menata hidup di tempat baru ini, teori konfigurasi budaya merupakan landasan yang cukup penting karena bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai perubahan dan adaptasi suatu etnis (Strathern, 1987; Appadurai, 2005). Dalam hubungannya dengan

proses migrasi, teori ini melihat bahwa ada tiga proses sosial yang dapat terjadi. *Pertama*, adanya pengelompokan baru dengan orang-orang yang berbeda. Pengelompokan seperti ini merupakan proses penting dalam hubungannya dengan proses adaptasi pendatang, yang berarti terjadi pembentukan hubungan-hubungan sosial baru. *Kedua*, terjadi redefinisi sejarah kehidupan seseorang atau sekelompok orang karena ada fase kehidupan baru yang terbentuk. Fase ini dapat memiliki arti yang sangat berbeda bagi seseorang atau sekelompok orang karena latar sosial yang berbeda dengan latar di mana mereka berada sebelumnya. *Ketiga*, terjadi proses pemberian makna baru bagi diri seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan mereka perlu mendefinisikan kembali identitas kultural serta asal-usulnya masing-masing.

F. Migrasi Orang Madura

Orang Madura hidup di lingkungan terbatas yang disebut *tanean lanjang*. Susunan rumah diurutkan berdasarkan hierarki dalam keluarga. Barat-timur adalah arah yang menunjukkan urutan tua-muda. Sistem ini mengakibatkan ikatan kekeluargaan menjadi erat. Meskipun demikian, hubungan antar kelompok menjadi renggang karena letak permukiman yang menyebar dan terpisah. Di ujung paling barat *tanean lanjang* terletak sebuah surau. Susunan dari barat ke timur adalah rumah orang tua, anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit dari keturunan perempuan. Kelompok keluarga yang demikian disebut *koren* atau rumpun bambu. Istilah ini cukup sesuai karena satu *koren* berarti satu keluarga inti.

Pada umumnya, model *tanean lanjang* adalah sebagai berikut. Rumah berada di sisi utara, surau di ujung barat, kandang di sisi selatan, dan dapur menempel pada salah satu sisi rumah masing-masing. Halaman tengah inilah yang disebut dengan istilah *tanean*. Karena *tanean* biasanya cukup panjang, halaman ini disebut *tanean lanjang*. *Tanean* menurut generasi penghuninya memiliki sebutan bermacam-macam, seperti *pamengkang*, *koren*, *tanean lanjang*, setiap *tanean* terdiri atas tiga, empat, dan lima generasi (Tulistyantoro, 2005).

Islam dan kiai adalah elemen penting dalam kehidupan orang Madura (Kuntowijoyo, 2002). Untuk tujuan menjaga kehormatan, orang Madura rela mengorbankan nyawa seperti diperlihatkan oleh pepatah Madura *tembang pote mata ango'an potea tolang* (daripada hidup menanggung malu lebih baik mati berkalang tanah).

Gejala perubahan sosial di Madura mulai terasa ketika kejayaan kerajaan-kerajaan tradisional Madura (Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan) berakhir karena mereka menyerah pada penguasa kolonial Belanda pada paruh kedua abad ke-19. Penelitian Kuntowijoyo (2002), tentang pengaruh ekologi pada formasi sosial di Madura, mempelihatkan bahwa migrasi ke Pulau Jawa merupakan bagian penting dari sejarah orang Madura. Dibukanya perkebunan di Jawa Timur menarik kehadiran orang-orang Madura untuk menjadi buruh kasar di perkebunan. Pada tahun 1930 lebih dari separuh keseluruhan etnis Madura tinggal di Jawa, kebanyakan menetap di pojok bagian timur.

Kondisi alam di Pulau Madura tidak memungkinkan bagi masyarakat di sana untuk bisa bercocok tanam secara layak sehingga menghasilkan produk pangan yang dapat menopang ekonomi masyarakat. Sedikit sekali lahan yang dapat ditanami padi. Sebagian besar lahan berupa tegalan yang hanya bisa ditanami ketela pohon, jagung, atau dijadikan tempat penggembalaan ternak. Ekosistem Madura adalah ekosistem tegalan (Kuntowijoyo, 2002). Kondisi alam di Madura tersebut, menurut Kuntowijoyo, berperan dalam pembentukan perilaku sosial masyarakat Madura. Persoalan sikap fanatik terhadap agama tidak lepas dari kondisi alam yang ada di Madura yang menurut Kuntowijoyo disebabkan karena letak desa-desa yang tersebar dan tidak terpusat (*scattered village*). Perumahan penduduk terpencar dalam kelompok-kelompok kecil, yakni lima atau enam keluarga, yang dikelilingi oleh tegal. Oleh karena itu, kemudian orang Madura harus berkumpul berdasarkan kepentingan keagamaan. Dengan demikian, para kiai berperan besar dalam menyatukan kesadaran kolektif masyarakat Madura. Dalam konteks sosial inilah, agama dan kiai menjadi *organizing principle*. Agama memberikan *collective sentiment* melalui berbagai aktivitas keagamaan.

Menurut Lee (2000), faktor-faktor yang memengaruhi orang Madura mengambil keputusan untuk bermigrasi dapat diringkas menjadi empat pokok, yaitu

- 1) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal,
- 2) faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan,
- 3) penghalang antara, dan
- 4) faktor-faktor pribadi.

Menurut Kuntowijoyo (2002), faktor iklim dan geologis Pulau Madura menjadi pendorong migrasi orang Madura. Kondisi geografis dan ekologis Pulau Madura kurang mendukung untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Kondisi tanah Pulau Madura yang bersifat basa oleh lapisan kapur mendorong penduduknya melakukan migrasi karena kurang berpotensi untuk mengembangkan pertanian. Dalam catatan de jonge (1989), sudah sejak pertengahan abad ke-19 terdapat 833.000 orang Madura yang bertempat tinggal di Jawa Timur. Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah orang yang bertempat tinggal di pulau asal. Sementara itu, Kuntowijoyo (2002) mencatat bahwa pada tahun 1806 telah terdapat desa-desa orang Madura di sejumlah tempat di Jawa Timur, yaitu 25 desa di Pasuruan, 3 desa di Probolinggo, 22 desa di Puger, dan 1 desa di Panarukan.

G. Migrasi Orang Jawa

Migrasi orang-orang Jawa dalam jumlah besar telah terjadi sepanjang masa, baik untuk selama-lamanya maupun untuk waktu yang singkat, ke pelbagai penjuru mata angin. Sebelum abad ke-20, migrasi orang-orang Jawa dilakukan karena berbagai alasan, seperti persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Jumlah penduduk di beberapa tempat di Pulau Jawa bertambah dengan pesat sehingga lahan pertanian pun makin menyempit. Di samping itu, keputusan pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sistem *Cultuur Stelsel* atau Tanam Paksa (1830–1870), yang mengakibatkan merosotnya ekonomi rakyat, mendorong kepergian orang Jawa di beberapa daerah untuk merantau ke tempat-tempat lain.

Meskipun memiliki pandangan hidup *mangan ora mangan kumpul* (makan atau tidak makan yang penting berkumpul), orang Jawa bukan etnis yang tidak bisa meninggalkan tanah kelahiran. Orang Jawa juga memiliki tradisi merantau. Mereka pergi merantau dan tersebar ke segala penjuru Nusantara, bahkan hingga ke Madagaskar, Afrika. Mereka merantau dengan membawa sanak-keluarga, bahkan terkadang seluruh kampung/desa berangkat bersama-sama atau biasa disebut bedol desa. Perpindahan penduduk khas Jawa ini—sesuai dengan namanya—merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan secara massal oleh satu atau beberapa desa beserta dengan aparatur desanya menuju ke daerah lain yang masih jarang penduduknya, entah itu di wilayah Pulau Jawa, entah di pulau lain. Pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak penduduk Pulau Jawa yang melakukan transmigrasi bedol desa ke pulau-pulau lain yang jarang penduduknya. Jadi, masyarakat yang datang ke Jember adalah orang-orang yang memiliki etos kerja keras, berani melepas kebiasaan lama “daripada hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri”, atau “*mangan ora mangan kumpul*”.

H. Jember, Hari Ini

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan *Staatsblad* Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 dan sebagai dasar hukum mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk *regenschap* Jember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri.

Luas total wilayah Kabupaten Jember pada saat ini adalah 3.092,34 km². Penggunaan lahan untuk kepentingan pertanian mencapai luas 46,41%; permukiman 9,93%; hutan 21,17%; dan lain-lain seluas 22,49%. Secara administratif wilayah ini terdiri atas 31 kecamatan, terbagi menjadi 225 desa dan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 km² atau 15,9% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jember, sedangkan yang terkecil ialah Kaliwates

yang hanya seluas 24,94 km² atau 0,76% dari keseluruhan luas Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah total penduduk Kabupaten Jember adalah 2.536.729 jiwa yang terdiri atas laki-laki 1.264.968 jiwa dan perempuan 1.271.761 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2024). Persebaran penduduk di Kabupaten Jember tidak cukup merata. Kecamatan berpenduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumbersari, yakni 125.981 jiwa (5,41%), sedangkan Kecamatan Jelbuk berpenduduk paling sedikit, yakni 31.967 jiwa (1,37%). Kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 2010 mencapai 707 jiwa/km². Yang terpadat adalah Kecamatan Kaliwates yang mencapai 4.479,55 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Tempurejo memiliki tingkat kepadatan terendah, yakni 134,71 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2016).

Tipe perekonomian Kabupaten Jember adalah tipe agraris. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani sehingga *sektor unggulan* perekonomian Jember adalah bidang pertanian. Pada tahun 2015 perolehan dari pertanian mencapai 41,73% dan berhasil memosisikan Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung beras bagi Provinsi Jawa Timur.

Hingga pada saat ini di Kabupaten Jember masih terdapat sejumlah area perkebunan yang sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Daerah ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Selain itu, Jember juga dikenal sebagai “daerah 1.000 gumuk” karena memiliki lebih dari 1.500 gunung (bukit) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember meskipun dari tahun ke tahun jumlahnya terus menyusut secara signifikan karena penambangan batu dan pasir di bukit-bukit tersebut.

Masyarakat Jember terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang, dialektika sosiokultural antaretnis, kekuatan alam, serta berbagai hal yang mengalir dari luar. Dari hal ini tampaklah sosok Jember sebagai suatu unit lingkungan masyarakat yang unik dan khas

serta cukup berbeda dibanding dengan wilayah geografis lainnya di Indonesia.

Pada masa kini migrasi penduduk ke Jember masih terjadi dan terus berlangsung. Akan tetapi, faktor utama yang mendorong kedatangan masyarakat dari daerah lain menuju Jember adalah faktor pendidikan dan ekonomi. Mahasiswa dari berbagai daerah di tanah air datang ke Jember karena menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang ada di Jember, khususnya Universitas Jember. Jika dulu mayoritas hanya orang Jawa dan Madura yang datang ke Jember untuk bekerja di perkebunan milik Belanda atau membuka lahan pertanian baru, sekarang yang datang berlatar belakang etnik dan budaya yang lebih beragam dengan tujuan yang juga beragam. Misalnya, setiap tahun terdapat sejumlah pegawai baru pemerintah atau karyawan perusahaan yang ditempatkan di Jember. Para pendatang tersebut, baik yang berlatar belakang kepentingan pendidikan maupun ekonomi, berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan beragam etnis, agama, bahasa, dan tradisi. Hal itu menjadikan Jember makin berwarna, makin heterogen. Walaupun demikian, komposisi masyarakat tetap didominasi etnis Jawa dan Madura sehingga secara umum kultur kedua etnis inilah yang menjadi warna utama Jember.

I. Identitas Kultural Pendalungan

Identitas secara terminologi adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang secara signifikan membedakannya dari orang lain. Perbedaan-perbedaan antara *seseorang* atau *sekelompok orang dengan seseorang/sekelompok orang* menjadi kata kunci bagi terciptanya suatu identitas. Dengan demikian, pengertian identitas masyarakat Jember adalah jati diri masyarakat Jember. Rumusan identitas tersebut merupakan inti sari dari bertemu, bercampur, dan berpadunya faktor-faktor biologis, ideologis, psikologis, dan sosiologis masyarakat Jember. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang identitas kultural suatu masyarakat, yang harus tercakup di dalamnya adalah keseluruhan aspek kehidupan

masyarakat tersebut. Sukimi (2004) menyebutkan bahwa suatu keunikan yang terdapat pada seseorang atau suatu masyarakat sering kali dijadikan sebagai elemen penting bagi pengenalan identitas orang atau kelompok tersebut. Ciri fisik, corak dan gaya berpakaian, pola perilaku, dan aktivitas-aktivitas budaya yang memperlihatkan keunikan sering dianggap sebagai elemen yang mencerminkan identitas. Secara positif, identitas dapat memberi kebanggaan dan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Identitas juga dapat dinyatakan melalui berbagai aktivitas, terutama kesenian. Aktivitas berkesenian mampu menunjukkan karakter mendasar suatu masyarakat secara efektif dan otentik.

Identitas kultural selalu bersifat konstruktif. Artinya, tidak ada suatu identitas yang tumbuh secara alamiah, tanpa rekayasa ideologis, pikiran-pikiran kreatif-fungsional, ataupun strategi yang mendasarinya. Penciptaan atau penyematan identitas kultural semacam itu digagas dan dirancang karena diperlukan untuk mempermudah upaya-upaya mobilisasi sosiokultural secara cepat dan massal, baik vertikal maupun horizontal. Misalnya, bagaimana memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pro kebersihan lingkungan? Pemerintah cukup mengingatkan pada masyarakat (jika mayoritas beragama Islam) bahwa “kebersihan adalah sebagian dari iman”. Memang seruan saja tidak cukup efektif karena gerakan pro kebersihan harus bersifat total dan multidimensional, tetapi hal itu diharapkan dapat menjadi kerangka dasar menguatnya kesadaran kolektif. Dengan menggunakan seruan tersebut, masyarakat diingatkan bahwa mereka beragama Islam dan wajib hukumnya bagi orang Islam mengupayakan kebersihan lingkungan.

Penerimaan masyarakat Jember pada nilai-nilai kultural tertentu jelas akan menuntun mereka juga pada praktik-praktik kultural tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pada akhirnya menjadikan diri mereka terikat pada suatu identitas yang spesifik yang dibangun di atas nilai-nilai kultural tersebut. Dalam memahami proses produksi/reproduksi identitas kebudayaan ini, terdapat dua alur logika yang bisa ditelusuri. *Pertama*, model logika pasar yang menyatakan

bahwa setiap produk identitas budaya dianggap memasyarakat jika populer dan pada puncaknya dipraktikkan oleh banyak orang. *Kedua*, model logika kualitas yang menyatakan bahwa setiap produk identitas budaya harus dapat diukur berdasarkan kualitas—sama sekali di luar pertimbangan popularitas. Namun, harus dipahami bahwa, di atas semua itu, manusia tidak akan pernah bisa berada di dua ruang kultural sekaligus. Ia harus memilih untuk berada di *sini* atau di *sana*. Tidak bisa mendua, tidak ada pula yang namanya “ruang antara”. Tempat semacam itu hanya seolah-olah ada, tetapi sesungguhnya tidak ada. Oleh karena itu, identitas kultural harus dikonstruksi, di-ada-kan, agar seseorang bisa bermukim di dalamnya. Bahwa penulis, sebagai individu, telah pindah ke Jember dan telah menjadi penduduk Jember selama puluhan tahun, tidak akan mengubah sejarah hidup penulis sebagai seseorang yang dilahirkan di Kediri. Namun, ketika memutuskan untuk bermukim di Jember, bagaimanapun penulis harus meredefinisi identitas kultural penulis. Dengan demikian, penulis bisa mempunyai “rumah budaya” tempat penulis menjalani hidup dengan nyaman di kota ini. Dengan kata lain, penulis wajib berdaya upaya mencari sesuatu yang mengakar dan dapat penulis jadikan sebagai sandaran budaya. Sebagaimana dikatakan Stuart Hall (1991) bahwa identitas bukanlah “suatu totalitas yang tertutup atau yang disegel”. Selalu ada momentum untuk melakukan *rediscovery* atau ‘pencarian ulang’ bagi akar budaya. Proses reterritorialisasi dan redefinisi terhadap identitas ini, bahkan terhadap etnisitas, pada intinya mengacu pada apa yang diistilahkan oleh Hall sebagai “*old and new identities, old and new ethnicities*”.

J. Kebudayaan Urban di Jember

Urban culture atau budaya urban adalah kebudayaan masyarakat perkotaan. Budaya urban merupakan suatu gaya berpikir, bertindak, dan berperilaku yang berkaitan erat dengan persoalan kemodernan. Kehidupan masyarakat urban hampir selalu diidentikkan dan juga dicampuradukkan dengan permasalahan industrialisasi, urbanisasi, dan konsumsi. Hal ini terjadi karena aspek-aspek kehidupan dan

kebutuhan hidup masyarakat urban makin kompleks. Gaya hidup modern yang mereka pilih akan mengarahkan mereka untuk terus-menerus mengonsumsi aneka produk benda dan jasa yang mencitrakan modernitas.

Masyarakat yang berada di wilayah percampuran budaya, seperti halnya masyarakat Pendalungan, seolah-olah tampak tidak mempunyai norma dan sistem nilai kultural yang kuat. Mereka seolah-olah tidak memiliki sesuatu yang pantas untuk dijadikan sebagai penanda identitas, lebih-lebih jika dikaitkan dengan hadirnya semacam ekspektasi pada diri masyarakat untuk memiliki penanda identitas yang orisinal, unik, dan khas yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Seolah-olah penanda kultural suatu masyarakat itu harus etnis, tradisional, dan arkais. Jika memang penanda kultural harus seperti itu, jelas ini akan menjadi beban kultural yang berat bagi masyarakat di wilayah perkotaan dan percampuran budaya. Bertolak dari kondisi ini, adalah suatu kelaziman, bahkan akhirnya menjadi suatu keharusan, jika pada akhirnya masyarakat Pendalungan memberanikan diri untuk mencari dan menemukan apa yang bisa menjadi penanda bagi keberadaan mereka.

Jika dibanding dengan masyarakat homogen, pola relasi sosial dan sistem stratifikasi pada masyarakat Pendalungan yang heterogen cenderung bersifat lebih terbuka dan fleksibel. Kita dapat mengajukan pertanyaan penting. Dalam kondisi demikian, bagaimanakah masyarakat Jember memilih, mendefinisikan, dan mengembangkan kebudayaannya?

Masyarakat Jember, meskipun berada 200 km dari ibu kota provinsi, Surabaya, ternyata tidak luput dari keinginan untuk menjadi sebuah ruang diskursus penyemaian modernitas. Secara intens dan signifikan, Pemerintah Kabupaten Jember mendorong masyarakat Jember untuk terlibat dalam diskursus modernitas tersebut. Berbagai indikator modern dihadirkan, seperti pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan berjaringan, hotel, restoran, dan bandara.

Oleh karena merasa tidak memiliki basis kultural tradisional yang kuat, masyarakat Pendalungan di Jember pada akhirnya lebih memilih

berorientasi pada nilai-nilai budaya yang bersifat kontemporer. Berbagai bentuk aktivitas kebudayaan yang meruang dengan sifat kekinian dianggap sebagai modern dan sering menjadi oposisi biner bagi segala aktivitas yang berbau tradisi dan lokal. Dengan demikian, secara cepat berbagai aktivitas yang mengikuti tren global akan dianggap lebih masuk akal, bahkan lebih prestisius, dibanding dengan aktivitas yang berbau lokal. Tentu saja hal ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi fakta mengenai hal itu dapat dengan mudah ditemukan di Jember.

Memang pada umumnya mereka yang tinggal di daerah perkotaan menjadi lebih spontan dalam menerima unsur-unsur kebudayaan internasional yang dianggap bermanfaat dan bernilai positif. Jika dibanding dengan masyarakat lain di Indonesia yang memiliki basis kultural—yang secara historis—lebih kuat, masyarakat Pendalungan memiliki akselerasi lebih tinggi dalam mengadopsi modernitas. Model-model kesenian hibrida atau kesenian yang tidak taat pada akar tradisi cenderung lebih dipilih dan disukai. Oleh sebab itu, seni kentrung versi Kentrung Djos bisa bertahan puluhan tahun. Ketoprak humor disambut lebih hangat *ketimbang* ketoprak konvensional dan pertunjukan wayang kulit dengan *dalang sabet* lebih digemari daripada dalang yang mengandalkan *antawacana*. Secara garis besar, proses produksi kultural masyarakat Pendalungan berlangsung dengan tanpa referensi yang bersifat historis. Contoh paling aktual mengenai hal ini adalah lahirnya Jember Fashion Carnaval (JFC), suatu produk kultural, yang muncul dari kancan hibridisasi budaya masyarakat Pendalungan Jember, yang lebih mengedepankan selera global dan kekinian. Sebagian besar anak-anak muda di Kota Jember merasa cocok dan mudah menerima produk budaya semacam ini.

Terdapat kekhawatiran yang cukup mendalam di beberapa kalangan, khususnya pihak-pihak yang peduli terhadap masalah kebudayaan. Bahwa dari waktu ke waktu budaya lokal secara perlahan, tetapi pasti akan tergerus oleh budaya global. Format kehidupan masyarakat, misalnya dalam hal pekerjaan, makanan, dan hobi, telah terbukti meninggalkan model dan cita rasa lama dan bergeser ke arah

model dan cita rasa global. Sebagian orang memang masih sering *ngopi* dan *marung*, tetapi bukan lagi di warung-warung tradisional sederhana, melainkan di kafe atau resto cepat saji yang ditata bergaya modern. Pelaksanaan pesta *mantenan* tidak lagi dilaksanakan di *terop* dengan tata laksana gaya tempo dulu, tetapi diselenggarakan di hotel atau gedung tertentu dengan model *standing party*.

Masyarakat Pendalungan Jember—dan secara umum masyarakat Pendalungan Raya—yang dianggap tidak memiliki basis kultural tradisional kuat ini sesungguhnya memiliki masalah cukup mendasar, yakni rentan tersesat pada belantara *kebudayaan pseudo-modern*. Hal ini adalah suatu situasi dan kondisi ketika masyarakat dengan rakus mengonsumsi produk-produk modern palsu. Suatu produk tampaknya saja modern, tetapi sesungguhnya tidak memiliki akar realitas dan kultural yang jelas. Masyarakat buru-buru menganggapnya sebagai sesuatu yang modern. Nilai-nilai yang ditawarkan kebudayaan pseudo-modern adalah nilai-nilai yang “bebas nilai”, yakni nilai-nilai yang tidak memiliki implikasi ideologis dan religiositas kuat. Nilai-nilai ini hanya bersifat di permukaan dan lahiriah, seperti pusat perbelanjaan, butik, salon, toko waralaba, dan resto internasional. Hal-hal tersebut sesungguhnya bersifat ilusif dan artifisial serta tidak menyumbangkan nilai unik apa pun bagi proses pembentukan identitas kultural masyarakat. Akibat dari konsumsi produk-produk ilusif dan artifisial itu mudah ditebak, yakni mereka akan segera merekonstruksi identitas baru dengan penuh semangat dan kerelaan berdasarkan pada produk-produk yang mereka konsumsi tersebut.

Kebudayaan pseudo-modern secara filosofis tidak identik dengan Pendalungan, justru berpotensi mengancam identitas kebudayaan Pendalungan. Penulis sebut berpotensi mengancam karena kebudayaan pseudo-modern hanya mengusung simbol-simbol yang dangkal nilai, yang hanya memiliki makna permukaan, tidak sampai pada makna dalam dan substansial. Kebudayaan pseudo-modern menggiring masyarakat untuk mudah menanggalkan kebudayaan tradisionalnya, tetapi tidak mampu menyediakan jalan bagi mereka untuk sampai pada modernitas. Alhasil, kebudayaan pseudo-modern

akan selalu menyesatkan siapa saja untuk menjadi gerombolan manusia ahistoris—manusia latah dan genit tanpa kepribadian kuat.

Terlepas dari adanya rekayasa politik ataupun birokratis yang terbukti tidak menghasilkan manfaat sosiokultural signifikan, satu hal yang menggembirakan adalah bahwa masyarakat Jawa dan Madura di Jember telah memiliki pijakan bersama atau *common platform*. Pijakan bersama ini terbentuk dari persamaan agama yang dianut, yakni Islam. Mereka juga memiliki pengalaman persentuhan kultural dalam jangka waktu yang relatif lama serta pertukaran konsep-konsep abstrak mengenai kesatuan dan harmoni yang akhirnya menjadi pijakan hidup bersama. Tanpa pengalaman kontak kultural serta upaya untuk merawat kesatuan dan harmoni, semua itu hanya akan menjadi kata-kata rekayasa politis-birokratis belaka yang hanya bisa ditegakkan dengan paksaan. Masyarakat Pendalungan di Jember telah menunjukkan bahwa pluralisme bukan gagasan abstrak yang bersifat *given*, yang dijatuhkan begitu saja dari langit oleh seorang dewa yang sedang *nganglang jagad*. Ia lahir dari konteks historis tertentu dan harus diperjuangkan.

K. Pendalungan: Mencari Bentuk

Apakah kebudayaan masyarakat Pendalungan saat ini telah mewujud sebagai suatu kebudayaan yang mapan? Tentu saja belum. Penulis mempunyai alat ukur sederhana untuk menilai apakah suatu masyarakat telah berada pada sebuah kemapanan budaya. Cukup dengan mengajukan sebuah pertanyaan tunggal yang sederhana: Bagaimanakah orang Jawa/Madura/Cina/Pendalungan itu sesungguhnya?

Berdasarkan pertanyaan sederhana itu, Anda bisa menjawab secara sederhana pula bahwa “orang Jawa itu penyabar”, “orang Madura itu keras”, “orang Cina itu hemat”, dan sebagainya. Bagaimana dengan orang Pendalungan? Belum ada *kata sifat* yang segera bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik orang Pendalungan. Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan Pendalungan masih belum mapan. Tentu saja ini hanya stereotipe, alat ukur main-main, dan tidak ilmiah.

Di tengah-tengah kebudayaan dunia yang tak henti datang menghampiri dan berseliweran di sekeliling kita melalui media, kebudayaan masyarakat Pendalungan terus berproses dan berubah-ubah karena sejumlah alasan. Menurut Abdullah (2006), perubahan budaya terjadi karena beberapa sebab berikut.

Pertama, mencairnya batas-batas kebudayaan. Jika dulu kebudayaan selalu diikat oleh batas-batas fisik yang jelas, kini tidak lagi. Contohnya, kebaya, sungkeman, wayang kulit, dan blangkon yang selalu diidentikkan dengan kebudayaan Jawa. Namun, perubahan kesadaran atau pola pikir manusia, mencairnya batas-batas klasik teritorial identitas, mobilisasi manusia, kecanggihan intelektualitas yang dicapai, hingga media komunikasi yang makin modern telah membuat masyarakat menjadi terintegrasi bukan hanya pada level lokal, melainkan dunia sehingga batas-batas identitas suatu kebudayaan pun mencair dan memudar. Tradisi sungkeman pada masyarakat Jawa, sebagai simbol kepatuhan seorang anak kepada orang tua, cukup diganti dengan komunikasi lewat telepon atau alat canggih lainnya. Dengan adanya integrasi tatanan global semacam ini kebudayaan tidak lagi terikat pada batas-batas fisik yang kaku dan sempit, yang semula hanya disebabkan oleh ikatan ruang yang bersifat deterministik.

Kedua, adanya politik ruang dan makna budaya. Perubahan makna suatu simbol juga disebabkan oleh struktur kekuasaan yang berubah. Hal ini terjadi karena suatu kebudayaan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang tempat kebudayaan itu dibangun, dipelihara, dan dilestarikan atau bahkan diubah dan dihilangkan. Adanya kepentingan kekuasaan yang berbeda maka ruang yang menjadi wadah tempat kebudayaan pun mengalami redefinisi sejalan dengan kepentingan baru yang tumbuh. Contohnya ialah perubahan rancangan ruang. Dahulu pusat-pusat kebudayaan memegang kendali dan suara dalam menentukan karakter suatu ruang sosial. Kemudian, karena ada perbedaan kepentingan, terjadi *definisi ulang ruang* agar sesuai dengan orientasi pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, makna kebudayaan pun harus tunduk terhadap siapa yang berkuasa untuk

mendefinisikan ulang. Simbol dan makna kebudayaan pun menjadi suatu objek yang kehadirannya dihasilkan melalui proses negosiasi sejumlah pihak yang berkepentingan.

Ketiga, ketika hegemoni kepentingan politik kekuasaan terjadi, secara bersamaan pemakaian terhadap ruang dan identitas budaya pun terjadi. Masyarakat dapat terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang beragam dalam memaknai ruang dan identitas budaya. Kontestasi berbagai institusi terjadi secara intensif yang menyebabkan individu-individu menjadi objek dan komoditas berbagai kepentingan yang berbeda. Mereka yang tersubordinasi pun ikut melakukan kontestasi dalam bentuk pemaknaan dekonstruktif atau pembangkangan terhadap pendefinisian ruang dan identitas budaya yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Terjadinya tarik-menarik antara pihak pemegang kendali kuasa dan mereka yang tersubordinasi pun menjadikan identitas kebudayaan mengalami rekonstruksi dan reproduksi yang berbeda yang sarat kepentingan.

Dari seluruh dampak tersebut, tergeseranya budaya lokal oleh budaya global adalah dampak yang paling patut diwaspadai. Kecenderungan umum yang terjadi pada media elektronik, khususnya televisi, adalah munculnya *gerakan* marginalisasi bentuk-bentuk budaya lokal. Seharusnya, ketegangan antara yang global dan lokal ini menjadi inspirasi bagi para kreator dalam memproduksi kreasi-kreasinya. Dalam ketegangan tersebut ada ruang kreatif mahaluan yang disediakan, yakni sesuatu yang kita sebut sebagai budaya hibrida. Budaya hibrida merupakan penggabungan dua elemen yang berbeda, bahkan mungkin berlawanan dengan tetap mempertahankan karakter dasar keduanya.

Terjadinya konflik dalam suatu proses kebudayaan memang sering tak terhindarkan. Meskipun begitu, dalam pandangan Abdullah (2006), tanpa adanya konflik kepentingan sulit dibayangkan lahirnya suatu kesadaran tentang perubahan yang sistematis menuju suatu sistem sosial yang lebih berkembang. Oleh sebab itu, Abdullah menegaskan bahwa upaya memahami kebudayaan harus dimulai dengan mendefinisikan ulang kebudayaan tersebut, bukan sebagai

kebudayaan generik yang merupakan pedoman turun-temurun, melainkan sebagai kebudayaan diferensial (yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial). Kebudayaan bukanlah suatu warisan yang secara turun-temurun dipraktikkan secara kolektif, melainkan suatu warisan yang bersifat situasional yang keberadaannya tergantung pada karakter kekuasaan dan juga hubungan-hubungan yang berubah dari waktu ke waktu. Usaha merajut kebudayaan berlangsung dalam suatu ruang yang penuh dengan kepentingan berbagai pihak yang turut ambil bagian dalam proses tersebut.

L. Jember Kampung Halaman Pendalungan

Bulan Agustus, ketika HUT kemerdekaan Indonesia diperingati, biasanya dimeriahkan dengan berbagai lomba, karnaval, atau kirab budaya. Sebagian dari para peserta pada acara tersebut, khususnya karnaval, memilih mengenakan pakaian daerah. Ada yang memakai pakaian adat Jawa, ada juga yang memakai pakaian adat Madura. Eksistensi dua pendukung kebudayaan tersebut akan langsung tecermin pada pakaian yang mereka kenakan. Artinya, sebagian besar masyarakat Jember yang beretnis Madura tetap mengidentifikasi dirinya sebagai orang Madura. Orang-orang Jember yang beretnis Jawa pun demikian. Namun, mereka sudah tidak merasa memiliki ikatan emosional yang berlebihan dengan *Pulau Madura* atau *Tanah Jawa* tempat orang tua atau nenek moyang mereka dilahirkan. Mereka kini justru lebih terikat pada tanah di mana mereka melahirkan anak-anak mereka. Biasanya yang masih memiliki ikatan kuat dengan Pulau Madura atau Jawa *kulonan* adalah para pendatang yang tidak dilahirkan di Jember.

Etnis Madura, baik di wilayah Tapal Kuda maupun di daerah-daerah lain di Indonesia, identik dengan budaya yang melekat pada orang Madura sebagai transmigran. Oleh karena itu, bagaimana mempertahankan eksistensi budayanya di antara etnis lainnya? Kemudian, bagaimana orang lain yang berinteraksi dengan mereka dapat memahami dan memaknai keberadaannya sebagai etnis Madura.

Sebagai masyarakat pendatang, memang nyaris tidak mungkin etnis Madura dapat sepenuhnya melepaskan diri atau memutuskan hubungan begitu saja dengan daerah asal mereka. Akan tetapi, akan tampak kemudian, terutama di Jember, bahwa lambat laun mereka bukan lagi orang Kediri yang tinggal di Jember atau orang Pamekasan yang menetap di Jember, melainkan telah bertransformasi sebagai *orang Jember yang berasal dari Kediri* atau *orang Jember yang berasal dari Pamekasan*. Hal inilah proses re identifikasi identitas, yakni ketika identitas itu, menurut Hall (1991), tidak pernah komplet, sempurna, atau tidak pernah akan berakhir. Dengan kata lain, identitas akan selalu berada dalam proses formasi. Identitas berarti proses identifikasi. Dalam pengertian struktur identifikasi tersebut selalu dikonstruksikan melalui ambivalensi, seperti antara *us* dan *other*, atau ‘kita’ dan ‘mereka’. *Other* juga ada dalam diri kita. *Other* juga merupakan bagian dari proses identifikasi identitas diri kita sendiri karena kita melihat *other* dalam pandangan diri kita. Diri kita juga dilihat dalam pandangan *other*.

Masyarakat Pendalungan di Jember cenderung tidak lagi melakukan pembedaan antara *yang lokal* dan *pendatang* karena sesungguhnya tidak pernah ada interpretasi yang mencukupi di antara keduanya. Masyarakat lebih cenderung melihat pada ranah pertarungan identitas yang mungkin terbangun. Hal ini merupakan suatu bentuk strategi untuk dapat memenangkan pertarungan identitas. Mengapa demikian? Karena identitas dibangun atas dasar dialektika yang intens antara *yang lokal* dan *pendatang*. Hal-hal demikian menandakan bahwa masyarakat Pendalungan di Jember lebih terbuka terhadap perolehan pengalaman baru, lebih berani menerima berbagai risiko, dan memiliki empati lebih besar meskipun di sisi lain cenderung lebih berwatak individualis.

Perpaduan dan adaptasi budaya Jawa-Madura memang terjadi di pusat dan pinggiran kota meskipun pada akhirnya tetap berorientasi pada budaya Jawa (Raharjo, 2006). Menurut Raharjo, contoh paling jelas atas interaksi antara Madura dan Jawa adalah lahirnya bahasa Jawa dialek Jember. Akan tetapi, apakah “bahasa Jemberan” itu

memang benar-benar ada dan pantas disebut sebagai bahasa Jawa dialek Jember masih perlu kajian dan pembuktian lebih lanjut.

Berdasarkan pengalaman pribadi yang telah tinggal di Jember selama lebih dari empat puluh tahun, penulis melihat bahwa antara budaya Jawa dan Madura dapat dikontraskan secara total, baik tentang pandangan hidup, bahasa, perilaku, etika, selera, maupun produk-produk keseniannya. Namun, di wilayah Pendalungan ini kedua entitas tersebut tidak mudah untuk dipisahkan karena secara kultural telah terjadi jalinan yang saling mengisi dan menguatkan. Jember bukan hanya Jawa dan/atau Madura, melainkan campuran kedua etnis tersebut serta etnis-ethnis lain. Yang dimaksud dengan percampuran di sini tidak terbatas secara biologis, tetapi juga kultural. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa Jember merupakan wilayah multikultur yang selama ini telah berhasil secara intens mempraktikkan dan akan selalu membutuhkan landasan multikulturalisme dalam kehidupan sehari-harinya.

Raharjo (2006) menangkap adanya proses subordinasi terhadap budaya Madura atau Jawa walaupun kondisi tersebut tampak berlangsung secara alamiah. Dengan kata lain, budaya Jawa berposisi sebagai ordinat, sedangkan etnis Madura sebagai subordinat yang berusaha untuk beradaptasi, lalu *menjadi Jawa* secara kultural. Hal inilah yang selanjutnya memunculkan apa yang disebut sebagai Pendalungan, yakni ketika orang Madura bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat Jawa dan berevolusi menjadi *Jawa Pendalungan*. Tambahan lagi, Raharjo menekankan bahwa secara historis ataupun sosiokultural interaksi dan komunikasi beragam etnislah—tidak hanya Jawa dan Madura—yang telah menciptakan kondisi kultural masyarakat Pendalungan. Ada etnis lain yang meskipun secara kuantitas adalah minoritas, seperti Tionghoa, Arab, dan Using. Artinya, dalam pemahaman Raharjo, Pendalungan merupakan proses interaksi dan komunikasi di antara beragam etnis yang berakar pada peran sosial dan atraksi kultural masing-masing yang kemudian menghasilkan budaya hibrida. Perlu ditekankan bahwa hibridisasi dalam konteks ini tidak hanya membicarakan proses

perpaduan di antara bermacam budaya yang menghasilkan budaya baru. Hibridisasi yang terjadi di wilayah Pendalungan merupakan hibridisasi struktural dan kultural.

Dalam pandangan penulis, subordinasi kultural, sebagaimana yang dimaksudkan Raharjo, tidak sungguh-sungguh terjadi. Kalaupun terjadi, sifatnya hanya kasuistik dan kadarnya rendah saja. Bahwa di antara masyarakat Jawa dan Madura serta etnis-ethnis lain terjadi dialektika budaya memang benar. Akan tetapi, bukan kebudayaan Jawa dan Madura berhadap-hadapan sebagai dua kontestan yang memperebutkan piala kemenangan.

Hal ini adalah persoalan multikulturalisme, bukan persoalan etnisitas. Adalah hal yang wajar jika dalam suatu wilayah yang pluralistik, seperti Jember atau wilayah Tapal Kuda lainnya, secara terus-menerus terjadi negosiasi dan bahkan *kompetisi pengaruh* dalam upaya memproduksi identitas kultural Pendalungan. Namun, sejauh ini etnis Jawa dan Madura memiliki kekuatan dan daya tawar masing-masing yang relatif berimbang. Tidak ada upaya eksplisit untuk saling memperkecil, menghapus, atau mengalahkan. Dengan kata lain, tidak ada dominasi suatu etnis terhadap etnis lainnya. Blum (1991) meletakkan konsep multikulturalisme berhadap-hadapan secara diametral dengan rasisme. Dalam hal ini, Blum (1991) memahami rasisme sebagai “*the domination or victimization of some groups by others, and with the notion of the subordinate groups as inferior or less worthy than the dominant group.*” Meskipun demikian, hal itu tidak terjadi, baik di Jember maupun di kawasan Tapal Kuda lain.

Di dalam masyarakat plural seperti di Jember, setiap entitas budaya harus rela saling membongkar dan membuka diri ketika mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk hidup bersama dalam situasi berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Kesadaran masyarakat Jember sebagai masyarakat plural, yang di dalamnya terdiri atas berbagai etnis dan kultur, dapat tumbuh dan berkembang karena mereka secara *de facto* berada dalam situasi plural dalam jangka waktu relatif lama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perspektif kultural mereka secara alamiah mengarah pada

pluralisme dan multikulturalisme. Hal ini sudah terjadi di Jember sejak lama, yaitu Orang Jawa bisa menikmati sate Madura atau rujak Madura, sementara orang Madura bisa menikmati sate Ponorogo atau pecel Madiun. Kedua contoh ini merupakan wujud sederhana pluralisme budaya konsumen.



Bab 4

Pluralisme, Multikulturalisme, dan Pendalungan

Masyarakat Pendalungan di Tapal Kuda adalah masyarakat multikultur yang telah mengalami proses transformasi dari masyarakat lama yang bersifat tradisional menjadi masyarakat baru yang relatif modern. Mereka telah belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman. Secara sosiologis, masyarakat Pendalungan dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memilih untuk lebih menekankan peran rasionalitas serta ekonomi pasar. Dalam bidang politik sebagian besar masyarakat Pendalungan berafiliasi pada parpol keagamaan, sedangkan sebagian lainnya memilih parpol yang dinilai nasionalis.

Apa yang terjadi di wilayah Tapal Kuda ini tidak aneh atau menyimpang. Pada skala yang lebih besar, Indonesia sebagai negara multikultur mengalami hal yang sama. Di Indonesia persoalan multikulturalisme mendapat porsi perhatian yang makin besar dari waktu ke waktu. Hefner (2001) mengilustrasikan Indonesia, seperti halnya Malaysia dan Singapura, sebagai suatu negara yang memiliki warisan dan tantangan pluralisme budaya (*cultural pluralism*) yang lebih mencolok dibanding dengan negara-negara lain. Ketiganya dipandang sebagai lokus klasik bagi bentukan baru masyarakat majemuk (*plural society*). Pernyataan Hefner tersebut tidak berlebihan

karena Indonesia dan negara-negara tetangga memiliki sejarah panjang mengenai pluralisme budaya, bahkan jauh sebelum negara-negara tersebut merdeka.

Suatu kawasan multikultural terbentuk karena proses migrasi berbagai etnik yang biasanya berlangsung secara bertahap dan dalam waktu yang relatif lama. Migrasi penduduk dari berbagai penjuru wilayah dalam jumlah yang cukup besar pada akhirnya membentuk suatu masyarakat multietnik. Masyarakat yang dalam prosesnya tersusun atas dasar keanekaragaman etnik beserta kebudayaannya ini kemudian melahirkan masyarakat majemuk (*plural society*). Peran serta setiap etnik beserta kebudayaan mereka yang berbeda dalam membangun kemajuan suatu masyarakat pada umumnya diterima, diakui, dan diberi tempat. Peran tersebut dianggap wajar, bahkan sering kali dianggap memperkaya dan memberikan ciri khas. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya konsep multikulturalisme di sejumlah negara maju. Di Indonesia konsep ini menemukan bentuknya yang khas: *bhinneka tunggal ika*.

Pemahaman terhadap multikulturalisme Pendalungan akan lebih utuh dan mendasar jika dimulai dari pemahaman terhadap situasi multikulturalisme nasional. Selanjutnya, untuk dapat menangkap, merasapi, dan menganalisis secara komprehensif berbagai persoalan kultural yang ada pada masyarakat lokal di Indonesia yang majemuk, kita perlu memahami setidaknya dua hal substantif, yakni (1) persoalan apakah yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh masyarakat lokal dan (2) teori apa yang dapat mendukung kita dalam mengurai, menjelaskan (dan apabila perlu mengatasi) persoalan tersebut. Dalam upaya memahami dinamika budaya masyarakat multikultur Pendalungan, misalnya, perspektif antropologi dapat menolong kita.

Dari cara pandang antropologi, berdasarkan kehidupan tradisionalnya, masyarakat Nusantara—termasuk di dalamnya masyarakat Pendalungan—dapat dikategorikan sebagai suatu masyarakat arkais, yaitu masyarakat yang memiliki karakter sebagaimana diidentifikasi Eliade (2002) berikut.

- 1) Kosmologi menduduki tempat utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pandangan tentang kehidupan dan dunia membentuk satu kesatuan dan keseluruhan yang organik.
- 2) Hampir keseluruhan pemikiran mereka pertama-tama diungkapkan dalam bentuk simbol. Mereka tidak membedakan mitos dengan sejarah. Tidak ada anggapan bahwa sejarah hanya sebagai sejarah. Sebaliknya, sejarah sebagai sesuatu yang bertugas mengungkapkan kejadian-kejadian suci.
- 3) Memiliki tingkah laku yang bersifat eksistensial. Artinya, praktik-praktik dan kepercayaan religi selalu berpusat pada masalah-masalah fundamental kehidupan manusia.
- 4) Kehidupannya merupakan suatu sakramen. Realitas yang paling utama adalah Yang Suci (Kudus). Mereka hidup di alam semesta dan berada di bawah pengaruh Yang Suci. Mereka memiliki keinginan yang dalam untuk tinggal dalam suatu dunia yang suci bersama Yang Suci. Oleh karena itu, mereka kelihatan sangat religius.

Sifat-sifat umum masyarakat Nusantara sebagaimana yang telah diidentifikasi Eliade (2002) tersebut dapat menjadi landasan awal bagaimana kita sebaiknya memandang dan memahami masyarakat Pendalungan yang heterogen.

Secara garis besar, proses percampuran suatu masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni asimilasi, *melting pot*, dan multikultural. Ketiga pengelompokan ini tidak pernah bersifat solid dan baku, tetapi bersifat gradual dan bahkan tidak jarang bersifat parsial. Proses interaksi budaya pada tiap-tiap daerah dipengaruhi oleh berbagai hal yang khas sehingga tidak perlu menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Kalaupun pada akhirnya ada pernyataan yang bernada menggeneralisasi keadaan dan sifat-sifat suatu masyarakat, biasanya hal itu hanyalah suatu cara sederhana untuk mengawali pemahaman terhadap masyarakat yang bersangkutan.

Tiga model pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan pengembangan relasi etnis adalah asimilasi, *melting*

pot, dan pluralisme kultural (multikulturalisme; Giddens, 1995). Pada pendekatan asimilasi, etnis mayoritas dan minoritas dianggap sebagai entitas yang terpisah. Demi tercapainya integrasi, etnis minoritas beserta seluruh atribut kebudayaan yang dimilikinya harus melebur ke dalam mayoritas. Ciri-ciri khas si minoritas harus direlakan untuk memudar. Sementara itu, pada pendekatan *melting pot*, berbagai etnis beserta kebudayaannya bercampur baur, melebur, dan selanjutnya menghasilkan suatu entitas kebudayaan baru. Selanjutnya, pada model pendekatan multikultural, berbagai keanekaragaman budaya dianggap sebagai suatu kekayaan yang harus dipelihara dan dilestarikan. Relasi sosiokultural yang disarankan pada model multikultural adalah pada tataran persentuhan untuk mencapai pemahaman atas keanekaragaman tersebut, bukan si mayoritas mendominasi si minoritas, apalagi si mayoritas melumat si minoritas.

Masyarakat dikatakan bersifat majemuk apabila secara struktural memiliki sub-sub yang bersifat *diverse*, yakni memiliki perbedaan secara substansial. Masyarakat seperti ini biasanya ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus. Hal ini disebabkan oleh sistem nilai unit-unit sosial yang tercakup di dalamnya dan menjadi elemen-elemen pendukungnya, termasuk para anggota unit-unit sosial itu, menganut sistem nilai-nilainya sendiri secara eksklusif dan kokoh dalam bentuk yang relatif murni. Situasi ini sering ditandai dengan munculnya gesekan dan konflik-konflik sosial atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan rasa saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagianya (Wasino, 2011).

Masyarakat plural, sebagai masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda, tentu saja rentan menghadapi berbagai benturan, perselisihan, dan ancaman perpecahan sosial. Oleh sebab itu, pemerintah harus jeli dalam menentukan platform yang harus diterapkan dalam menangani masyarakat plural agar terhindar dari adanya kesan etnosentrism, pilih kasih, dan tidak adil. Di samping itu, platform yang tepat juga dapat menjauhkan masyarakat plural dari konflik sosial, baik konflik vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, platform yang dipilih pemerintah harus bersumber pada

konsensus dan nilai bersama masyarakat, baik secara simbolis maupun fungsional memiliki daya rekat sekaligus daya dorong yang kuat.

Istilah multikulturalisme sering dipersamakan dengan pluralisme. Namun, sesungguhnya pengertian masyarakat plural (majemuk) cukup berbeda dengan masyarakat multikultural (keragaman budaya). Penekanan masyarakat plural adalah persoalan etnisitas, sedangkan dalam masyarakat multikultural mencuat anggapan bahwa keanekaragaman budaya ialah suatu aset yang harus dijaga dan dilestarikan. Perspektif yang dikembangkan pada masyarakat multikultural adalah tata sosial yang toleran serta dialektika budaya yang kreatif dan konstruktif.

Multikulturalisme berasal dari kata *multi-* (banyak) dan *kultural* (budaya), yang secara sederhana berarti keberagaman budaya. Walaupun demikian, makna budaya yang dikandungnya memiliki cakupan luas. Budaya adalah seluruh perangkat aktivitas manusia yang membuatnya bermakna, seperti agama, olah pemikiran, bahasa, dan kesenian. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang dianggap ideal karena mengakui dan merayakan perbedaan dalam kesetaraan, baik perbedaan individual maupun kelompok berdasarkan perspektif budaya. Ideologi ini merupakan sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme atau keanekaragaman budaya berdasarkan atas perbedaan-perbedaan secara kultural sebagai sebuah corak tatanan kehidupan masyarakat (Suparlan, 2002).

Dengan cakupan yang luas dan kandungan yang beraneka nilai tersebut, multikulturalisme berpotensi menjadi ranah konflik sosial jika tidak dikelola dengan benar. Artinya, multikulturalisme adalah kekayaan yang mudah menjebak dan menjerumuskan. Oleh karena itu, segenap energi multikultural masyarakat harus didorong untuk berkembang ke arah yang positif dan produktif. Jangan sampai menjadi energi yang justru destruktif, bahkan anarkis. Karena multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sekaligus menjadi sebuah wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsi bagi kehidupan manusia (Suparlan, 2002).

J. S. Furnivall (1967) meletakkan dasar teori masyarakat majemuk berdasarkan penelitiannya mengenai masyarakat Indonesia (Jawa) dan Burma pada tahun 1948. Furnivall (1967), secara lugas mengatakan bahwa masyarakat plural atau majemuk merujuk pada masyarakat campuran yang terdiri atas berbagai etnis. Namun, konsep campuran ini terbatas dalam arti pergaulan antaretnis. Sebagai individu, setiap orang dalam masyarakat bisa saja bertemu, tetapi hal itu hanya dapat terjadi di pasar dalam konteks jual beli. Setiap kelompok masyarakat menjalankan agama, kepercayaan, tradisi, bahasa, ideologi serta cara hidupnya sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain, tetapi tetap berada di dalam suatu unit politik yang sama. Bahkan, di bidang ekonomi ada pembagian kerja berdasarkan ras. Di samping itu, penjelasan Geertz (1973)—yang perlu menjadi catatan kita—juga telah menjelaskan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terbagi atas subsistem-subsistem yang lebih kurang berdiri sendiri dan dipersatukan oleh ikatan-ikatan primordial.

Sebagai suatu produk kesadaran sosial dan politik, pluralisme masyarakat membutuhkan syarat yang tidak bisa ditawar, yakni modal budaya. Jika suatu masyarakat plural di suatu daerah tidak menyadari bahwa modal budaya sungguh-sungguh diperlukan sebagai dasar pemahaman untuk menjadi pluralistik, akan terjadi banyak masalah ikutan yang muncul di belakang mereka. Otonomi daerah, misalnya, merupakan kebijakan politik yang didasarkan pada kesadaran sekaligus penghargaan terhadap pluralisme. Oleh sebab itu, jika dasar budayanya belum dikelola dan disiapkan secara memadai, berbagai masalah akan silih berganti membuntuti.

Terdapat banyak tempat di dunia ini yang menjadi ajang percampuran etnis. Salah satu contoh terbaik *melting pot* adalah migrasi yang dilakukan masyarakat dari berbagai penjuru dunia menuju Amerika Serikat—yang oleh Kivisto (2014) diibaratkan sebagai magnet yang menarik para imigran dari seluruh dunia. Meskipun berasal dari Amerika Latin, Karibia, atau Asia, kini mereka menganggap diri mereka sebagai orang Amerika Serikat. Persinggungan kultural di antara etnis-etnis yang tinggal di wilayah

tersebut dapat menghasilkan nilai-nilai baru yang unik. Di sejumlah negara bagian Amerika Serikat, multikulturalisme diadopsi secara resmi dan dijadikan sebagai kebijakan pemerintah sejak tahun 1970-an. Multikulturalisme (*multiculturalism*) sebagai filosofi adalah bagian dari pergerakan pragmatisme (*pragmatism*) pada akhir abad ke-20 di Eropa dan Amerika Serikat, kemudian secara politik dan kebudayaan dikenal sebagai pluralisme (*pluralism*).

Di Indonesia, orang-orang Cina yang berimigrasi dari negeri Tiongkok ke Indonesia menetap secara berkelompok di suatu tempat yang kemudian disebut pecinan. Sementara itu, orang-orang Arab juga memilih tinggal berkelompok di kampung Arab.

Dalam perkembangan selanjutnya, mereka mewujudkan kehidupan dalam suatu kebudayaan yang unik, hasil percampuran antara kebudayaan yang mereka bawa dari negeri leluhurnya dengan kebudayaan masyarakat di mana mereka kini tinggal. Meskipun tetap tinggal berkelompok dengan sesama etnis, mereka tidak bisa menghindar dari tata pergaulan yang lebih luas, khususnya dengan masyarakat setempat.

Di negara multietnik yang memilih fondasi ideologi demokrasi seperti Indonesia, mengembangkan kesadaran pluralisme merupakan suatu keniscayaan pilihan yang tak terhindarkan. Sungguhpun demikian, hal ini bukannya tanpa masalah. Konsep demokrasi mengandaikan masyarakat sebagai suatu entitas yang homogen dan egaliter, sedangkan pluralisme berangkat dari keberagaman budaya yang hidup dalam lingkungan yang demokratis tersebut. Dengan demikian, wajarlah jika kemudian pluralisme menjadi sebuah isu baru dalam demokrasi dengan fokus khusus, antara lain hak-hak warga minoritas di tengah-tengah warga mayoritas. Pada masyarakat demokratis yang telah berhasil mengembangkan sikap toleran, tujuan yang ingin mereka capai adalah posisi sosiokultural minoritas yang sama nyamannya dengan mayoritas.

Setiap entitas pada masyarakat plural sudah selayaknya rela untuk saling membuka diri dan membongkar sekat-sekat pembatas etnisitas. Hal ini diperlukan dalam rangka mencari sesuatu yang bisa dijadikan

sebagai fondasi atau dasar pijakan bersama untuk hidup harmonis dalam situasi berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Mereka secara perlahan-lahan harus mengarahkan orientasi nilai-nilai yang dianut pada kondisi multikultural. Oleh sebab itu, mengapa problematika multikulturalisme menjadi problem khas masyarakat majemuk. Jakarta dan Surabaya adalah contoh ideal ladang persemaian konsep multikulturalisme. Di kedua kota metropolitan ini masyarakat dari berbagai etnis dan latar kebudayaan datang bergabung untuk mencari penghidupan. Pada akhirnya, mereka harus secara bersama-sama membangun identitas kultural dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya. Dengan menggunakan cara seperti itulah, mereka mendeklarasikan kebersamaan.

Sebagaimana dijelaskan Abdullah (2006) bahwa dalam suatu lingkungan multiethnik yang memiliki ekspresi etnisitas dan asal-usul yang berbeda-beda pasti berkembang suatu simbol universal yang dapat dikode atau dibaca, paling tidak, oleh hampir semua etnis. Dengan simbol inilah mereka dapat memelihara sistem sosial yang terintegrasi. Simbol-simbol komunikasi yang mereka bangun bersama-sama tentu saja ditanamkan dan dipelihara dalam suatu ruang publik (*public space*) yang keberadaannya juga telah dinegosiasikan dalam serangkaian interaksi.

Dalam interaksi sosial antaretnis semacam itu, simbol-simbol tersebut dapat saling dipertukarkan yang menyebabkan terjadinya penyerapan dan pengayaan ekspresi kebudayaan suatu etnis dalam lingkungan permukiman tertentu. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan tidak selalu menimbulkan konflik antaretnis. Bahkan, terjadinya persinggungan antaretnis ini dapat memperkaya tiap-tiap pihak dengan penguasaan bahasa, pengembangan kepribadian, pengayaan wawasan, pendewasaan, dan berbagai praktik sosial yang lebih kaya dengan nilai. Dengan memperhatikan konteks semacam ini, perlu ditegaskan bahwa bukan hanya basis konflik yang patut menjadi isu penting dalam hubungan antaretnis, melainkan juga basis-basis akomodasi sosial yang memungkinkan terjadinya pembauran.

A. Menjaga Pluralisme dan Multikulturalisme

Multikulturalisme telah diperaktikkan oleh masyarakat Pendalungan sejak lama, bahkan jauh sebelum memasuki era kemerdekaan. Orang-orang dengan berbagai latar belakang datang ke kawasan Tapal Kuda dengan tujuan yang sama, yakni untuk memperoleh perbaikan hidup. Mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang sama, mara bahaya yang sama, serta kesempatan yang kurang lebih sama pula. Tidak mengherankan jika dalam kondisi yang demikian, multikulturalisme diterima dan disepakati sebagai landasan bermasyarakat dan akhirnya dianggap sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan sosial di lingkungan yang multibudaya. Kondisi masyarakat yang multikultural tersebut, suka atau tidak suka, akan memberi pengaruh pada berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam membangun masyarakatnya.

Masyarakat Madura dan Jawa memiliki *cultural platform* yang sama, yakni agama Islam. Oleh karena itu, kedua masyarakat tersebut mempunyai potensi akulturasi yang cukup tinggi. Pada tataran individu, akulturasi itu bisa terjadi pada ranah kepribadian, misalnya sikap toleran, keberanian bertindak, sopan santun, dan keterbukaan. Masyarakat Jawa dan Madura akan lebih mudah berakulturasi karena mereka jelas-jelas mempunyai nilai-nilai dasar yang sama, dibanding dengan akulturasi antara masyarakat Jawa dan Bali atau masyarakat Madura dan Tionghoa.

Akulturasi, sebagai suatu proses sosial, dapat terjadi pada tataran individu karena seluruh elemen budaya pada dasarnya merupakan hasil konstruksi secara simultan antara individu dan sosial. Jika seseorang secara individual berperilaku atas dasar nilai-nilai, kepercayaan, dan norma yang disepakati bersama oleh suatu masyarakat, misalnya masyarakat Jawa, dia boleh dianggap sedang mengusung budaya Jawa. Demikian pula sebaliknya, jika tidak menunjukkan perilaku, nilai-nilai, kepercayaan, dan norma yang dianut masyarakat Jawa, dia tidak bisa dianggap sedang mengusung budaya Jawa.

Masyarakat multikultural biasanya memiliki media atau saluran komunikasi massa yang mencerminkan keberagaman masyarakat

tersebut, misalnya program-program acara radio yang disampaikan dalam bahasa daerah. Di Jember hampir semua radio memiliki acara berbahasa Jawa, Madura, dan Using. Di Radio Soka ada acara “Warung 51” yang berbahasa Jawa; di Radio Suara Akbar ada acara “Mitra Jawilan” yang juga berbahasa Jawa dan telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Sementara itu, Di RRI Programa 1 Jember juga ada acara sejenis.

Multikultur itu bukan sekadar penghormatan terhadap hak-hak kultural setiap kelompok masyarakat. Malah multikultur juga berisi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, secara bersama-sama, untuk mereduksi segala sesuatu yang dapat membahayakan atau menghancurkan keharmonisan masyarakat. Sebagai contoh, etnis keturunan Tionghoa telah berada di Indonesia secara turun-temurun sejak zaman kolonial. Banyak di antara mereka yang sukses menjadi pengendali ekonomi di berbagai kota di Indonesia, bahkan hampir semua sektor ekonomi, mulai dari sektor produksi hingga distribusi mereka kuasai. Namun, rupanya mereka kurang belajar dari sejarah. Akibatnya, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, timbul kesan bahwa mereka kurang menyatu dengan masyarakat pribumi. Oleh sebab itu, masyarakat umum banyak yang merasa tidak suka. Akumulasi dari ketidaksukaan itu, antara lain adalah kerusuhan 1998 ketika etnis keturunan Tionghoa menjadi sasaran utama kebencian masyarakat. Etnis Tionghoa di Indonesia hingga sekarang cenderung dipandang sebagai *orang asing* atau *bukan pribumi* meskipun mereka telah turun-temurun berada di Indonesia.

Hal seperti ini tidak terjadi pada etnis keturunan Arab atau India yang juga datang dari luar Indonesia. Kemungkinan kedua etnis ini lebih mudah menyatu karena faktor agama yang sama dengan masyarakat setempat atau tingkat penguasaan mereka terhadap ekonomi dianggap tidak berlebihan. Meskipun di seluruh kawasan Tapal Kuda jumlah etnis Tionghoa hanya kecil saja, seperti di tempat-tempat lain, mereka memiliki andil cukup besar dalam proses pembentukan sosial-budaya masyarakat karena keunggulan mereka di bidang ekonomi walaupun kemungkinan terjadinya sentimen ras tetap terbuka.

Memang secara umum selama ini tidak ada gejolak atau konflik sosial yang secara mendasar mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat Pendalungan. Meskipun demikian, jika dijadikan sebagai indikator stabilitas sosiokultural kawasan, jelas hal itu menyesatkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila semua pihak menjaga semangat multikultur secara terus-menerus. Kerukunan harus disemaikan agar tumbuh pemahaman bahwa setiap ekspresi kebudayaan memiliki nilai guna bagi setiap pemiliknya. Tidak ada ordinat atau superordinat atas satu budaya dibanding dengan budaya lainnya. Keragaman budaya dengan demikian bisa menjadi modal sosial dan tidak ada alasan untuk saling menegaskan.

B. Pendalungan: Masihkah Sebuah Proses?

Tafsir mengenai suatu kebudayaan, termasuk dalam hal ini budaya Pendalungan, bisa saja bersifat personal. Oleh karena itu, hasilnya bisa berbeda antara satu tafsir dan tafsir lainnya, bahkan bisa bertentangan selama tidak mengatasnamakan masyarakat luas. Jika seseorang mengajukan sebuah tafsir dengan mengatasnamakan masyarakat, kemudian tafsir tersebut ditolak oleh salah satu elemen masyarakat yang bersangkutan, berarti tafsir tersebut bermasalah. Hal ini perlu penulis perjelas di sini karena dalam menggambarkan budaya Pendalungan, penulis tidak berdiri atas nama, atas persetujuan, atau atas permintaan pemerintah daerah.

Ada persoalan penting yang harus penulis garis bawahi ketika penulis melakukan penelitian—termasuk di dalamnya upaya menafsirkan—budaya Pendalungan, yakni adanya fakta bahwa Pendalungan sebagai suatu entitas kultural dibangun berdasarkan pluralitas budaya. Ada kemungkinan tafsir yang penulis hasilkan juga bersifat plural dan primordial. Demikian pula tafsir orang lain mengenai Pendalungan. Memang setiap penafsir boleh saja menolak atau setidaknya tidak membenarkan tafsir pihak lain. Namun, penafsir tidak boleh menyalahkan tafsiran lain sejauh tafsir tersebut disertai argumentasi yang memadai. Setiap pihak harus menerima tafsir pihak lain sebagai suatu realitas yang berbeda. Dunia ini secara fisik penuh

kekurangan dan keterbatasan, tetapi ide, perspektif, serta pikiran manusia mampu menjangkau wilayah tanpa batas.

Harus penulis akui bahwa tidak mudah menjelaskan apa yang selama ini penulis konsepsikan sebagai masyarakat dan kultur Pendalungan. Meskipun kata kuncinya adalah relasi antaretnis, pada praktiknya hubungan antaretnis selalu bersifat kompleks dan bukan sekadar penjelasan hitam putih tentang asal-usul geografis serta genealogis etnis masing-masing. Penjelasan juga harus mencakup elemen-elemen lain yang menjadi sumber pembentukan identitas lainnya, seperti kondisi lingkungan alam, agama, pendidikan, pekerjaan, dan bahkan afiliasi politik. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut Geertz (1973) sebagai *thick description* atau paparan mendalam, bukan *thin description* atau paparan sempit tanpa unsur interpretasi. Deskripsi mendalam semacam itu berguna untuk membantu siapa saja yang ingin memahami masyarakat dan kultur Pendalungan secara lebih komprehensif, lebih mendalam hingga ke akar-akarnya yang tidak tampak di permukaan.

Penulis perlu membahas selintas mengenai suku Betawi di sini sebagai contoh kasus. Hal ini diperlukan agar pemahaman kita terhadap proses pembentukan masyarakat Pendalungan lebih mudah. Beberapa peneliti beranggapan bahwa masyarakat Betawi yang kita kenal saat ini berasal dari hasil percampuran antaretnis dan bangsa pada masa lalu, baik sebelum maupun saat era kolonial. Secara biologis, mereka, yang menyatakan dirinya sebagai orang Betawi, adalah produk percampuran aneka suku dan bangsa yang datang dengan kehendak sendiri atau yang sengaja didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Batavia. Shahab (1997) memperkirakan bahwa etnis Betawi baru terbentuk antara tahun 1815–1893. Sebelumnya, dalam pergaulan sehari-hari penduduk asli Jakarta mengidentifikasi dirinya sebagai orang Melayu atau menurut lokasi tempat tinggal mereka, seperti orang Kwitang, orang Kemayoran, orang Tanah Abang, dan seterusnya. Setelah tahun 1970-an, yang merupakan titik balik kebangkitan kebetawian di Jakarta, terjadilah pergeseran predikat dari Melayu ke Betawi. Orang-orang yang dulu menyebut

dirinya sebagai orang Melayu akhirnya menyebut dirinya sebagai orang Betawi. Jika dilacak ke masa-masa sebelumnya, munculnya kesadaran mengenai keberadaan orang Betawi, sebagai sebuah kelompok etnis dan satuan sosial serta politik, diawali pada tahun 1923. Ketika Muhammad Husni Thamrin, salah satu tokoh pergerakan masyarakat Betawi, mendirikan organisasi Pemoeda Kaoem Betawi. Masyarakat Betawi tersadar bahwa sesungguhnya mereka merupakan sebuah suku tersendiri, yakni suku Betawi.

Pada hakikatnya, proses pembentukan masyarakat Betawi sebagai sebuah etnis tidak jauh berbeda dengan pembentukan masyarakat Pendalungan. Yuswadi (2001) menganggap konsep Pendalungan adalah konsep lokal yang masih belum jelas maknanya secara definitif. Konsep ini digunakan untuk menunjukkan adanya percampuran budaya antaretnis, terutama etnis Jawa dan Madura di wilayah Jawa Timur, yang kemudian melahirkan proses hibridisasi budaya. Dalam hemat penulis, penyebutan *orang Jawa* atau *orang Madura*, bukan hanya merujuk pada seseorang yang berbahasa Jawa atau Madura, melainkan orang yang secara total menjadikan Jawa atau Madura sebagai fondasi identitas kultural sepanjang hidupnya.

Persoalan pemakaian istilah Pendalungan ini penulis anggap penting karena secara teoretis dapat digunakan sebagai sebuah konsep untuk memahami sekaligus menjelaskan realitas kebudayaan masyarakat multietnik, khususnya yang berada di Jawa Timur bagian timur yang terdiri atas mayoritas etnis Madura dan Jawa. Dengan demikian, masyarakat Pendalungan adalah suatu “realitas imajiner” yang sesungguhnya dibangun dalam kerangka politik kebudayaan.

Riwayat hubungan masyarakat Jawa dan Madura telah berlangsung sejak lama. Kitab *Pararaton*⁶ menceritakan tentang seorang Demang Nayapati di Singasari yang bernama Banyak Wide, dengan gelar Arya Wiraraja, yang tidak disukai oleh pihak istana Singasari sehingga dijauhkan dan menjadi adipati di Sumenep (pada masa lalu disebut

⁶ *Pararaton*, atau *Serat Pararaton*, adalah sebuah naskah mitologis yang ditulis dalam bahasa Jawa Kawi, berisi silsilah raja-raja Singasari dan Majapahit. Tidak ditemukan petunjuk siapa penulis kitab ini.

Songennep). Peristiwa itu terjadi setelah Raja Wisnuwardhana mangkat dan kedudukannya sebagai raja digantikan oleh putranya, yakni Kertanegara. Selanjutnya, Arya Wiraraja bersama orang-orang Madura membantu Raden Wijaya membangun Majapahit di Hutan Tarik.

Beberapa prasasti, seperti Prasasti Mulamalurung (1255), Piagam Kudadu (11 September 1294), dan Prasasti Sukamerta (29 Oktober 1295), menyebutkan peristiwa penting mengenai jalannya pengungsian Raden Wijaya ke Madura, kemudian bertemu dengan Arya Wiraraja di daerah perbatasan Sumenep. Arya Wiraraja menyarankan pada Raden Wijaya agar kembali ke Jawa lantas berpura-pura patuh, tunduk, meminta ampun, dan menghamba kepada Raja Jayakatwang. Kelak jikalau sudah dipercaya, hendaknya minta diberikan Hutan Tarik, lalu mendirikan desa di tempat itu. Para kawula, yang akan melaksanakan penebangan hutan untuk dijadikan desa, berasal dari Madura. Jumlah kawula dari Madura yang terlibat dalam proses tersebut tentunya tidak sedikit. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada akhirnya banyak warga Madura yang tersebar dan tinggal di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Sebagian dari kawasan pesisir utara Jawa Timur didiami oleh masyarakat Madura, mulai dari pesisir Gresik, Surabaya, Bangil, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, hingga Banyuwangi. Bahkan, di beberapa kawasan pesisir pantai selatan, seperti Jember, Lumajang, dan Malang, juga didiami masyarakat Madura meskipun jumlahnya tidak sebanyak di kawasan pantai utara. Tempat-tempat tersebut telah menjadi kampung halaman orang-orang Madura yang pada saat ini sebagian besar sudah tidak punya lagi sangkut paut dengan Pulau Madura atau masyarakat Madura di Pulau Madura. Bersama masyarakat Jawa yang berada di wilayah tersebut, tak pelak lagi mereka telah berinteraksi secara intens dan menjadi orang-orang Pendalungan.

Faktor utama yang mendasari terwujudnya suatu masyarakat campuran, yang kemudian kita sebut sebagai masyarakat Pendalungan, adalah migrasi. Jika yang menjadi daya tarik utama para pendatang untuk mengadu nasib di Amerika Serikat adalah pertumbuhan

ekonomi negeri tersebut yang melesat begitu pesat, keperawan dan kesuburan kawasan Tapal Kuda adalah magnet yang menjadi pemikat orang-orang Madura dan Jawa untuk datang dan menghuni wilayah ini. Selain itu, tidak sedikit di antara mereka yang sengaja datang karena direkrut untuk dipekerjakan di perkebunan. Tentu saja masyarakat Madura dan Jawa yang berkonteks pertanianlah yang pertama-tama tertarik pada keperawan dan kesuburan tanah.

Orang-orang Jawa datang ke kawasan ini karena tersedianya lahan yang masih kosong dan subur, sedangkan orang-orang Madura datang karena di tempat asal mereka tanah pertanian tidak subur, sementara di sini tanah begitu subur serta masih banyak yang kosong, belum tergarap. Latar belakang yang sama tersebut mempermudah jalan menuju terjadinya percampuran budaya di antara kedua belah pihak, kemudian diperkaya oleh pihak-pihak lain yang menyertai di kemudian hari. Oleh karena itu, terjadilah kemajemukan dalam kehidupan beragama, sosial, dan budaya di lingkungan baru yang didiami oleh para pendatang tersebut. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa proses integrasi kultural yang terjadi di wilayah Tapal Kuda berlangsung secara gradual dan lama. Mereka itulah yang, antara lain, kita sebut sebagai orang-orang Pendalungan. Para pionir Pendalungan.

Dalam perspektif budaya, menurut Sutarto (2006), yang disebut masyarakat Pendalungan adalah masyarakat hibrida, yakni masyarakat berbudaya baru akibat terjadinya percampuran dua budaya dominan. Dalam konteks kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, budaya Pendalungan adalah percampuran antara dua budaya dominan, yakni budaya Jawa dan budaya Madura. Dalam konteks geopolitik dan geososiokultural, masyarakat Pendalungan merupakan bagian dari masyarakat Tapal Kuda (Sutarto, 2006). Artinya, masyarakat hibrida Jawa-Madura ada di banyak tempat, tetapi yang berada di kawasan Tapal Kuda sajalah yang dapat disebut sebagai masyarakat Pendalungan. Penyebutan yang berlaku secara spesifik ini lebih ditujukan sebagai upaya menandai keberadaan masyarakat multikultur di kawasan Tapal Kuda sebagaimana kita menandai masyarakat multikultur di Jakarta yang kita sebut sebagai masyarakat Betawi.

Wahjono (2011) memiliki penjelasan yang agak berbeda. Menurutnya, masyarakat Pendalungan adalah sekumpulan orang dengan latar budaya campuran Jawa-Madura. Mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) orang Jawa yang telah dibesarkan di desa-desa di Pulau Madura, (2) keturunan dari perkawinan Jawa-Madura, dan (3) orang-orang Madura yang bermigrasi ke Jawa dengan menyeberangi Selat Madura. Kelompok pertama berbicara menggunakan bahasa Madura dan Jawa secara bergantian yang pada akhirnya secara tidak sengaja melahirkan bentuk bahasa baru hasil asimilasi kedua bahasa tersebut. Adapun kelompok kedua terbentuk secara historis sejak 1671 ketika seorang bangsawan Madura bernama Trunojoyo menghadiahkan gadis-gadis Madura kepada prajurit Jawa yang bergabung dengannya untuk melawan Mangkurat I, raja yang sedang berkuasa di Mataram (1646–1677, putra Sultan Agung). Sementara itu, kelompok ketiga adalah orang-orang Madura yang sekarang ini tinggal di kota-kota di wilayah Tapal Kuda. Masyarakat Pendalungan Pasuruan pada umumnya adalah orang-orang Madura yang berasal dari daerah Bangkalan, masyarakat Pendalungan Probolinggo berasal dari daerah Sampang dan Pamekasan, sementara masyarakat Pendalungan Situbondo berasal dari daerah Sumenep.

Berbagai dimensi kehidupan dalam diri masyarakat Pendalungan, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun religi, cenderung membentuk anyaman multikultural. Mereka tidak membangun identitas kultural dengan cara melenyapkan berbagai kekhasan kultur lokal dan etnik, tetapi justru memanfaatkan unsur-unsur lokal dan etnik sebagai kekuatan penopang. Bagi Raharjo (2006), Pendalungan tak ubahnya sebagai sebuah *orquestra multikultural* yang berjalan dengan harmonis dan dinamis.

Masyarakat Pendalungan pada umumnya mewarisi watak khas Madura, yaitu keras, temperamental, tangguh, pekerja keras, dan juga setia. Di kalangan masyarakat Madura dikenal istilah *caken kyaenah* (apa kata pak kiai). Hal ini tetap menjadi pegangan hidup sebagian masyarakat hingga kini. Masyarakat keturunan Jawa di Jember ada yang mengikuti pandangan demikian dan mengatakan

apa jare kiae. Menurut Lombard (2000), agama Islam di kalangan masyarakat Madura merupakan faktor identitas yang penting dan mereka menolak perilaku kompromistik orang Jawa. Orang Madura secara umum dikenal memiliki sikap berterus terang (blak-blakan), sedangkan orang Jawa secara umum dikenal bersikap tertutup (*mendhem jero*). Sementara itu, sifat-sifat Jawa lainnya juga masuk dalam diri mereka, seperti sifat *titis*, *temen*, dan *tatag* (Wahjono, 2011). *Titis* berarti fokus, tepat sasaran, langsung pada yang dituju, serta efektif dan efisien. Dengan watak ini seseorang bisa menghindari pemborosan. *Temen* adalah sikap bersungguh-sungguh, jujur, tulus ikhlas, dan tekun. Sikap ini menjadikan seseorang dapat dipercaya. *Tatag* berarti tabah dan mantap dalam menghadapi perkara sesulit apa pun, berusaha menyelesaiannya, dan berani menerima hasilnya.

Orang-orang Pendalungan mayoritas beragama Islam. Namun, dapat dikatakan bahwa tingkat pengamalan keislaman mereka rata-rata masih berada di tataran syariat. Mereka sangat mencitacitakan untuk bisa pergi berhaji ke tanah suci Makkah. Selain untuk menunaikan rukun Islam, menjadi *seorang haji* dianggap sebagai suatu pencapaian status sosial yang tinggi. Oleh karena itu, mereka berjuang keras, bahkan sering *kelewatan* keras karena setelah bisa berhaji dan pulang dari Makkah, para tetangga dan handai taulan akan memanggil mereka dengan sebutan “Ji” atau “Pak/Bu Haji”.

Orang-orang Pendalungan sering menyebut dirinya sebagai masyarakat religius. Oleh karena itu, mereka menjuluki daerahnya sebagai Kota Santri. Jika dilihat dari jumlah pondok pesantren, masjid, atau musala, memang daerah Tapal Kuda mengesankan sebagai kawasan Islam. Di wilayah ini kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menemukan berbagai aktivitas keagamaan, misalnya pengajian, *yasiman*, *tahlilan*, *istigasah*, dan *khataman Al-Qur'an*. Meskipun begitu, realitas tersebut ternyata belum menunjukkan kesadaran sosial masyarakat yang islami. Toleransi mereka masih terhitung rendah maka tidak mengherankan jika kasus pencurian, pelanggaran lalu lintas, pembuangan sampah secara sembarangan, pemakaian trotoar untuk berjualan, atau penyerobotan lahan milik negara masih sering

terjadi. Masjid-masjid dan musala-musala riuh membunyikan *loud-speaker* tanpa pandang waktu. Bahkan, di Kelurahan Antirogo, Jember, terdapat sebuah masjid yang di menaranya yang menjulang tinggi terpasang lebih dari 25 buah *loud-speaker*. Masyarakat yang berada di sekitar masjid atau musala akan tinggal diam, tidak memprotes hal sensitif semacam itu, belajar ikhlas dan sabar, padahal sesungguhnya mereka selalu menggerutu secara diam-diam sepanjang waktu karena sering merasa terganggu.

Kasus *loud-speaker* ini memang hanya sebuah contoh kecil. Akan tetapi, secara makro mencerminkan keseluruhan sikap dan perilaku mayoritas orang Pendalungan. Begitu banyak anjuran moral kepada umat beragama untuk berbuat baik dan menghindari segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan serta kemungkaran, baik dalam kaitannya dengan Tuhan, sesama manusia, maupun alam lingkungan. Namun, sebagian besar masih berupa dogma yang tertulis, dibaca, dan dihafal, belum sampai pada tataran jiwa dan tindakan. Keharmonisan sosial hanya terjadi di lapis permukaan, belum sampai ke kedalamannya. Para tokoh agama (kiai dan ustaz) dan dunia pesantren ternyata hingga sekarang masih belum mampu memberi warna secara mendasar pada sisi sosiokultural seperti itu. Mereka masih sibuk berkutat pada pengartikulasian dakwah secara verbal.

Kondisi yang ada pada kalangan elite birokrasi dan politik daerah juga sama mengenaskannya. Para pejabat pemerintah dan politikus di wilayah Pendalungan lebih suka menaruh perhatian—terkadang secara berlebihan—pada kiai atau para tokoh agama lainnya. Celakanya mereka tampak enggan menaruh perhatian pada kehidupan keagamaan masyarakat. Desakan untuk menamai Jember sebagai “Kota Santri”, “Bumi Sholawat”, serta nama-nama lain yang mewacanakan Jember sebagai “Kota Islam”, misalnya, menunjukkan bahwa kualitas pemahaman mereka terhadap *religiositas* dan *keislaman* masih di level formal. Jika pemerintah daerah mengakomodasi hal-hal semacam ini, agama akan terperosok karena dimanipulasi para petualang politik untuk kepentingan politik praktis mereka. Akhirnya, agama dan para tokoh agama akan kehilangan dimensi spiritualitas dan religiositasnya di mata masyarakat.

C. Pembentukan Masyarakat Baru

Di tempat-tempat pertemuan antaretnis, semisal, di wilayah Tapal Kuda—termasuk Kabupaten Jember di dalamnya—sangat dimungkinkan terjadinya proses percampuran budaya, baik secara langsung (melalui perkawinan campuran antaretnis) maupun secara tidak langsung. Hal ini akan saling memengaruhi elemen-elemen budaya yang ada. Dari semua upaya pembacaan dan pemahaman tentang budaya Pendalungan, kesan yang muncul paling kuat adalah perpaduan antara kultur Jawa dan Madura. Dengan demikian, kata kunci untuk memahami Pendalungan adalah *percampuran* karakteristik etnis-etnis tersebut.

Secara umum, karakteristik masyarakat Pendalungan di Jember cukup berbeda dengan masyarakat di dua kabupaten tetangga, yakni Bondowoso dan Situbondo. Mayoritas penduduk di kedua kabupaten tersebut adalah orang Madura. Dalam komunikasi sehari-hari masyarakat Bondowoso dan Situbondo hampir 100% berbahasa Madura. Biasanya mereka yang tidak berbahasa Madura adalah para pendatang baru yang bekerja dan tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo pengaruh budaya Madura terasa lebih dominan. Sementara itu, di Jember pengguna bahasa Jawa dan bahasa Madura relatif berimbang sehingga atmosfer persentuhan budaya Jawa-Madura lebih bisa dirasakan. Pada umumnya orang-orang Pendalungan bertempat tinggal di daerah perkotaan (Sutarto, 2006). Sebagian besar migran Jawa bermukim di wilayah Jember bagian selatan dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Para migran Jawa itu berasal dari Kediri, Ponorogo, Malang, serta daerah-daerah Jawa Timur bagian barat lainnya. Bahkan, di antara mereka ada juga yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Sebagian besar dari mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa Madura secara aktif, tetapi sisanya hanya menguasai bahasa Madura secara pasif.

Pada perkembangan selanjutnya, Pendalungan itu bukan hanya percampuran antara dua kultur dominan Jawa dan Madura ditambah dengan kultur-kultur pendukung lainnya. Sekarang *Indonesia* sebagai

suatu entitas kultural juga turut ambil bagian dalam pembentukan masyarakat baru. Sebagian anak-anak muda, terutama di wilayah perkotaan, tidak mampu berbahasa Jawa atau Madura. Kalaupun mampu, kadarnya rendah saja. Mereka merasa lebih nyaman berbahasa Indonesia karena sejak kecil telah terbiasa diajak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia oleh orang tuanya. Meskipun demikian, mereka tetap menjadi bagian integral kebudayaan Pendalungan.

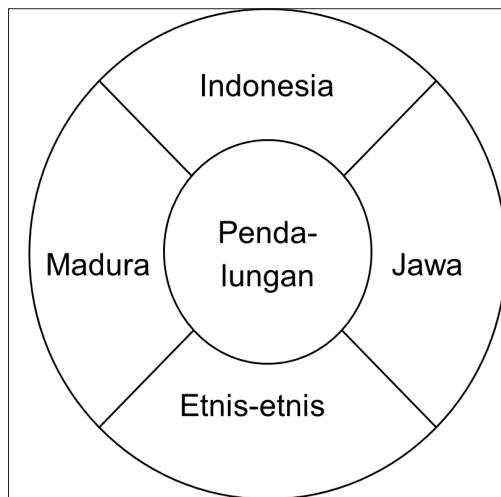
Secara ideologis sebagian besar generasi baru yang lahir di wilayah Pendalungan tidak sungguh-sungguh berafiliasi secara kuat pada kebudayaan Jawa atau Madura. Ekologi budaya Pendalungan tidak memungkinkan mereka untuk tumbuh menjadi orang *Jawa/Madura yang ideal* sebagaimana biasa dipersepsikan masyarakat. Akan tetapi, kemampuan dan kecerdasan mereka sebagai manusia pada akhirnya dapat menghasilkan suatu pemikiran dan strategi tentang bagaimana cara mengatasi keterbatasan fondasi kebudayaan tersebut. Selanjutnya, akhirnya terbukti bahwa kondisi *tidak sungguh-sungguh Jawa/Madura* tersebut merupakan sumber daya yang unik dan khas untuk masa depan kebudayaan Pendalungan.

Kondisi unik yang saya gambarkan sebagai keadaan *tidak sungguh-sungguh Jawa/Madura* seperti itu tentu saja tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang baru datang dan menetap di kawasan Tapal Kuda atau yang sudah relatif lama menetap, tetapi belum sungguh-sungguh merasa menjadi orang Tapal Kuda—mereka tetap merasa sebagai orang Tulungagung, Yogyakarta, atau dari mana saja mereka berasal. Dengan kata lain, mereka memosisikan diri mereka sebagai *the outsiders* alias orang luar. Hal semacam itulah yang menjadi penyebab kegagalan mereka untuk mengerti dan mampu memahami bagaimana sesungguhnya kondisi psikologi budaya masyarakat Pendalungan.

Secara gradual, nilai-nilai keindonesiaan akan mengisi, atau bahkan mendominasi ruang-ruang kosong dalam diri masyarakat Jember dan Pendalungan Raya. Hal ini diakibatkan oleh kesenjangan kultural pada diri mereka. Nilai-nilai keindonesiaan itu hadir secara konkret berupa bahasa Indonesia. Pada kasus-kasus semacam ini

bahasa Indonesia menghegemoni dan menginternalisasi individu-individu tanpa bisa dielakkan lagi.

Setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia berhak menjadi bagian integral sebuah etnis. Seseorang harus menjadi warga suku Jawa, Madura, Batak, atau suku lainnya. Mengapa demikian? Karena sebagai bangsa kita telah memilih *bhinneka tunggal ika* sebagai semboyan nasional kita. Dengan demikian, secara otomatis ini menjadi semboyan setiap warga negara Indonesia. Jika si polan merasa dirinya bukan orang Jawa, Madura, Batak, atau bagian dari salah satu suku di Indonesia, sesungguhnya si polan tidak menjadi bagian dari kebinekaan Indonesia. Itulah sebabnya kita merayakan identitas kultural. Kita merepresentasikan hal penting ini, antara lain, dengan cara memberi penghormatan terhadap etnisitas atau kesukuan. Gambar 4.1 memberikan ilustrasi bagaimana konsep etnisitas Pendalungan terbentuk di kawasan Tapal Kuda.



Gambar 4.1 Pertemuan Sejumlah Kebudayaan Pendukung Pendalungan

Secara garis besar masyarakat Jember menemukan bentuk sosiokulturalnya melalui tiga cara, yakni asimilasi, *melting pot*, dan multikultural. Proses ini tentu saja tidak berlangsung mendadak dan serentak, tetapi membutuhkan waktu yang lama dan bertahap. Ketiga konsep percampuran budaya tersebut secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Cara pertama, yakni asimilasi, merupakan pembauran dua kebudayaan atau lebih yang disertai dengan hilangnya ciri-ciri khas kebudayaan asli, digantikan dengan terbentuknya kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai dengan usaha-usaha mengurangi, atau bahkan menghilangkan sama sekali berbagai perbedaan di antara orang-orang atau komunitas-komunitas yang berasimilasi tersebut. Cara kedua, yakni akulturasi, merupakan suatu proses sosiokultural yang terjadi ketika suatu masyarakat beserta elemen-elemen kebudayaannya berinteraksi dengan elemen-elemen kebudayaan lain. Pada prosesnya kebudayaan lain tersebut diterima, disaring, diserap, dan diolah sedemikian rupa oleh masyarakat sehingga menjadi bagian integral dari kebudayaan masyarakat tersebut tanpa menyebabkan punahnya kebudayaan aslinya. Cara ketiga, yakni multikulturalisme, merupakan perspektif atau sudut pandang, terhadap suatu corak kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan, yang mendukung dan mengutamakan penghargaan serta penghormatan terhadap keberagaman hidup manusia, yang di dalamnya tercakup nilai-nilai, norma-norma, tradisi, serta segala aspek kehidupan lainnya.

Ketiga cara percampuran budaya tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal yang khas dan kontekstual yang ada pada masing-masing daerah. Lingkungan yang bernuansa budaya Jawa-Madura secara otomatis, dalam jangka panjang, akan membentuk masyarakat penghuninya beradaptasi pada lingkungan tersebut. Masyarakat akan terkondisi dan akhirnya memiliki habitus khas Jawa-Madura. Lingkungan yang multikultur menjadi arena dan wacana keseharian secara terus-menerus sehingga menjadikan pola pikir masyarakat Jember berbeda dengan masyarakat yang memiliki lingkungan monokultural. Jika diamati secara seksama, perbedaan tersebut akan

tampak pada seluruh aspek kehidupan mereka, baik pada pikiran, tindakan, maupun apa saja yang dihasilkan oleh pikiran dan tindakan mereka.

Khusus mengenai deklarasi atau penetapan Jember sebagai Kota Pendalungan oleh Pemerintah Kabupaten Jember,⁷ penulis memaknai hal itu sebagai suatu langkah dalam membaca keragaman etnik di wilayah ini, kemudian meramunya sehingga menjadi suatu kerangka konseptual untuk memahami sifat kultural masyarakat. Upaya pembacaan yang komprehensif semacam itu diperlukan dalam rangka *membawa Jember ke masa depan* melalui trek yang tepat. Tak pelak lagi, apa yang menjadi modal terpenting dalam upaya mengembangkan suatu masyarakat beserta kebudayaannya, tak lain dan tak bukan, adalah pengetahuan mendasar tentang masyarakat beserta kebudayaannya itu.

Deklarasi Jember sebagai Kota Pendalungan oleh Bupati tersebut merupakan proses penegasan identitas budaya yang memiliki konsekuensi vertikal dan horizontal. Proses semacam ini merupakan proses sosial-budaya yang cukup penting karena menjelaskan tiga hal berikut: (1) adanya dinamika kebudayaan di tempat itu; (2) adanya kepedulian pemerintah daerah terhadap praktik berkebudayaan; dan (3) adanya titik tolak bagi upaya pengembangan kebudayaan daerah.

Akan tetapi, seluruh gagasan, upaya, dan selanjutnya proses rekonstruksi serta pengembangan kebudayaan daerah dalam rangka pembangunan *manusia yang berkebudayaan* haruslah diartikulasikan dalam bentuk praksis, bukan sekadar penawaran ide-ide normatif semata. Sedahsyat apa pun gagasan yang ditawarkan tidak akan pernah berdampak nyata serta konstruktif terhadap perubahan sosial manakala berhenti pada tataran wacana belaka. Apa yang terjadi di banyak tempat selama ini adalah penciptaan wacana-wacana yang bombastis dan memikat, tetapi nol besar dalam pelaksanaannya

⁷ Bupati Jember, dr. Faida, MMR., mendeklarasikan Jember sebagai Kota Pandhalungan pada 14 Mei 2016 ketika membuka pelaksanaan Festival Pandhalungan II yang diselenggarakan oleh Kantor Pariwisata Jember dan dibantu Rumah Budaya Pandalungan (yang didirikan pada 2 Mei 2016).

di lapangan. Bahkan, jika dilaksanakan, ini biasanya hanya berupa basa-basi dan seremonial saja tanpa konsep aplikatif jangka panjang.

Pada setiap upaya (re)produksi identitas kultural semacam ini akan selalu muncul resistensi di dalam diri sekelompok orang, terutama mereka yang kurang sanggup membaca dan memaknai dinamika politik kebudayaan. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi persoalan berarti sejauh ada konsistensi Bupati dan pihak-pihak terkait dalam mewadahi berbagai bentuk ekspresi kebudayaan dan memberi keleluasaan pada seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan dialektika budaya.

Bab 5

Bahasa dan Kesenian Pendalungan: Eksistensi di tengah Ekspansi Globalisasi

A. Pertemuan Bahasa-Bahasa

Setidaknya sejak awal abad ke-20, masyarakat di kawasan Tapal Kuda dikenal sebagai masyarakat plural yang terdiri atas berbagai etnis dan kultur yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain etnis mayoritas, yakni Madura dan Jawa, terdapat pula etnis minoritas Arab, Tionghoa, Using, dan Mandar. Namun, karena tumbuh dan berkembang pada situasi plural dalam jangka waktu yang relatif lama, perspektif sosiokultural mereka lambat laun diwarnai oleh semangat pluralisme dan multikulturalisme. Sebagian dari orang-orang keturunan Madura tetap menganggap diri mereka orang Madura, demikian pula orang-orang keturunan etnis lain. Meskipun begitu, mereka sudah tidak terlalu kental lagi dengan etnisitas masing-masing. Etnisitas dan identitas mereka adalah bagian dari proses sosial dan historis sebagai suatu fenomena yang hadir karena diciptakan, dipertahankan, dan diubah berdasarkan interaksi yang intens. Mereka itulah orang-orang Pendalungan.

Bahasa yang dominan digunakan sebagai media komunikasi sehari-hari masyarakat Pendalungan adalah bahasa Jawa dan Madura. Tentu saja bahasa Indonesia juga digunakan secara luas, terutama

di kalangan anak muda dan pelbagai forum formal. Bahasa daerah yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah kedua bahasa tersebut dan tergantung di mana lokasi sekolah berada.⁸ Di Kecamatan Silo dan Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, misalnya, yang diajarkan adalah bahasa Madura, sedangkan di Kecamatan Rambipuji, yang diajarkan ialah bahasa Jawa. Meskipun demikian, akibat intensitas pergaulan masyarakat berbahasa Jawa dan Madura dalam jangka waktu relatif lama, bahasa komunikasi sehari-hari masyarakat tidak lagi “murni” bahasa Jawa atau Madura. Berbagai kosakata, frasa, istilah, atau bentuk ekspresi baru bermunculan akibat intensitas pergaulan tersebut, khususnya di wilayah kota.

Dalam berkomunikasi, masyarakat Tapal Kuda memiliki kecenderungan bilingual/multilingual yang cukup tinggi, yakni mampu menguasai dua bahasa atau lebih. Kontak intensif antara dua bahasa atau lebih pada masyarakat Tapal Kuda menimbulkan gejala alih kode (*code-switching*), campur kode (*code-mixing*), dan interferensi (*interference*). Alih kode adalah penggunaan dua bahasa atau variasi bahasa secara berganti-ganti di dalam wacana yang sama. Hal ini berarti bahwa si pembicara bilingual beralih dari perangkat sistem bahasa yang satu ke perangkat sistem bahasa yang lain, contohnya dari bahasa Jawa ke bahasa Madura atau dari bahasa Madura/Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode terjadi karena dorongan psikologis serta faktor sosial dan situasional.

Campur kode juga terjadi, yakni pengambilan elemen secara tetap dari bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang dipakai karena tidak ada elemen yang tepat dalam bahasa yang dipakainya. Dengan kata lain, elemen yang diambil itu adalah milik sistem yang berbeda. Hal ini dilandasi motivasi linguistik dan hasrat untuk menjelaskan/menginterpretasikan semata dan tidak dipengaruhi faktor situasional.

8 Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah, yang diajarkan di sekolah-sekolah di Jawa Timur adalah bahasa Jawa dan Madura.

Kontak yang intensif antara dua bahasa atau lebih di dalam situasi yang bilingual/multilingual juga akan menimbulkan gejala interferensi (melanggar kaidah gramatika bahasa), yakni perubahan bentuk bahasa sebagai akibat dari penerapan dua buah sistem bahasa yang berbeda secara serempak pada diri seorang komunikator bilingual/multilingual.

Di Probolinggo, baik di wilayah kota maupun kabupaten, sebagian masyarakat berbahasa Jawa dan lainnya berbahasa Madura. Namun, masyarakat Probolinggo yang berbahasa Jawa tersebut berlogat Madura. Di Banyuwangi, Jember, dan Lumajang juga kurang lebih demikian. Orang-orang keturunan Arab di Bondowoso jika bertemu dengan kawan lamanya biasa berkata: “*Mak abit tak temo bik situ*” (Kok lama sekali tidak bertemu dengan *situ*). Bahasa ini adalah bahasa Madura bercampur bahasa Indonesia tidak baku.

Dalam kebudayaan berbagai masyarakat, bahasa selalu menjadi faktor determinan, khususnya dalam proses transmisi berbagai nilai untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai tradisi masyarakat tersebut. Bagi masyarakat tradisional, bahasa lisanlah faktor determinan itu (Ilham, 2015). Apakah dengan demikian penamaan Pendalungan, yang berarti ‘berbicara secara buruk’ menemukan pembedaan? Tentu saja tidak. Dalam hal menyikapi perilaku berbahasa masyarakat Pendalungan semacam itu, menurut kalangan masyarakat intelektual, peran mitos telah diambil alih oleh *logos* (akal pikir). Taylor (1871) menganggap mitos sebagai produk kekacauan atau kebingungan manusia yang mencampuradukkan begitu saja pengalaman mimpi dan bangunnya. Pendek kata, mitos adalah sesuatu yang kita percayai dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran walaupun sesungguhnya tidak benar. Oleh karena itu, jika dulu yang tampak adalah masyarakat Pendalungan berbahasa secara buruk, kini hal itu dianggap sebagai suatu keunikan. Suatu keniscayaan dalam masyarakat campuran di mana pun berada.

B. Bahasa Jemberan

Di Jember akulturasi budaya Jawa dan Madura yang berlangsung relatif lama melahirkan variasi bahasa yang khas. Terjadinya keragaman atau variasi bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang heterogen, melainkan juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan cukup beragam. Dalam interaksi sosial semacam itu fenomena bahasa yang kerap terjadi, antara lain, adalah alih kode dan campur kode.

Berdasarkan hasil penelitian Rahman (2015), akulturasi antara bahasa Jawa dan Madura di Jember menghasilkan dialek baru, yaitu bahasa Jawa dialek Jemberan (Pendalungan) yang digunakan oleh masyarakat Jember dalam berkomunikasi sehari-hari. Rahman memerinci penutur bahasa Madura berada di daerah Jember timur dan utara. Sementara itu, sebagian besar penutur bahasa Jawa berada di kawasan Jember selatan dan barat. Adapun di Jember bagian tengah jumlah penutur bahasa Jawa dan Madura relatif sama. Akhirnya, pemakaian dua bahasa tersebut melahirkan bahasa Pendalungan.

Penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Raharjo (2006), menyimpulkan hal yang sama. Bahasa Jawa dialek Jember digunakan komunitas Madura dan Jawa yang bertempat tinggal di pusat dan pinggiran kota. Warga keturunan Tionghoa, Arab, dan Using juga berinteraksi dengan warga Jawa dan Madura. Etnis Tionghoa, terutama dalam menjalankan transaksi dagang, banyak berinteraksi dengan menggunakan bahasa Madura atau bahasa Jawa yang bercampur logat Tionghoa yang cukup kental. Begitu pula dengan etnis Arab. Di kota-kota kecamatan, misalnya Ambulu, bisa dijumpai perkampungan Arab yang warganya biasa berkomunikasi dengan bahasa Jawa yang bercampur logat bahasa Arab. Bagi kekayaan dan kekhasan bahasa Jemberan, orang-orang Tionghoa dan Arab tersebut sesungguhnya tidak hanya menyumbangkan logat, tetapi juga banyak kosakata.

Rahman (2015) mengumpulkan sejumlah kosakata Jemberan yang diperolehnya dari tulisan-tulisan di kaos, antara lain, *Sih koh!, boh, palang, mbois, nggilani, polae, longor, cek enggake', creme, mak*

taker, gile, metao, sengak, marra, digegeri, beno ra, huh kah, salbut, megeli, mbulet. Ungkapan *Sih koh!* bermakna menggoda, sama halnya dengan kata *cie* (kata seru yang digunakan untuk memuji atau menggoda seseorang agar tersipu). *Boh* merupakan partikel dalam bahasa Madura yang menunjukkan ekspresi kaget, sedangkan kata *palang* bermakna ‘bahaya’ sehingga jika kata *boh* dan *palang* disatukan, akan bermakna ‘bahaya’ serta mengekspresikan ‘sesuatu yang tidak biasa’. Kata *mbois* bermakna ‘keren’, ‘gaul’, dan ‘kekinian’, ‘terbaru’. Kata *nggilani* bermakna ‘menjijikkan’. Kata *polae* memiliki makna ambigu, yaitu *tingkah* dan *karena*. Pemakaian dua kata yang berbeda ini disesuaikan dengan konteks tuturan. Kata *longor* bermakna ‘konyol’. Kata *cek enggak* sama dengan kata *gak banget*. Namun, ekspresi tersebut ditambah dengan kata *raa kah* yang memberikan penekanan emosi, yang bermakna menyepelekan, menganggap remeh, atau menganggap tidak penting suatu hal. Kata ini biasanya digunakan pada saat marah atau sedang kecewa.

Bahasa Jemberan juga melahirkan ungkapan dengan kosakata yang unik, misalnya *sana'an rah* (tolong agak ke sana), *munduran rah* (tolong agak mundur), *cek gantengnya* (alangkah tampannya). Juga ungkapan dalam bentuk singkatan, misalnya *kardhi* (berasal dari *karepa dhibhik*, yang berarti ‘semaunya sendiri’), *kardhiman* (berasal dari *karepa dhibhik man-menyaman* yang berarti ‘semaunya dan seenaknya sendiri’). *Kardhi* atau *kardhiman* biasanya ditujukan pada seseorang yang dianggap menjengkelkan. Selain itu, bahasa Jemberan diwarnai oleh pola bahasa Madura, seperti pola $\frac{3}{4}$ (bukan $1\frac{1}{2}$), yaitu kata-kata yang tidak utuh dalam pengucapannya, seperti *lun-alun* (alun-alun), *lon-alon* (pelan-pelan), *ku-mlaku* (berjalan-jalan), *can-macanan* (bukan harimau yang sebenarnya), dan *ker-ekeran* (bertengkar).

Bahasa Jawa dialek Jember, menurut Wibisono dan Sofyan (2001), biasa digunakan oleh orang-orang Madura di pusat dan pinggiran kota ketika mereka berkomunikasi dalam ranah sosial dengan etnis Jawa. Akan tetapi, ketika berkomunikasi dengan sesama etnis Madura, mereka tetap menggunakan bahasa Madura. Bahasa

lisan yang mereka gunakan memang berbeda jauh dengan bahasa Jawa standar. Pemilihan bahasa tersebut didasari oleh beberapa faktor, antara lain, (1) menyatakan identifikasi dengan mitra wacana dalam hal ini etnis Jawa, dan (2) menyatakan sifat positif terhadap bahasa Jawa. Wibisono dan Sofyan memberi contoh bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari antara etnis Jawa (EJ) dan etnis Madura (EM) sebagai berikut.

EJ : “*Kate nang endi, Mas?*”

EM: “*Gak onok, iki ku-mlaku.*”

Jawaban *Gak onok, iki ku-mlaku* merupakan usaha menggunakan bahasa Jawa yang dipengaruhi bahasa Madura.

EJ : Dari mana, Mas?

EM : Dari laut.

Jawaban *Dari laut* merupakan usaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang dipengaruhi kosakata bahasa Madura. Laut di sini berarti ‘selatan’, atau *laok* dalam bahasa Madura.

Gak onok umur (meninggal) adalah bahasa Jawa Jemberan yang juga dipengaruhi bahasa Madura. Sementara itu, *gak dikek'i weruh* merupakan bahasa Jawa Jemberan yang terpengaruh bahasa Indonesia ‘tidak diberi tahu’.

Selama ini memang bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jember disebut sebagai “bahasa Jawa dialek Jember” (Wibisono & Sofyan, 2001; Raharjo, 2006; Rahman, 2015). Walaupun demikian, penulis beranggapan bahwa hal itu masih terlalu prematur. Masih diperlukan pendalaman atau studi lebih lanjut mengenai bahasa Jemberan atau dialek Jember ini, baik dalam hal penamaan, struktur, maupun kosakata.

C. Bahasa Daerah yang Makin Hilang

Para pendatang yang menempati daerah Jember pada masa lalu sebagian besar adalah orang-orang yang berbahasa Jawa dan Madura. Di Jember mereka tetap menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa

komunikasi sehari-hari. Namun, pada perkembangannya, bahasa Jawa dan Madura cenderung mengalami penurunan jumlah penutur aslinya. Menurut Salikin (2016), para penutur asli bahasa Madura tidak mau atau enggan menggunakannya dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah bahwa mereka tidak mau dianggap tidak maju sehingga mereka memilih berbahasa Indonesia. Menurut mereka, dengan berbahasa Indonesia, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang berpendidikan. Hal ini tidak hanya terjadi pada kalangan awam saja, kaum terpelajar seperti mahasiswa dan dosen penutur asli bahasa Madura juga memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Salikin juga mengilustrasikan bagaimana bahasa Bali yang mengalami penurunan jumlah penutur. Orang Bali yang berusia 30 tahun ke atas masih mampu secara aktif menggunakan bahasa daerahnya. Namun, orang Bali yang berusia antara 20–30 tahun sudah mulai kurang aktif menggunakan bahasa daerahnya. Begitu juga dengan anak-anak Bali yang berusia di bawah 20 tahun sudah tidak peduli lagi dengan keadaan bahasa daerahnya.

Sementara itu, Alwi (2001) mengisahkan bagaimana keadaan yang dialami bahasa Jawa. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Jawa menduduki peringkat paling atas kelompok delapan besar bahasa daerah yang jumlah penuturnya paling banyak. Jumlah penuturnya diikuti oleh bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Banjar, dan bahasa Bali. Sungguhpun demikian, tidak berarti bahwa bahasa Jawa jauh dari ancaman kepunahan. Bahasa Jawa kini menempati posisi *pinggiran* dan hanya digunakan orang tua, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Amir Mahmud, kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ada kecenderungan penghilangan identitas kemaduraan, terutama di kalangan generasi muda. Dalam kurun waktu 1980–1990 jumlah penutur bahasa Madura mengalami penurunan dari 6.913.977 penutur (4,71% dari jumlah penutur bahasa daerah di Indonesia) menjadi 6.792.447 penutur (4,29%). Data tersebut menunjukkan bahwa dalam satu dekade saja jumlah penutur bahasa Madura berkurang

sekitar 121.530. Dengan kata lain, 12.153 penutur bahasa Madura berkurang setiap tahunnya (Salikin, 2016).

Di Jember bagian utara ada kecenderungan pemakaian bahasa Madura yang mulai menurun. Kini banyak suami istri beretnis Madura berkomunikasi dengan putra-putrinya memakai bahasa Indonesia, padahal komunikasi di antara suami istri tersebut tetap menggunakan bahasa Madura. Alasan mereka sangat pragmatis, yakni bahwa mereka tidak ingin anak-anak mereka mengalami hambatan bahasa ketika nantinya harus masuk TK atau SD karena bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Para remaja, pelajar SMP dan SMA, juga berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dalam pergaulan di antara mereka. Jika ada orang lain yang mengajak berkomunikasi menggunakan bahasa Madura, mereka akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Alasan mereka sederhana. Mereka sudah tidak mampu memakai bahasa daerah yang halus. Beberapa remaja beralasan bahwa bahasa Indonesia lebih keren dibanding dengan bahasa Madura (Salikin, 2016).

Keadaan semacam itu lambat laun akan menyebabkan lenyapnya bahasa daerah. Menurut Salikin (2016), penyebab utama kepunahan bahasa daerah adalah karena para penuturnya meninggalkan atau bergeser ke pemakaian bahasa lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi, sosial, politik, ataupun psikologis. Di Indonesia, selama dua dekade ini, banyak orang yang meninggalkan bahasa daerahnya dan beralih menggunakan bahasa Indonesia, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Sementara itu, Soetomo (1985) menyebutkan bahwa faktor non kebahasaan memengaruhi masuknya bahasa daerah atau bahasa asing. Faktor nonkebahasaan menurutnya adalah

- 1) sistem budaya: bahasa yang dipandang sebagai tata lambang konstitusi, tata lambang evaluasi, dan lambang ekspresi;
- 2) sistem sosial: penggunaan bahasa harus sesuai dengan status dan peranan sosial pemakai bahasa; dan

- 3) psikologi penutur: penggunaan suatu bahasa mungkin karena dilatarbelakangi oleh persepsi, motivasi, identitas, pengalaman, dan hal-hal yang bersifat pribadi.

Jika dilihat dari perspektif pelestarian budaya, penggunaan bahasa daerah di Jember tergolong mengkhawatirkan. Generasi muda Jember lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, padahal mereka masih menggunakan bahasa Jawa atau Madura di rumah. Hal ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak sejak lama.

Pemerintah daerah wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh kelangsungan bahasa daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pembagian tersebut, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

D. Orang Pendalungan Berkesenian

Identitas kultural masyarakat Pendalungan secara otomatis melekat pada berbagai aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan, termasuk aktivitas berkesenian. Pada tataran tertentu masyarakat Jawa dan Madura, di wilayah Tapal Kuda, memilih mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing. Meskipun begitu, karena menghadapi situasi sosial serta kondisi alam yang sama, timbulah perasaan senasib-sepenanggungan. Hal yang demikian ini memudahkan terjadinya akultiasi budaya di antara mereka. Tambahan lagi, keberadaan mereka di tempat baru tersebut bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan, bukan untuk menyebarluaskan kebudayaan asli dari daerah mereka. Seni pertunjukan yang mereka bawa dan kembangkan, misalnya, bukan dalam rangka mempertahankan identitas kultural, melainkan mengisi dan melengkapi kehidupan mereka di daerah baru tersebut.

Pernyataan Sutarto (2006) bahwa masyarakat Pendalungan tidak memiliki akar kesenian, budaya, dan tradisi yang kuat, tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Masyarakat Pendalungan adalah masyarakat campuran berbagai etnis. Oleh karena itu, pada etnis-ethnis itulah akar seni budaya Pendalungan harus dicari. Sebaliknya, jika berniat menemukan seni budaya manakah yang bisa dikategorikan sebagai produk seni budaya Pendalungan—dengan menggunakan asumsi dasar *seni yang asli/tidak asli*—kita tidak akan berhasil menemukan apa pun karena asumsi dasar kita keliru.

Lantas, seperti apakah kesenian Pendalungan itu? Memang cukup sulit menentukannya. Sebagian orang bahkan beranggapan bahwa masyarakat Pendalungan tidak memiliki kesenian. Pendalungan adalah produk dari suatu percampuran etnis dan budaya-budaya, maka ini menjadi wajar jika keseniannya juga bersifat campuran. Ada kesenian Jawa, Madura, Banyuwangi, Arab, Tionghoa, kontemporer, dan sebagainya. Ciptaan baru yang berbasis *gado-gado* juga ada. Sejumlah kesenian yang penulis anggap khas dan merepresentasikan Pendalungan adalah seni janger Banyuwangi, Singo Ulung (Bondowoso)/*can-macanan* kaddhuk (Jember), Kentrung Trio Noor (Bondowoso), patrol (Jember), lengger (Jember), danglung (Lumajang), dan gandrung Kentrung Djos.

Meskipun masyarakat Pendalungan relatif terbuka terhadap masuknya nilai-nilai asing dan baru, terutama yang bersumber pada *urban culture*, Sutarto (2006) menengarai bahwa tipe kebudayaan orang Pendalungan adalah kebudayaan agraris-egaliter. Penanda simbolis yang tampak jelas dari tipe kebudayaan ini, menurut Sutarto, terdapat pada berbagai seni pertunjukan yang digeluti dan penggunaan bahasa sehari-hari yang secara dominan menggunakan ragam bahasa kasar (ngoko) dan bahasa campuran (dua bahasa daerah atau lebih).

Walaupun kenyataannya masyarakat Pendalungan adalah masyarakat multikultur, batas-batas kultural antaretnis masyarakat Pendalungan relatif tipis sehingga berbagai eksperimen penciptaan seni mendapatkan ruang apresiasi yang lebih luas. Adalah para seniman Banyuwangi yang cukup memahami posisi mereka sebagai anggota

masyarakat seperti ini. Alex Jokomulyo, misalnya, bisa dijadikan sebagai salah satu contoh konkret. Koreografer tari kenamaan dari Kabupaten Banyuwangi ini menciptakan sebuah tari yang dia beri judul *Perawan Pendalungan*. Tari ciptaannya tersebut bercerita tentang anak hasil perkawinan antaretnis (antara Jawa-Madura, Jawa-Using, atau Madura-Using). Karena proses penciptaan tari tersebut dipengaruhi oleh kondisi multikultural masyarakat di wilayah Tapal Kuda, Alex sengaja memasukkan unsur-unsur gerak tari Madura, Jawa, dan Ponorogo yang selanjutnya dipadukan dengan estetika tari gandrung sebagai dasarnya. Alex juga memasukkan elemen-elemen musik Madura, Jawa, dan Ponorogo untuk memperkaya gamelan Banyuwangen yang digunakannya dalam berkreasi. Dengan memanfaatkan karya tarinya *Perawan Pendalungan* ini, Alex hendak menegaskan pandangannya bahwa Banyuwangi bukan hanya milik masyarakat Using, tetapi juga milik masyarakat-masyarakat lain yang hidup di sana dan mereka harus saling menghormati dalam hal perbedaan kultural (Setiawan & Subaharianto, 2016).

E. Peta Kesenian Pendalungan

Jika dipandang dari segi kebudayaan, daerah Tapal Kuda merupakan titik temu berbagai macam pengaruh kebudayaan, baik kebudayaan Madura, Jawa, Bali, maupun dari kebudayaan asing, seperti Tiongkok, Arab, dan Eropa. Unsur-unsur pengaruh ini tampak jelas pada cabang-cabang budaya dalam pengertian sempit yang berkembang di kawasan ini, terutama pada bentuk kesenian seperti seni bangun, ukir, suara, tari, dan khususnya seni pertunjukan rakyat (Winarni, 2012).

Hampir semua jenis kesenian yang berkembang di daerah Tapal Kuda juga tersebar di daerah-daerah kebudayaan lainnya di Jawa Timur. Namun, perbedaan karakter dan semangat dalam berproseslah yang pada akhirnya membawa masyarakat Pendalungan menuju suatu proses kreatif baru. Sebagaimana disinyalir oleh Sutarto (2006), orang Pendalungan cukup adaptif dan akomodatif sehingga perubahan-perubahan besar yang melanda dunia global ditangkap dengan mudah dan bahkan ditiru. Sifat terbuka semacam itulah yang agaknya

menjadikan kesenian masyarakat Pendalungan tidak hanya berupa karya-karya tradisional yang mereka warisi dari para leluhur, tetapi juga berbagai genre kesenian yang datang dari luar.

Peta persebaran kesenian masyarakat Pendalungan, jika ditilik dari orientasi kulturalnya, dapat dipilah ke dalam dua kategori, yaitu (1) kesenian Pendalungan tradisional yang merupakan ekspresi rakyat dalam berkesenian dengan materi estetika yang diwarisi dari nenek moyang dan (2) kesenian Pendalungan jenis kontemporer yang banyak dipengaruhi oleh tata nilai dan tradisi kreativitas masyarakat Barat. Sementara itu, berdasarkan proses penciptaannya juga dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu (1) *kesenian yang diciptakan orang Pendalungan* yang bisa mengacu pada seni tradisional ataupun kontemporer dan (2) *kesenian yang dimainkan oleh orang Pendalungan*, baik seni tradisional maupun kontemporer.

Peta persebaran kesenian Pendalungan dalam perspektif kontemporer dan tradisional ini meliputi seluruh kota dan kabupaten di Pendalungan Raya di kawasan Tapal Kuda meskipun dengan kecenderungan yang bervariasi. Dua gejala kesenian tersebut, baik yang kontemporer maupun tradisional, sering kali berkembang secara mandiri dan kadang-kadang saja bertemu di suatu titik. Artinya, keberanian kreatif untuk menggabungkan unsur-unsur seni tradisional dan kontemporer tidak dimiliki oleh banyak seniman di Tapal Kuda. Keberanian dan konsistensi untuk secara kreatif melakukan penggabungan unsur-unsur seni tradisional-kontemporer itu, misalnya, dapat kita temukan pada seni musik campursari. Walaupun kesenian ini bukan merupakan produk seni khas Pendalungan, di beberapa tempat di kawasan Tapal Kuda terdapat sejumlah kelompok seni musik campursari yang mampu bertahan, berkembang, dan menemukan penikmat setianya. Sebagai contoh, di Jember terdapat sebuah kelompok musik jenis ini, yang bernama Campursari Gonjing Miring yang telah berkarya secara konsisten selama lebih dari dua dasawarsa. Di Banyuwangi terdapat sebuah genre musik rakyat yang disebut kendang kempul. Genre musik ini menggunakan instrumen utama berupa kendang (jenis kendang khas Banyuwangi) dan kempul.

Namun, pada perkembangan selanjutnya kesenian ini cenderung bertransformasi menjadi musik dangdut-pop/rok daerah dan makin kehilangan roh tradisionalnya.

Para seniman di kawasan Tapal Kuda hingga kini terus berupaya menggali dan berinovasi untuk menemukan produk-produk kesenian yang berkarakter khas Pendalungan. Pemkot Probolinggo, misalnya, terus memfasilitasi upaya penggalian potensi kesenian lokal, antara lain, dengan menggelar kesenian Pendalungan dalam rangkaian acara Seminggu di Probolinggo (Semipro). Pemkab Jember melakukan hal yang sama melalui Festival Pandhalungan yang sudah berlangsung sejak tahun 2015. Sementara itu, Pemkab Lumajang berusaha melestarikan musik danglung melalui penyelenggaraan festival musik, yakni Festival Danglung Kreasi. Seni musik danglung ini diklaim sebagai kesenian khas Lumajang dan diyakini telah ada sejak era kuno ketika wilayah Lumajang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Bagi banyak daerah, memiliki produk seni yang berkarakter khas lokal dan memiliki ciri-ciri setempat merupakan impian yang harus diwujudkan.

Secara umum, masing-masing pemerintah daerah telah berperan penting dalam upaya pengembangan sosiokultural masyarakat setempat. Akan tetapi, inilah kelemahan mendasar aparatur pemerintah di Indonesia. Mereka masih bertindak sebatas kerangka kerja formal belaka dengan skema pengembangan yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Jadi, model pendekatan yang dipilih dan diterapkan ialah tetap model struktural yang kaku, tidak efektif, dan kurang menyentuh akar permasalahan. Pola kerja sama dengan elemen-elemen masyarakat, misalnya dengan para seniman dan peneliti, lebih bersifat insidental karena melulu bergantung pada program basa-basi dan besarnya pendanaan. Akibatnya, ketika dana tersedia, program akan berjalan. Sebaliknya, apabila tidak ada dana, program akan terbengkalai.

F. Aneka Kesenian Pendalungan

Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 1994). Manusia berkesenian karena ingin mengekspresikan gagasan-gagasannya secara estetis pada orang lain. Demikian pula halnya dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Pendalungan. Aktivitas berkesenian mereka tidak selalu dilakukan secara spesifik atau semata-mata dalam rangka pergelaran seni, tetapi sering menyatu dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada kasus yang demikian, kesenian telah berkembang menjadi bagian integral kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, produk-produk kesenian tersebut, khususnya karya seni tradisional, dapat dijadikan sebagai penanda kultural masyarakat pemiliknya.

Berbagai produk kesenian tradisional yang berkembang di wilayah Pendalungan secara garis besar mencerminkan kultur yang mendukung identitas budaya masyarakat Pendalungan. Itulah sebabnya mengapa di wilayah ini dengan mudah kita temukan kesenian-kesenian yang memperlihatkan asal-usulnya: Jawa, Madura, Using, Arab, Tiongkok, dan lain-lain. Sungguhpun demikian, karena wilayah Pendalungan adalah wilayah pertemuan budaya, sebagian kesenian yang ada telah mengakomodasi berbagai pengaruh kesenian lain dan dalam beberapa hal menjadi berbeda dengan kesenian asal. Tambahan lagi, masyarakat Pendalungan tergolong masyarakat yang adaptif, tidak segan-segan menerima, menyerap, dan kemudian mengolah berbagai pengaruh luar sehingga memunculkan seni percampuran. Selanjutnya, semangat mereka yang bergelora dalam mengekspresikan nilai-nilai estetis mendorong terjadinya invensi dan modifikasi kesenian.

Biasanya suatu produk kesenian dapat dilacak atau ditebak asal-usulnya. Seni janger Banyuwangi, misalnya, diperkirakan berasal dari kesenian langendrian yang berasal dari Yogyakarta dan mendapat pengaruh kesenian arja dari Bali. Sungguhpun demikian, tidak jarang kita temukan suatu produk kesenian yang tiba-tiba muncul dan berkembang begitu saja di kalangan masyarakat, padahal tidak jelas akar budayanya, tidak jelas pula sumber rujukannya. Salah

satu contoh mutakhir kasus seperti ini adalah munculnya sebuah kreativitas masyarakat Jember dan sekitarnya yang disebut *mini sound* (Gambar 5.1). Ini adalah fenomena kesenian baru yang merebak di Jember pada sekitar tahun 2015. Sekelompok orang (berkisar antara 10 hingga 20 orang di dalamnya ada kelompok anak-anak, remaja, bahkan ibu-ibu) *nge-dance* atau menari dengan gerakan yang kompak disertai irungan musik berirama rancak (*disco-remix*) yang diputar melalui *sound-system* kecil yang diletakkan di atas rak beroda sehingga bisa dengan mudah dipindah ke mana-mana. *Sound-system* kecil, atau *mini sound*—menurut sebutan mereka—itulah yang akhirnya menjadi nama bagi genre seni tari berkelompok tersebut. Sebuah grup *mini sound* dianggap sukses dan terkenal apabila sering diundang oleh berbagai kalangan untuk mempergelarkan kemahirannya, misalnya, dalam acara ulang tahun. Mereka juga tampil pada acara karnaval yang diselenggarakan oleh desa atau kecamatan. Sayang sekali kreativitas semacam ini, meskipun saat ini cukup populer, biasanya tidak mampu bertahan lama dan berkembang lebih lanjut.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.1 Para Remaja dalam Tren Baru Kesenian *Mini Sound*

Masyarakat Pendalungan adalah masyarakat merdeka. Masyarakat Pendalungan tidak mengacu pada pusat kebudayaan tertentu sehingga masing-masing daerah menjadi pusat kebudayaan

bagi dirinya sendiri. Jika daerah-daerah pewaris kebudayaan mapan tampak bergerak secara linear, setia sebagai ahli waris seni budaya yang diturunkan kepadanya, masyarakat Pendalungan justru berani bebas berimprovisasi, tidak hanya bergerak lurus ke depan, tetapi juga ke kanan-kiri. Semangat berkebudayaan mereka yang utama adalah menciptakan produk-produk kultural baru yang dianggap berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman—demi peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Inilah sesungguhnya etos intelektual masyarakat Pendalungan dalam menjadikan diri mereka warga masyarakat modern. Dengan demikian, pada akhirnya tuntutan yang ditujukan terhadap masyarakat Pendalungan untuk mampu menghadirkan lokalitas kebudayaan sebagai penanda khas etnisitas mereka menjadi tidak relevan lagi.

Masyarakat Pendalungan adalah masyarakat yang mampu belajar dengan cepat untuk menjadi modern. Dalam banyak hal mereka lebih suka berorientasi pada nilai-nilai budaya dan peradaban masa kini. Pada umumnya masyarakat Pendalungan yang tinggal di daerah perkotaanlah yang memiliki akselerasi tinggi terhadap gerak zaman dan modernitas. Produk-produk kesenian, seperti JFC dan *mini sound* cukup menjadi bukti. Oleh karena itu, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk memenuhi kriteria mental sebagaimana dipersyaratkan oleh masyarakat modern di seluruh dunia sebagai berikut.

- 1) Berpola pikir serta berperilaku rasional yang diwujudkan dengan kemampuan menghargai karya orang lain, waktu, dan kualitas; berpikir kreatif, efisien, produktif, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, dan bertanggung jawab.
- 2) Memiliki sifat yang relatif terbuka, yakni mau mempertimbangkan dan bahkan menerima pandangan serta gagasan orang lain.

G. Kesenian Tradisional

Karena orang Madura identik dengan Islam, tidak mengherankan jika mereka tidak cukup produktif di bidang seni pertunjukan sebagaimana Islam tidak memberi ruang dan perhatian cukup besar terhadap seni pertunjukan. Sebagian dari mereka berkesenian sejauh kesenian tersebut dianggap *islami*. Di kawasan Tapal Kuda, masyarakat keturunan Madura cenderung tetap memilih untuk memainkan seni-seni tradisi khas Madura. Kesenian tradisional yang berkembang di Bondowoso adalah Singo Ulung dan wayang kerte, sedangkan kesenian di Jember ialah *can-macanan kaddhuk* (Gambar 5.2) dan musik patrol (Gambar 5.3). Sementara itu, hadrah dan “terbangan” berkembang di pondok-pondok pesantren yang tersebar cukup merata di semua wilayah Pendalungan Raya. Banyaknya jumlah pesantren di Tapal Kuda pada akhirnya turut memberi “warna santri” atau “warna islami” pada kesenian-kesenian yang berkembang di wilayah ini.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.2 *Can-macanan Kaddhuk* di Jember (Di Bondowoso
Biasa Disebut Singo Wulung)



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.3 Musik patrol ialah salah satu produk kesenian khas masyarakat Pendalungan.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.4 Sebuah grup musik patrol mengikuti festival dan berkeliling kampung di malam hari pada bulan Ramadan di Jember.

Di kalangan etnis Madura, dalam hal pengembangan seni pertunjukan, selain terjadi proses penerjemahan konsep kesenian berbahasa Jawa menjadi berbahasa Madura, juga terjadi keterlibatan lintas etnis dalam kesenian Tionghoa dan Arab tanpa mengubah format pertunjukan ataupun bahasanya. Dalam kesenian barongsai dan leang leong di Jember (Gambar 5.5), misalnya, sebagian anggota berasal dari etnis Madura maupun Jawa. Begitu pula yang terjadi dengan seni gambus (Arab), kendang kempul, dan janger (Using) terdapat keterlibatan etnik Madura dan Jawa (Raharjo, 2006).



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.5 Seni Barongsai dan Leang Leong, Kesenian Khas Masyarakat Tionghoa

Di kawasan Tapal Kuda, salah satu jenis musik yang persebarannya cukup luas adalah musik kentungan. Di Jember, selain disebut musik kentungan, juga biasa disebut musik patrol. Musik ini sesungguhnya adalah musik tradisional khas masyarakat Madura di Pulau Madura, tetapi dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Pendalungan dan selanjutnya berkembang dengan kekhasan daerah masing-masing. Selain di Jember, musik kentungan juga berkembang di daerah-daerah

lain di Tapal Kuda, seperti di Probolinggo, Situbondo, Pasuruan, Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi. Jika perangkat musik patrol di beberapa daerah dibuat dari bambu, di Jember bahannya dari kayu, terutama kayu nangka. Jenis dan variasi pukulannya pun berbeda.

Musik patrol berkembang cukup baik di Jember dan hingga kini masih mendapat tempat di hati masyarakat. Instrumen musik yang digunakan terdiri atas sejumlah kentungan kayu dengan ukuran bervariasi, dari yang kecil hingga besar. Masing-masing keuntungan mempunyai nama, misalnya *kenthir*, *kenthal*, *ting-tung*, serta kentungan besar yang berfungsi sebagai bas. Instrumen tambahan yang umum digunakan berupa kendang, remo, tamborin, rebana, dan seruling (di Madura alat musik tiup yang digunakan adalah saronen). Sejumlah grup musik patrol menambahkan instrumen *electone* dan bas listrik. Para mahasiswa Universitas Jember secara rutin pada bulan Ramadan menyelenggarakan festival tahunan musik patrol sejak tahun 2000. Acara tersebut biasanya dimulai pada pukul 21:00 hingga pukul 03:00 dini hari dan disaksikan oleh masyarakat dengan antusiasme cukup tinggi. Musik rakyat ini biasanya dimainkan oleh kelompok-kelompok remaja pada malam hari di bulan Ramadan sambil berkeliling kampung, baik untuk ronda siskamling maupun sekadar untuk membangunkan warga menjelang sahur (Gambar 5.4).

Di Jember, warga masyarakat keturunan etnis Jawa yang menempati wilayah selatan Jember (seperti Ambulu, Wuluhan, Balung, Puger, Gumukmas, Kencong, Jombang, Umbulsari, dan Semboro) sampai saat ini masih mempraktikkan produk-produk budaya Jawa baik dalam hal bahasa, kesenian, maupun adat-istiadat lainnya. Masyarakat keturunan Jawa di Ambulu dan Wuluhan, misalnya, hingga kini masih melestarikan kesenian Reog yang berasal dari tradisi nenek moyangnya di Ponorogo. Selain itu, sebagian besar masyarakat di daerah selatan juga menggemari seni jaranan (Gambar 5.6 dan 5.7), wayang kulit, dan musik campursari. Ketika mereka menyelenggarakan hajatan keluarga, misalnya mengkhitan atau menikahkan putranya, mereka sering menanggap kesenian-kesenian tersebut.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.6 Seni jaranan digemari masyarakat Jember terutama di bagian selatan.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.7 Seni Jaranan: Para penonton muda sering mengalami *intrance* (kesurupan) secara massal.

Sementara itu, di wilayah bagian utara, hingga saat ini, masyarakat tetap bertahan pada orientasi budaya Madura. Bahasa Madura merupakan bahasa komunikasi sehari-hari bagi sebagian besar warga masyarakat di Kecamatan Arjasa, Jelbug, Sukowono, Kalisat, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, dan Pakusari. Di samping ludruk *ala* Madura, masyarakat di sana gemar melihat pertunjukan hadrah sebagai kesenian pesantren yang menjadi orientasi pendidikan etnis Madura. Pengajian juga menjadi acara favorit mereka karena selain mendapatkan wejangan-wejangan tentang ajaran Islam, mereka juga bisa bertemu dengan para “lora” (sebutan untuk kiai) ataupun Gus (anak kiai) yang dianggap bisa mendatangkan berkah bagi kehidupan warga (Raharjo, 2006).

Wayang topeng khas gaya Madura dahulu cukup banyak penggemarnya dan berkembang subur di beberapa kabupaten, yaitu Bondowoso, Panarukan, Kraksaan, Jember, dan Lumajang. Namun, sekarang keberadaan kesenian berbahasa Madura ini makin langka dan sulit ditemukan. Di daerah Bondowoso, Panarukan, dan Kraksaan, yang penduduknya sebagian besar orang Madura, pertunjukan wayang topeng masih cukup digemari. Dahulu di daerah Jember dan Lumajang, yang sebagian penduduknya etnis Jawa, pertunjukan wayang topeng gaya Jawa juga dapat dijumpai. Selain pertunjukan wayang topeng dengan membawakan cerita, ada juga pertunjukan yang hanya berupa tari-tarian dengan pemain mengenakan topeng dan irungan musik sronen. Di Jember, kesenian jenis ini sudah tidak dapat dijumpai lagi. Seni macapat Madura juga termasuk kesenian yang digemari masyarakat Madura dan masih ada hingga saat ini meskipun makin jarang. Kebiasaan masyarakat Madura membaca macapat adalah pengaruh Jawa. Kebiasaan *mele'an* (tidak tidur semalam suntuk) atau yang di Jawa disebut *macapatan* untuk *leklekan*, seperti pada waktu ada kelahiran bayi dan hajat perkawinan adalah umum dalam masyarakat Madura (Winarni, 2012).

Di kota Jember, jenis kesenian yang ada lebih beragam, baik yang berasal dari khazanah kebudayaan Jawa, Madura, maupun etnis-ethnis lain. Salah satunya adalah lengger, sejenis tarian rakyat yang mirip

dengan tayub. Kesenian lengger merupakan kesenian yang cukup digemari masyarakat Jember *tempo dulu*. Nama kesenian yang sama juga ada di Kota Probolinggo dan Jawa Tengah, tetapi lengger yang ada di sana cukup berbeda dengan yang ada di Jember. Di Kecamatan Mangunharjo, Probolinggo, pertunjukan lengger lebih mendekati pertunjukan tayub yang hingga sekarang masih banyak terdapat di Nganjuk dan Tuban. Di Jawa Tengah, tari lengger dimainkan oleh seorang penari laki-laki (mengenakan topeng) dan seorang penari perempuan. Pertunjukan dibagi menjadi beberapa babak. Setiap babak berlangsung sekitar 10 menit. Kesenian ini masih sering dipergelarkan di beberapa tempat di Jawa Tengah, misalnya di Banyumas dan Wonosobo. Tari lengger ditampilkan pada acara hajatan, hari besar, penyambutan tamu daerah, atau acara festival budaya. Sementara itu, tari lengger Jember adalah kesenian *mbarang*, atau mengamen. Pada saat ini, kesenian tari lengger Jember makin redup dan terancam punah. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an pertunjukan lengger di halaman Stasiun Jember atau di sudut Pasar Tanjung masih sering ada. Tari lengger Jember ini konon dahulu menjadi bagian dari ritual kesuburan. Artinya, pertunjukan diselenggarakan dalam kaitannya dengan ungkapan harapan dan rasa syukur para petani. Kemungkinan kesenian ini dahulu dibawa oleh para pendatang yang berasal dari Jawa Tengah, kemudian bercampur dengan warna lokal. Musik pengiring, kostum, dan gerak tari, misalnya, didominasi oleh gaya "Jawa Timuran".

Sejumlah kesenian rakyat yang pada era sebelum 1990-an dapat ditemukan di wilayah Pendalungan kini sudah tidak pernah terdengar beritanya. Namun, beberapa jenis kesenian lainnya, yang memiliki akar tradisi, masih dapat ditemukan. Bahkan, beberapa kesenian rakyat berikut berkembang dengan cukup mengesankan.

- 1) Jaran kencak: Kesenian ini masih hidup di Jember dan Lumajang dan menampilkan atraksi seekor kuda yang telah dilatih untuk berjalan dengan langkah-langkah berirama layaknya sedang menari. Kesenian ini sekarang bahkan diangkat sebagai ikon budaya Lumajang.

- 2) Hadrah/terbangan: Kesenian bernafaskan Islam dengan irungan dasar seperangkat alat musik rebana/terbang. Kesenian ini masih cukup mudah ditemukan di seluruh wilayah Tapal Kuda, terutama di pondok-pondok pesantren.
- 3) Ludruk: Teater rakyat ini berkembang dengan baik di Kabupaten Jember (lihat Gambar 5.8).
- 4) Janger: Teater rakyat khas Banyuwangi ini berkembang, terutama, di Kabupaten Banyuwangi. Namun, janger juga dapat ditemukan di Kabupaten Jember. Dahulu teater rakyat ini bahkan berkembang hingga ke daerah Malang.
- 5) Macapat/*mamacah*: Seni membaca cerita yang berasal dari bahasa apa pun (acapkali dari Timur Tengah), dilakukan. Di Jember disebut *mamacah* (berbahasa Madura), sedangkan di Banyuwangi disebut macapat (berbahasa Jawa) (lihat Gambar 5.9).
- 6) Pencak silat: Seni bela diri yang ditampilkan dengan diiringi kendang dan jidur.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.8 Seni ludruk melibatkan banyak pemain laki-laki yang berperan sebagai tokoh perempuan.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.9 *Mamacah/macapat* adalah seni membaca cerita dengan dilakukan dan menggunakan bahasa Madura.

Masih terdapat sederet panjang jenis-jenis kesenian yang hingga kini diperakrukkan masyarakat Pendalungan. Mereka tidak terlalu peduli dari mana kesenian itu berasal. Akan tetapi, tampaknya mereka lebih mempertimbangkan apakah kesenian-kesenian tersebut cukup relevan bagi mereka. Kesenian lain yang masih bisa ditemukan adalah *glepang*, *jaran bodhak*, *kenong telo'*, *glundengan*, dan sebagainya. Bahkan, di daerah Jember masih bisa ditemukan kesenian *kothekan lesung* yang langka dan nyaris punah (Gambar 5.10).



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.10 Kotekan lesung masih terus dipertahankan oleh Komunitas Pandhalungan Jember.

H. Upaya Menciptakan Kesenian khas

Tidak mudah bagi siapa pun untuk menciptakan suatu produk kesenian yang dapat diterima masyarakat secara luas dan pada gilirannya menjadi *tradisional*. Tari lahbako (Gambar 5.11), misalnya, meskipun telah berumur lebih dari 30 tahun sejak diciptakan, hingga kini tarian tersebut belum bisa diterima secara *ikhlas* sebagai tari khas daerah oleh masyarakat Jember.

Tari lahbako adalah tari yang diciptakan untuk menjadi tari tradisional khas Jember. Tari ini menggambarkan para perempuan yang sedang sibuk mengolah daun tembakau. Kata *lahbako* merupakan akronim dari *olah tembakau*. Pencipta tari ini adalah Bagong Kussudiardja, seorang pencipta tari kenamaan dari Yogyakarta, dibantu sejumlah seniman tari dan pemuks kentongan Jember. Proses penciptaan tari, yang dilakukan pada tahun 1983, ini diprakarsai oleh Bupati Jember Suryadi Setyawan yang merasa prihatin karena pada waktu itu Jember tidak memiliki tari khas daerah. Sumber ide penciptaan adalah masyarakat Jember yang sebagian besar merupakan petani tembakau.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.11 Tari lahbak menggambarkan para perempuan yang sedang memetik dan mengolah tembakau.

Sejak zaman kolonial Belanda, Jember memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbaik dan terbesar di Indonesia. Tari lahbak biasanya ditarikan secara berkelompok, sedikitnya empat orang penari perempuan. Tarian ini menggambarkan aktivitas para perempuan yang bersama-sama berangkat menuju ke kebun, memetik daun tembakau, kemudian membawanya pulang, dan mengolahnya. Musik pengiring tari lahbak adalah musik patrol. Tarian ini cukup sering dipentaskan di Jember karena mungkin sanggar-sanggar tari yang ada di sana sedikit jumlahnya sehingga tidak memiliki banyak pilihan jenis tari. Sangat berbeda dengan masyarakat Banyuwangi yang kekayaan tari-tarian daerahnya berlimpah ruah. Pementasan tari lahbak biasanya dilakukan pada acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten, misalnya, untuk menyambut tamu daerah dan festival budaya.

Upaya kreatif pemerintah daerah ataupun sanggar-sanggar seni, baik untuk mengisi kekosongan karya seni khas daerah maupun memperkaya yang sudah ada, cukup sering dilakukan di

berbagai tempat. Di Jember, salah satu sanggar tari yang cukup aktif melakukan hal ini adalah Sanggar Tari Kartika Budaya (Gambar 5.12). Namun, ternyata upaya semacam itu tidak selalu membawa hasil menggembirakan. Selain faktor minimnya dukungan pemerintah daerah, sumber daya seniman yang kurang memadai dan sistem pengelolaan serta pemasaran produk seni yang tidak jalan menjadinya penyebabnya. Oleh karena itu, perlu ada paradigma baru dan strategi khusus yang diterapkan agar terjadi pertemuan antara produsen dan konsumen seni budaya.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.12 Para Penari Muda Sanggar Tari Kartika Budaya

I. Pengembangan Kesenian

Posisi berbagai kesenian rakyat di tanah air, termasuk di wilayah Tapal Kuda, saat ini makin terpinggirkan karena kurang mampu bersaing dengan aneka produk budaya dari luar yang membanjiri seluruh pelosok negeri melalui media massa, khususnya televisi. Aneka produk kesenian dari luar tersebut pada akhirnya lebih populer daripada kesenian rakyat karena mendapatkan dukungan penuh dari media

massa. Tampak bahwa kesenian rakyat tidak memiliki daya tahan yang memadai dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Dengan memanfaatkan media massa dan juga internet, masyarakat pun makin bebas menentukan pilihan hiburan apa saja berdasarkan seleranya. Secara internal, para seniman tradisional kurang mampu mengembangkan diri sehingga secara estetis pertunjukan mereka kurang berdaya saing ketika berhadapan dengan seni pertunjukan kontemporer dan proses pewarisan seni oleh pelaku kesenian rakyat tersebut belum menemukan metode yang dapat diterapkan secara komprehensif (Ilham, 2015).

Jelas bahwa kesenian rakyat perlu dipertahankan, bahkan dikembangkan karena kesenian rakyat memiliki energi kultural yang besar, yang tidak cukup tersedia pada kesenian-kesenian kontemporer. Masyarakat di seluruh dunia telah sejak lama mengetahui apa saja manfaat kesenian selain sebagai media hiburan. Pengembangan nilai-nilai positif yang menunjang penguatan karakter masyarakat dapat dicapai melalui kesenian. Oleh karena itu, berbagai jenis kesenian tradisi yang selama ini telah terbukti bermanfaat dalam kehidupan masyarakat harus dipertahankan. Sebagai contoh, selama beberapa dasawarsa kesenian janger menjadi salah satu seni pertunjukan rakyat yang berhasil meraih popularitas di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Kesenian ini juga mampu mengundang banyak penonton dan penikmat karena penampilannya sebagai teater rakyat yang tidak hanya menjadi sarana hiburan (tontonan) semata, tetapi juga sekaligus dimaksudkan untuk menampilkan keteladanan (tuntunan) yang dapat dijadikan refleksi tatanan kehidupan sehari-hari (Ilham, 2015).

Persentuhan masyarakat Pendalungan dengan berbagai produk budaya (pop) regional, nasional, ataupun internasional jika dilakukan secara benar justru akan memperkaya nilai-nilai yang selama ini telah dimiliki masyarakat lokal. Akan tetapi, persoalannya tidak mudah menentukan dan membuat standardisasi mengenai bagaimanakah *cara yang benar* itu. Tambahan lagi, budaya pop sering dituduh dekaden, pembawa kehancuran moral, serta tuduhan-tuduhan negatif lainnya. Dunia pendidikan, khususnya pendidikan kesenian, harus

serius ambil bagian. Pendidikan kesenian harus dimaknai, terutama, sebagai upaya pengembangan kesenian daerah. Oleh karena itu, para pelaku pendidikan, khususnya pada pendidikan tinggi seni, berkewajiban untuk terlibat secara aktif dalam penggalian dan pengembangan kesenian di daerah masing-masing.

Pendidikan kesenian telah diberikan sejak pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, bahkan secara khusus sampai pendidikan tinggi. Jika telah berjalan dengan baik sesuai dengan agenda yang direncanakan, mestinya tidak perlu ada kekhawatiran lagi mengenai kelangsungan hidup seni budaya daerah. Dunia pendidikan kita telah membekali generasi muda dengan nilai-nilai budaya bangsa. Oleh sebab itu, mereka mampu menghargai hasil karya budaya bangsanya dan pada akhirnya ikut aktif melestarikannya. Sebagaimana dikatakan Lowenfeld dan Brittain (1982), kegiatan seni dapat membantu setiap individu dalam mengembangkan daya estetika, persepsi, intelektual, emosional, daya cipta, dan teknik.

Untuk tujuan pembelajaran ataupun studi kebudayaan, kesenian masyarakat Pendalungan dapat dipelajari berdasarkan genrenya, antara lain, seni pertunjukan (seni tari, musik, teater), seni rupa, seni sastra, seni arsitektur, seni media rekam, dan seni bela diri. Sementara itu, berdasarkan asal-usul penciptaannya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kesenian hasil adopsi, modifikasi, dan invensi. Contoh-contoh berdasarkan pengelompokan ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan riset berskala luas dan mendalam. Riset semacam itu tidak saja diperlukan bagi upaya pelestarian kesenian, tetapi juga diperlukan bagi upaya pengembangan pariwisata budaya di wilayah Pendalungan Raya.

J. Kentrung Djos, Seni Produk Pendalungan

Dalam sebuah percakapan dengan Prof. Bagio,⁹ penulis sempat terperangah ketika beliau mengatakan, “Contoh paling konkret kesenian asli produk masyarakat Pendalungan adalah Kentrung

⁹ Prof. Bagio, lengkapnya Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr, Ph.D., adalah ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Jember.

Djos” (wawancara pribadi, 12 November 2017). Mungkin karena secara emosional penulis terlibat secara intens dengan Kentrung Djos (Gambar 5.13) sejak awal kelahirannya, tidak terpikir di benak penulis bahwa kesenian ini “Pendalungan banget”. Demikian pula beberapa kawan yang telah puluhan tahun terlibat dalam Kentrung Djos, mereka tidak memikirkannya sebagai produk Pendalungan atau bukan. Mereka lebih suka berpikir di tataran kreatif. Oleh sebab itu, setelah penulis renungkan, tidak ada keraguan lagi untuk mengatakan bahwa sesungguhnya kesenian inilah yang dapat dijadikan sebagai salah satu contoh nyata seperti apa wujud seni pertunjukan khas Pendalungan itu. Kesenian ini tidak saja dilahirkan di Jember, tetapi nyaris keseluruhan aspeknya mencerminkan sifat-sifat Pendalungan yang *mix-culture*.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.13 Grup Kentrung Djos, Salah Satu Pengusung Kesenian Khas Pendalungan

Pada tahun 1982, ketika menjadi mahasiswa baru di Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Jember, penulis dan kawan-kawan seangkatan ditugaskan menyiapkan sebentuk

seni pertunjukan yang unik dan segar untuk acara rutin tahunan malam inaugurasi bagi mahasiswa baru. Penulis mengajukan usul untuk mementaskan seni kentrung dan disetujui. Namun, karena keterbatasan kemampuan penulis dan kawan-kawan serta tiadanya peralatan musik pengiring yang diperlukan, akhirnya kentrung yang ditampilkan bukan kentrung model khas Kediri (sebagaimana yang sudah dikenal orang), melainkan *kentrung modifikasi*. Pementasan pertama yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1982 mengangkat lakon klasik *Joko Tarub dan 7 Bidadari*. Kemudian hari, ketika mendapatkan kesempatan untuk kembali mementaskan kentrung modifikasi tersebut, kami memberi nama kelompok kentrung kami Kentrung Djos. Selain mempertimbangkan kesan enak dan mudah dibunyikan, *djos* merupakan kependekan dari *derap jiwa orang sastra*.

Setelah naik pentas bersama Kentrung Djos, penulis mulai rajin “berburu” pertunjukan kentrung dan berbagai pertunjukan teater rakyat lainnya sebagai referensi pengembangan lebih lanjut Kentrung Djos. Di Blitar, penulis beruntung dapat menyaksikan pertunjukan kentrung yang dikomandani oleh Pak Markam pada tahun 1984. Ia adalah satu-satunya dalang kentrung yang tersisa di daerah tersebut. Di Tulunggung, pada tahun 1986, penulis menyaksikan pertunjukan kentrung dengan dalang seorang perempuan yang juga satu-satunya dalang kentrung yang masih bertahan di daerah tersebut. Di Nganjuk, pada awal tahun 1990-an, penulis menonton dua buah pertunjukan kentrung. Di Banyuwangi, ada pertunjukan *pacul gowang* yang sangat lucu, juga seni janger yang digemari masyarakat. Tak ketinggalan, di Bondowoso dan Jember penulis menikmati pertunjukan kentrung Trio Noer yang khas. Grup kentrung Trio Noer ini berasal dari Bondowoso dan menggunakan bahasa Madura—mampu bertahan hingga awal tahun 2000-an. Aktivitas penulis menonton dan mempelajari aneka model pementasan tersebut cukup berdampak signifikan bagi pengayaan dan pengembangan model pementasan Kentrung Djos pada masa berikutnya.

Para anggota Kentrung Djos yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur turut meramaikan warna-warni budaya kesenian

ini. Misalnya, Supartu dan Yatiman, yang berasal dari Banyuwangi, menyumbangkan corak Banyuwangen yang cukup kental. Suyatno, yang berasal dari Lamongan, memberi nafas Jawa Timuran. Trio Frony dari Ponorogo menyisipkan nuansa Ponoragan dan Yos Rudi dari Madiun serta Maryani dari Blitar memberi warna Mataraman.

Mengenai bentuk khas pementasan Kentrung Djos perlu dijabarkan beberapa hal di sini. Seni kentrung, yang tersebar di daerah Kediri, Blitar, dan sekitarnya, biasanya dalam hanya beranggotakan 2 hingga 4 orang dalam pementasannya. Jumlah ini terdiri dari 1 dalang (sambil memukul kendang atau ketipung) dan 1–3 orang pemusik. Pementasan biasanya berlangsung semalam suntuk (5–7 jam). Dalang bertutur, lalu pemain musik akan *nyenggaki* (menyahuti, menimpali) dengan celetukan, pantun, atau lagu-lagu pendek. Sementara itu, Kentrung Djos selain mempertahankan keberadaan dalang dan pemusik, juga menghadirkan wayang orang, yakni para aktor/aktris yang memperagakan tokoh yang diceritakan oleh dalang. Artinya, Kentrung Djos tidak hanya mementingkan unsur audio, tetapi juga unsur visual. Dalang bertugas mengucapkan dialog, sedangkan para aktor/aktris bertindak sebagai wayang dan berakting sesuai dengan dialog yang diucapkan dalang tersebut.

Pementasan Kentrung Djos lebih singkat, berkisar antara satu hingga dua jam, dengan menggunakan naskah tertulis sebagai basis pertunjukan (model *pakeliran padhet*). Pada perkembangan selanjutnya, Kentrung Djos bereksperimen dengan bentuk pementasan ini sehingga menemukan tiga jenis model pementasan, yaitu (1) dalang mengucapkan dialog, pemain berakting; (2) seluruh pemain mengucapkan sendiri dialog masing-masing (Gambar 5.14); dan (3) gabungan dari kedua model di atas, yakni antara dalang dan pemain berbagi dialog. Dari ketiganya, model yang paling sering dipilih adalah model pertama karena dianggap lebih praktis.

Musik pengiring dalam pertunjukan Kentrung Djos merupakan pengembangan dari kentrung yang sudah ada. Kentrung di Kediri hanya menggunakan peralatan musik yang terbuat dari kulit (kendang, ketipung, terbang, jidur) maka Kentrung Djo melengkapinya dengan

peralatan musik gamelan, seperti gong, saron, demung, kenong, dan siter. Bahkan, jika perlu, dalam situasi tertentu, peralatan musik lain juga dipakai, seperti ukulele, tamborin, *snar-drum*, *keyboard*, dan *bas guitar*. Lagu-lagu yang dimainkan dalam pertunjukan Kentrung Djos tidak hanya terbatas pada parikan dan tembang saja, tetapi juga lagu-lagu kreasi baru (langgam, kercong, dan lain-lain). Gending-gending yang dimainkan sebagai pengiring keluar dan masuknya para tokoh cerita berasal dari berbagai genre seni pertunjukan, mulai dari ludruk, janger, wayang kulit, ketoprak, gending-gending Sunda, Bali, Banyuwangen, dan sebagainya.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 5.14 Grup Kentrung Djos dengan Model Pementasan Drama-Dialog

Kentrung Djos juga memainkan cerita adaptasi dari naskah Barat, seperti *Romeo dan Juliet* atau bahkan naskah ciptaan sendiri, seperti *Djos Sarjana Masa Depan*. Walaupun demikian, kebanyakan cerita yang dimainkan Kentrung Djos merupakan cerita rakyat, yakni cerita-cerita yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, seperti *Sarip Tambak Oso*, *Sakerah*, *Minak Jinggo*, *Sampek Eng Thay*, *Roro Mendut*, dan *Joko Tarup*. Sampai dengan tahun 2023, ketika buku

ini siap diterbitkan oleh Penerbit BRIN, grup Kentrung Djos yang telah bertahan selama lebih dari 40 tahun tetap berkegiatan meskipun aktivitas pementasannya tidak sesering dulu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Bab 6

Globalisasi, Pariwisata, dan Strategi Bertahan

Masyarakat Pendalungan, suka tidak suka, harus berhadapan dengan era globalisasi. Sebagian besar dari mereka mungkin saja belum sungguh-sungguh memahami apa sesungguhnya globalisasi itu. Meskipun tanpa disadari, mereka telah berada di dalam pusarannya.

Yang mula-mula mengintroduksi globalisasi adalah negara-negara Barat. Secara sederhana, pengertian globalisasi adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling gres (Zoebazary, 2014). Fenomena ini diciptakan sebagai pintu gerbang bagi produsen (Barat) menuju wilayah-wilayah pasar (Timur dan/atau negara ketiga). Globalisasi dalam kerangka kapital menghendaki penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Yang diuntungkan oleh keadaan ini tentu saja negara-negara kaya yang memiliki modal kuat, kekuatan intervensi, dan control terhadap pasar dunia. Oleh karena itu, masyarakat Pendalungan yang berpotensi untuk mempunyai ekonomi besar, yang layak menjadi pasar aneka produk, patut mengenal lebih dekat apa dan bagaimana globalisasi tersebut.

A. Globalisasi Membelit Dunia

Istilah global ataupun globalisasi sesungguhnya bukan hal baru. Beberapa ratus tahun sebelum Masehi, Democritus, seorang filsuf, mengatakan bahwa “bagi orang bijak, seluruh dunia ini terbuka karena asal jiwa yang baik adalah seluruh dunia.” Beberapa ratus tahun sesudah itu Nabi Muhammad berkata, “Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina.” Selanjutnya, pada abad ke-15 bangsa-bangsa Eropa berlayar meninggalkan negerinya menuju tanah harapan baru demi memperluas wilayah kekuasaan. Mereka mengincar sumber daya ekonomi baru yang tidak terdapat di negaranya (Zoebazary, 2014). Menurut Kartodirdjo (2003), fenomena globalisasi pada masa lalu itu telah dikenal sebagai gejala “mondialisasi”. Hanya, bedanya, globalisasi masa kini mengalami akselerasi yang luar biasa, tempo yang amat cepat dan kontinu, serta intensif karena media menggunakan teknologi yang makin canggih.

Pada era sekarang, hubungan antarkota, antarnegara, bahkan antarbenua dapat dilakukan dengan mudah dan murah, padahal pada masa dahulu, pemerintah kolonial Belanda membutuhkan waktu berbulan-bulan jika ingin mengonfirmasi perkembangan politik terbaru di Pulau Jawa. Kini masalah itu bisa dilakukan dalam hitungan detik. Jika penduduk kota London dapat menikmati siaran langsung pertandingan sepak bola antara Manchester United vs. Chelsea pada suatu sore, pada saat yang sama para penggemar bola di Desa Antirogo, Jember, yang berjarak ribuan kilometer dari London, juga bisa menyaksikan pertandingan itu melalui parabola. Hal-hal semacam inilah yang oleh para ahli disebut sebagai globalisasi.

Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Levitt (1983) dalam artikelnya “The Globalization of Markets” yang merujuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Selanjutnya, pengertian ini melebar dan menjangkau keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Menurut Barker (2004), globalisasi merupakan koneksi global di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang makin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Hal

ini adalah produksi global atas produk lokal dan lokalisasi produk global. Definisi lain, yang dibuat oleh Bank Dunia, mengatakan bahwa globalisasi adalah proses integrasi ekonomi dan masyarakat melalui arus informasi, ide, aktivitas, teknologi, barang, jasa, modal, dan manusia antarnegara (Stern, 2000). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses integrasi manusia sejagat yang menjadikan dunia menjadi semacam desa global. Jarak antara satu tempat dan tempat lain dihubungkan dengan teknologi informasi sehingga dunia terasa makin sempit dan tanpa sekat pembatas.

Globalisasi ini, tanpa disadari banyak pihak, telah melahirkan kegelisahan yang luar biasa dalam diri masyarakat. Hal itu diakibatkan oleh jangkauan dan dampak globalisasi yang nyaris tak terhindarkan dan merangsang berkembangnya suatu standardisasi kehidupan di berbagai bidang, padahal masyarakat masih ingin tetap mempertahankan ekspresi budaya dan nilai-nilai tradisi leluhur—atau kemungkinan belum siap menghadapi datangnya perubahan. Sungguh tidak mungkin bagi masyarakat untuk menjalani keduanya sekaligus karena pada hakikatnya masyarakat tidak dapat hidup terus-menerus dengan standar ganda. Ekspresi budaya yang berusaha dipertahankan di seluruh lapisan masyarakat biasanya mengacu pada warisan budaya dan nilai tradisi. Salah satu contoh nyata yang masih diperlakukan masyarakat adalah selamatan—sebagaimana telah dituliskan Geertz (1976) dalam *The Religion of Java*—dianggap sebagai sebuah acara komunal yang mengekspresikan sekaligus memperkuat aturan budaya umum dan kekuasaan. Selamatan dimaksudkan untuk melawan kekuatan lain.

B. Globalisasi Media dan Konsumerisme

Teknologi komunikasi telah mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Pendalungan sehingga selalu ada interaksi lintas jarak yang kompleks antara suatu peristiwa lokal dan aneka peristiwa di tempat lain yang mereka jadikan referensi. Akhirnya, peristiwa kultural yang mereka lakukan merupakan bagian dari jejaring budaya global. Perlu disadari bahwa globalisasi media (*globalized media*) telah

terjadi dengan sepenuhnya berlangsung berdasarkan logika ekonomi dan demi pencarian sebesar-besarnya keuntungan. Itulah sebabnya mengapa media massa, misalnya televisi, berlomba memasarkan produknya agar diterima oleh sebanyak mungkin konsumen di seluruh dunia. Industri televisi top dunia tidak didirikan atas nama kepentingan nasional dan demi kemaslahatan umat, tetapi pertama-tama untuk kepentingan ekonomi dan demi keuntungan pemodal. Appadurai (2005) memperkenalkan konsep *mediascape* sebagai perangkat untuk memahami fenomena produksi dan sirkulasi media yang melampaui batas-batas geografis semacam itu.

Revolusi teknologi komunikasi dan transportasi telah menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai belahan dunia. Fenomena mencolok yang mengiringinya adalah tumbuhnya budaya konsumen sebagai akibat dari ekspansi pasar. Budaya konsumsi telah diidentikkan dengan kemajuan zaman. Anda harus mengonsumsi ini-itu. Jika tidak mengonsumsi, Anda bukan bagian dari modernitas. Identitas masyarakat modern dibangun melalui benda-benda massal yang belum tentu memiliki nilai guna bagi si pembeli. Benda-benda semacam itu oleh Baudrillard (2004) disebut sebagai *kitsch*, yakni objek murahan, pernak-pernik sederhana, atau cendera mata. Baudrillard juga menjelaskan bagaimana sifat rakus dan ketidakpuasan tanpa henti para konsumen pada masyarakat modern. Ketidakpuasan ini ditandai dengan “dialektika kefakiran” berupa kebutuhan yang tak terbatas dan tiada henti—suatu logika konstan bahwa orang tidak pernah merasa berkecukupan. Masyarakat konsumsi hanya berkutat dengan objek. Mereka tidak dikelilingi orang-orang lain, tetapi oleh objek. Mereka mengisi dan memenuhi hidupnya dengan objek.

Gaya hidup modern yang dipuja-puja—yang sesungguhnya palsu tersebut—telah tumbuh di Indonesia secara perlahan, tetapi pasti. Mulai dari Jakarta hingga ke daerah-daerah, termasuk Jember, Banyuwangi, dan daerah-daerah Pendalungan lainnya. Sebagian masyarakat Pendalungan, termasuk kalangan elitenya, masih membayangkan kebudayaan modern itu hanya mencakup pemerolehan simbol-simbol lahiriah saja, misalnya kebudayaan

pasar swalayan, masakan siap saji, kafe, dan butik. Semua hal yang hanya memberi kesan artifisial dan tidak membangun relasi batiniah. Modernitas palsu semacam itu tidak memberi sumbangan apa pun terhadap identitas kultural Pendalungan, kecuali identitas semu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Jember toko waralaba modern tumbuh menjamur tak terkendali dan mengikis toko-toko model konvensional yang telah dibangun masyarakat sejak lama.

Media jelas memengaruhi intensitas globalisasi. Jika merujuk pada konsep kebudayaan termediasi (*mediated culture*) yang dinyatakan oleh Askew dan Wilk (2002), kebudayaan lahir dalam kaitannya dengan keberadaan media yang tidak sekadar menempatkannya dalam relasi antara organisasi media dan orang, tetapi juga menghubungkan orang-orang yang melebihi batas geografis mereka. Hubungan tersebut diletakkan dalam relasi produsen-konsumen ataupun produser-audiens. Konsep *mediated culture* dikaji pula oleh antropolog Mazzarella (2004) dalam artikelnya “Culture, Globalization and Mediation”. Menurutnya, mediasi merupakan konsep kunci untuk melihat kebudayaan dalam kerangka fenomena globalisasi. Proses globalisasi telah menyebabkan perubahan terhadap konsep kebudayaan yang pada awalnya memiliki batasan teritorial yang konkret menjadi sesuatu yang kompleks dan abstrak. Hal ini menyebabkan kebudayaan dan identitas sebuah kelompok masyarakat, yang pada awalnya cukup jelas, menjadi sulit untuk diidentifikasi. Mediasi, melalui media massa, harus ditempatkan sebagai aspek kunci yang membentuk nilai-nilai yang signifikan dalam sebuah kebudayaan. *Media* dan *proses mediasi* menjadi dua konsep kunci dalam memahami kebudayaan karena memungkinkan sebuah kelompok masyarakat untuk mengambil pesan sekaligus membentuk kembali pesan tersebut dan menyebarkannya untuk kepentingannya sendiri. Media massa menjadi mediator utama antara kebudayaan dan masyarakat serta menjadi mediasi antara kebudayaan kelompok tersebut dan kebudayaan kelompok lain. Fungsi mediasi tersebut berjalan ketika media massa merepresentasikan suatu kebudayaan dan kemudian bergerak terbalik dengan merefleksikan kebudayaan tersebut kepada kelompok masyarakat si empunya kebudayaan itu.

Media massa juga memberikan kesempatan pada masyarakat tersebut untuk membandingkan kebudayaannya sendiri dengan kebudayaan kelompok lain yang dapat mereka saksikan melalui media.

Masyarakat Pendalungan pada masa kini, sebagaimana masyarakat lainnya di tanah air, tidak bisa menghindar dari media. Tidak ada seorang pun saat ini yang dapat melepaskan diri dari intervensi dan pengaruh media koran, televisi, film, video, radio, internet, dan sebagainya. Terlebih pada saat ini ponsel telah menjadi hal yang lumrah bagi hampir setiap orang, mulai dari orang tua hingga anak-anak di sekolah dasar. Oleh karena itu, di tengah perubahan lanskap sosial-budaya yang dipengaruhi media semacam itu, kita sebaiknya juga mempertimbangkan konsep kebudayaan yang tidak semata-mata berdasarkan hal-hal konkret (*tangible*), seperti batas-batas geografis, model pakaian, dan bentuk bangunan. Dengan demikian, identitas kebudayaan tidak lagi bisa dikonsepsikan sebagai entitas utuh yang bersifat lokal dengan standar nilai tertentu yang mapan dan penuh kepastian. Berbagai pandangan, norma, dan nilai sudah saling bersinggungan karena diintroduksi oleh media massa lewat sirkulasi global.

Jika kita amati secara saksama, pilihan masyarakat Pendalungan terhadap jenis atau konten suatu media memengaruhi aneka tindakan dan praktik kebudayaan yang mereka lakukan dalam keseharian. Berbagai pertunjukan kesenian di atas panggung atau yang ditayangkan televisi (kabel) lokal dapat dianggap sebagai cerminan fenomena sosial karena seluruh proses produksi kesenian tersebut pada dasarnya merupakan proses sosial yang tidak berlangsung di ruang hampa. Sebaliknya, kesenian tersebut pada gilirannya akan memberikan pengaruh pada kebudayaan masyarakat Pendalungan lainnya secara lebih luas.

C. Globalisasi di Tapal Kuda

Tatanan masyarakat global memperlihatkan keterhubungan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Unsur-unsur budaya suatu masyarakat dapat dengan mudah ditemukan pada masyarakat lainnya.

Misalnya, gaya arsitektur rumah Minang dapat ditemukan di Bali, demikian pula sebaliknya. Bahkan, model rumah joglo khas Jawa dapat ditemukan di Benua Amerika dan model rumah Mediterania dapat ditemukan di perumahan-perumahan di seluruh pelosok Pulau Jawa.

Dalam banyak aspek, masyarakat Pendalungan Raya telah secara langsung merasakan dampak globalisasi tersebut. Globalisasi mendorong terjadinya penyeragaman bentuk ataupun cita rasa produk-produk kultural secara perlahan, tetapi pasti. Akibatnya, keberadaan produk-produk budaya lokal mulai mengalami ancaman serius. Contohnya, bangunan rumah orang Jawa sudah jarang menggunakan landasan tata arsitektural khas tradisional Jawa lagi. Demikian pula halnya dengan bangunan khas rumah orang Madura. Sementara itu, masyarakat Situbondo dan Bondowoso sudah tidak melirik rumah model tabing-tongkok yang khas dan orisinal. Berbagai alasan bisa dikedepankan berkenaan dengan hal ini, misalnya, demi kepraktisan serta pembiayaan yang murah. Rumah-rumah di kompleks perumahan atau bangunan rumah baru di kampung-kampung kini sudah meninggalkan identitas arsitektur lokal. Rumah orang Jawa, Madura, Using, Tionghoa, Arab sudah tidak menunjukkan identitas kultural mereka. Wujudnya sudah sama dan sebangun dengan *kepraktisan* dan *biaya murah* sebagai pertimbangan utama.

Di Tapal Kuda, kita tidak bisa lagi menemukan dengan mudah perempuan Jawa sebagaimana yang digambarkan dalam sastra lama: *bangkekane nawon kemit* (pinggangnya ramping), *gulune ngelung gadhung* (lehernya jenjang), *pakulitan ngulit langsep* (kulitnya kuning langsat), dan *rambuten ngembang bakung* (rambutnya berombak). Perempuan Jawa di daerah ini telah menutup seluruh badannya dengan busana yang tidak memungkinkan orang lain untuk melihat tubuhnya secara langsung. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, mereka telah didorong untuk mengenakan pakaian yang diklaim *menutup aurat perempuan*.

Pada satu sisi, globalisasi bisa sangat menguntungkan dan mendatangkan manfaat, tetapi di sisi lain bisa menjadi ancaman serius

bagi eksistensi budaya lokal. Menurut Hsiao (2005), ada empat dampak yang dihasilkan dari perjumpaan globalisasi dengan kebudayaan lokal. *Pertama*, sebagaimana sering ditakutkan oleh banyak orang, budaya lokal akan tergeser oleh budaya global. Banyak contoh yang bisa kita berikan, misalnya pakaian kebaya diganti blus; kerudung diganti jilbab; aneka permainan tradisional anak-anak diganti dengan *game on-line*. *Kedua*, budaya lokal dan global hidup berdampingan tanpa ada penyatuhan berarti di antara keduanya. Sebagai contoh ialah musik Barat dan musik gamelan. Keduanya berkembang di jalur dan panggungnya sendiri-sendiri walaupun sesekali terjadi persinggungan kreatif. *Ketiga*, perpaduan antara budaya lokal dan global menghasilkan suatu produk budaya baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya, penggabungan elemen-elemen musik Barat dan elemen-elemen musik gamelan menjadi musik campursari. *Keempat*, budaya global ditolak oleh budaya lokal. Contohnya, di Bali tidak diperkenankan mendirikan bangunan pencakar langit dengan ketinggian tertentu. Ketinggian bangunan dibatasi maksimal 15 meter atau secara tradisional *tidak lebih tinggi daripada pohon kelapa*.

Globalisasi secara simultan menghasilkan dua dampak. Di satu sisi, globalisasi melenakan masyarakat sehingga mereka dengan mudahnya memungut nilai-nilai baru begitu saja tanpa saringan dan meninggalkan nilai-nilai lama yang telah dianut turun-temurun. Di sisi lain, globalisasi merangsang timbulnya pergulatan seru antara nilai-nilai budaya lokal dan global. Pergulatan tersebut tidak jarang menghasilkan produk kultural baru atau yang diperbarui. Di Jember, contoh paling otentik mengenai hal ini adalah Jember Fashion Carnaval (JFC). Dalam kasus JFC, ekspansi budaya global yang tak terelakkan itu justru memantik peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi budaya lokal, regional, ataupun nasional. Meskipun pengaruh Islam cukup kuat terhadap masyarakat Pendalungan, Sutarto (2006) berpendapat bahwa mereka dianggap sebagai masyarakat yang tidak alergi terhadap selera global, terutama yang terkait dengan gelombang *food, fashion, and fun*, terbukti dengan munculnya JFC.

D. Strategi Bertahan

Di tengah serbuan globalisasi yang segencar ini, bagaimana mungkin seseorang atau sekelompok orang merasa yakin dapat mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya tanpa strategi yang komprehensif?

Sesungguhnya, identitas budaya lokal dapat digunakan sebagai gaya hidup masyarakat modern. Namun, hal ini memerlukan komitmen pemerintah daerah, kaum cendekia, serta para tokoh masyarakat. Meskipun era globalisasi dan abad elektronika telah kita masuki, masyarakat kita masih bergantung pada orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam hal-hal tertentu. Sehubungan dengan hal ini, sudah semestinya jika tiap-tiap pemerintah daerah di Tapal Kuda mendayagunakan modal sosial dan kultural masyarakat Pendalungan. Konsep Pendalungan, sebagai suatu entitas kebudayaan lokal, dapat diacu sebagai visi untuk membangun masyarakat setempat dengan melibatkan berbagai potensi lokal, dari mulai tingkat desa hingga kecamatan. Pendalungan adalah visi sosiokultural yang diharapkan mampu memperkokoh integrasi dan kohesi masyarakat di tiap daerah di Tapal Kuda.

Memang lokalitas kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks. Sebagaimana dijelaskan Mazzarella (2004) bahwa dalam suatu tindakan yang dilakukan terdapat unsur yang berasal dari kebudayaan lain yang sudah terserap menjadi kebudayaan lokal. Minuman yang diminum merupakan air mineral dalam kemasan; komputer yang digunakan merupakan hasil produksi negara lain; pakaian yang dikenakan juga tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan kelompok lain. Di Jember dan Banyuwangi, elemen-elemen musik, tari, dan busana Bali telah menjadi lokal dalam seni janger. Seni ludruk, wayang kulit, dan reog telah menjadi lokal bagi masyarakat Jember. Dalam hal ini, Pendalungan telah identik dengan apa yang kita sebut dengan lokalitas kebudayaan tersebut.

Selanjutnya, pertanyaan yang perlu dikedepankan adalah dari manakah masyarakat memperoleh suntikan energi kreatif untuk mengembangkan kebudayaan mereka? Pertanyaan ini bisa dijawab

dengan sebuah contoh. Di Pulau Bali ada acara tahunan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang dilaksanakan sejak tahun 1978. Acara ini digelar selama satu bulan penuh pada bulan Juni–Juli. Pada acara tersebut ada berbagai kegiatan, misalnya pawai, pementasan, pameran, lomba, dan diskusi. Memang acara hanya berlangsung selama satu bulan, tetapi sesungguhnya masyarakat telah berproses sepanjang tahun dalam mempersiapkan diri agar bisa berpartisipasi dalam acara tersebut. Proses persiapan dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Dalam proses panjang tersebut, disadari atau tidak, telah terjadi pembelajaran dan internalisasi atau penanaman intensif nilai-nilai dasar kultural di seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya, identitas kultural akan terus tumbuh dan bahkan makin menguat sehingga makin merekatkan masyarakat. Kegiatan tersebut memiliki daya rekat yang cukup tinggi karena sejumlah kepentingan masyarakat terakomodasi, bukan hanya demi program pemerintah daerah.

Di kawasan Tapal Kuda, *Pendalungan* sebagai sebuah konsep budaya harus diberi ruang untuk berkembang dan memantapkan diri. Oleh karena itu, rujukan terhadap pendapat Sutarto (2006) harus dipandang sebagai langkah awal. Misalnya, Sutarto beranggapan bahwa ciri-ciri masyarakat Pendalungan adalah sebagai berikut.

- 1) Dominan agraris tradisional dan berada di pertengahan jalan antara masyarakat tradisional dan industri. Tradisi dan mitos mengambil tempat yang dominan dalam kesehariannya.
- 2) Sebagian besar masih terkungkung oleh tradisi lisan tahap pertama (*primary orality*) dengan ciri-ciri suka mengobrol, *ngrasani* (membicarakan aib orang lain), dan takut menyimpang dari pikiran dan pendapat yang berlaku umum.
- 3) Terbuka terhadap perubahan dan mudah beradaptasi.
- 4) Ekspresif, transparan, tidak suka memendam perasaan atau berbasa-basi.
- 5) Paternalistik: Keputusan-keputusan bertindaknya biasanya mengikuti keputusan yang diambil oleh para tokoh yang dijadikan panutan.

- 6) Ikatan kekeluargaan sangat solid sehingga penyelesaian masalah sering kali dilakukan dengan cara keroyokan.
- 7) Sedikit keras dan temperamental.

Seperti halnya masyarakat lain di seluruh penjuru dunia, masyarakat Pendalungan akan terus berproses, mengembangkan potensi diri, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Masyarakat Pendalungan tidak mungkin menutup diri dan menghindar dari pengaruh arus perubahan dunia. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Sebagaimana disarankan Arybowo (2010) bahwa globalisasi adalah jiwa zaman sehingga perlu dihadapi dengan usaha rasional dan produktif dengan etos baru. Dengan cara itulah nantinya masyarakat Pendalungan dapat kembali membumi dengan lokalitas kebudayaan mereka sendiri.

E. JFC, Wujud Sebuah Tradisi

Meskipun JFC (Gambar 6.1) telah disebutkan di beberapa bagian di dalam buku ini, penulis menganggap bahwa diskusi tentang JFC masih perlu ditambahkan secara lebih khusus. Bagi penulis, secara konseptual, masyarakat Pendalungan lebih dekat pada budaya urban daripada budaya agraris-tradisional dan hingga saat ini JFC adalah representasi terbaik budaya urban masyarakat Pendalungan. Memang pada kenyataannya tanaman tembakau serta produk-produk pertanian lainnya masih cukup menjadi andalan sektor ekonomi masyarakat, tetapi secara sosiokultural telah terjadi pergeseran orientasi secara signifikan. Aktivitas di dunia *fesyen*, yang menjadi salah satu ciri utama masyarakat modern, telah menjadi bagian dari kegiatan rutin tahunan masyarakat Jember.



Foto: Mochamad Ilham (2017)

Gambar 6.1 Peserta JFC tampil dengan konsep utamanya yang terkesan glamor dan grande.

JFC adalah sebuah karnaval berbasis kreasi dan rias yang setiap tahun digelar di pusat Kota Jember. Acara ini digelar rutin setiap bulan Agustus sejak tahun 2002. Perhelatan JFC melibatkan tidak kurang dari seribu orang yang berparade di jalan raya sepanjang 3,6 kilometer, mulai dari alun-alun kota hingga GOR Kaliwates. Para peserta—yang sebagian besar terdiri atas pelajar dari sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Jember—memamerkan busana hasil rancangan mereka sendiri. Tema yang diusung setiap tahun selalu berbeda dan disesuaikan dengan tren atau isu global yang terjadi pada tahun itu. Misalnya, pada waktu Aceh dilanda bencana tsunami, tema yang diusung JFC adalah tsunami. Begitu juga saat piala dunia sepak bola digelar empat tahun lalu, ada defile yang menampilkan tema dunia sepak bola. Dalam setiap pergelaran tahunannya tersebut, JFC ditonton lebih dari 100.000 orang.

Kita harus memandang JFC sebagai bagian dari industri budaya kontemporer. Tambahan lagi, dalam dasawarsa terakhir, seluruh dunia

sedang bergerak ke arah itu. Industri budaya mencakup segala sesuatu yang menghasilkan produk pesan budaya dan berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan dan dapat memengaruhi pandangan hidup, pikiran, sikap, perilaku, dan selera masyarakat yang mengonsumsinya (Arybowo, 2010). Dengan meletakkan JFC sebagai bagian dari industri budaya, kini kita tidak perlu lagi bertengkar soal “apakah JFC itu sebuah produk kesenian?” atau “apakah JFC itu merupakan representasi masyarakat Jember (yang religius)?” atau “apakah JFC layak didukung?”

1. Referensi Historis JFC

Sulit untuk mengatakan bahwa JFC merupakan produk kultural masyarakat Jember yang dalam proses produksinya berlangsung tanpa referensi yang bersifat historis. Meskipun tampak mahal, glamor, modern, *grande*, dan asing, sesungguhnya spirit JFC adalah lokal-tradisional.

JFC adalah semangat global yang dilokalkan karena menemukan ladang yang memiliki tradisi karnaval (arak-arakan, kirab, pawai). Jika seandainya pementasan *fashion* yang digagas Dynand Faris itu digelar di atas *catwalk* biasa, JFC akan menjadi tontonan asing yang sulit untuk membumbui bagi mayoritas masyarakat Pendalungan. Di sini dan bahkan di seluruh pelosok Indonesia tidak ada tradisi *catwalk*. Akan tetapi, karena pertunjukan *fashion* tersebut digelar di jalan dengan tajuk *karnaval*, ia menjadi dengan mudah *dilokalkan*.

Apakah Anda belum pernah menonton karnaval sebelum JFC muncul? Apakah Anda belum pernah mendengar kata karnaval sebelum JFC muncul? Tentu Anda sudah pernah menonton atau bahkan terlibat di dalamnya dan akrab dengan kata karnaval. Ada tradisi karnaval di sini. Dari kota ke kota; desa ke desa. Setiap tahun kita bisa menemukan acara karnaval dalam rangka peringatan 17 Agustus. Kita tidak jarang terjebak kemacetan di sepanjang bulan Agustus karena ada karnaval di mana-mana. Kita juga bisa menemukan dengan cukup mudah acara karnaval khas dalam rangka ritual—yang di Jawa disebut dengan *kirab*. Bedanya adalah jika *kirab* dicitrakan mistis-tradisional, karnaval sangat profan-kontemporer.

Catwalk adalah tradisi Barat, sedangkan karnaval adalah tradisi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, telah terjadi akulturasi budaya yang intens dalam proses kreatif JFC. Yang dimaksud dengan akulturasi, menurut Koentjaraningrat (1986), adalah suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan cara sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah atau dilebur ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Jadi, kita berada pada suatu proses sosial yang disebut akulturasi manakala kebudayaan kita berhadapan dengan kebudayaan lain, kemudian kebudayaan lain tersebut kita terima dan serap ke dalam kebudayaan kita dengan nyaman tanpa menyebabkan hilangnya elemen-elemen kebudayaan sendiri. Dengan kata lain, kita memadukan secara kreatif kebudayaan kita dengan kebudayaan lain sehingga menghasilkan suatu produk budaya baru. JFC secara intensif telah melewati tahap ini.

Fashion memang tradisi asing, tetapi apa yang dilakukan JFC bukan semata-mata memindahkan yang asing tersebut ke Jember. JFC bukan Mardi Gras (Amerika) yang dipindah ke Jember. Juga bukan pemindahan lokasi Rio Carnival (Brazil) atau Notting Hill Carnival (Inggris) ke Jember. JFC memosisikan dirinya sebagai kreator dengan basis akulturasi budaya. Oleh karena itu, selain terlihat elemen-elemen seni dari berbagai penjuru dunia, dapat dengan mudah kita temukan elemen-elemen Jawa, Madura, Kalimantan, Papua, Sumatra, serta aneka kekayaan desain lokal khas Indonesia lainnya dalam karya-karya JFC. Jangan pernah lupa meskipun kata *karnaval* adalah kata serapan, karnaval bukanlah tradisi asing bagi kita. Ada karnaval 17-an di mana-mana di tanah air; ada kirab-kirab tradisional di berbagai ruang kultural daerah. Pada desain dan tradisi lokal itulah letak akar historis JFC berasal.

2. Dari Personal ke Komunal

JFC, yang digagas Dynand Fariz, merupakan contoh kreasi yang lahir dari proses hibridisasi budaya. Dynand Fariz, sebagai pribadi, menempati posisi sentral dan menentukan. Namun, dalam perkembangannya, JFC tidak bisa lagi dikategorikan sebagai karya personal. Ia telah membesar sedemikian rupa sehingga menjadi kreativitas komunal. Hal itu bisa terjadi karena (1) konsep JFC adalah pertunjukan massal dan (2) JFC diterima publik sebagai milik mereka bersama.

JFC bukan *fashion show* biasa. Ia merupakan suatu genre seni pertunjukan yang menggabungkan peragaan busana dan karnaval. Tambahan lagi, busana yang diperagakan adalah hasil kreativitas para peserta. Artinya, setiap peserta harus menjadi desainer yang merancang sendiri kostum untuk dirinya, kemudian memeragakannya dengan berperan sebagai model bagi rancangannya sendiri, termasuk menangani sendiri tata rias wajah dan tubuhnya (*body painting*). Dalam memeragakan kreasi, para peserta tidak hanya berjalan seperti para model di atas *catwalk*, tetapi juga memperkaya penampilannya dengan unsur tari dan gerak-gerik teatrikal. Para peserta JFC dipersiapkan melalui *in house training*, diberikan wawasan tentang perancangan busana, tata rias, *fashion run way*, dan sebagainya. Hal-hal semacam itulah yang menjadikan JFC menempati kategori sebagai karya komunal.

Selain berhasil melahirkan kreator-kreator muda di bidang *fashion* dan memberikan suguhannya hiburan segar bagi masyarakat, JFC juga berdampak secara ekonomi bagi Jember. JFC berperan sebagai “motor” yang membantu pergerakan pertumbuhan ekonomi. Menurut catatan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember, pengunjung yang datang setiap tahun sekitar 50.000 orang yang berasal dari luar Jember. Bahkan, tidak sedikit yang datang dari luar negeri. Mereka memiliki kepentingan dengan JFC, antara lain, sebagai fotografer atau jurnalis. JFC juga telah mengilhami enam provinsi untuk menggelar kegiatan serupa, yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Keenam

provinsi tersebut bekerja sama dengan JFC untuk menggelar karnaval. Supaya terdapat standardisasi karnaval, baik secara nasional maupun internasional, dibentuklah Asosiasi Karnaval Indonesia (Akari). Dynand Fariz, Presiden JFC, ditunjuk sebagai ketua.

3. Posisi JFC

Bagaimanakah posisi JFC di tengah-tengah masyarakat Jember yang terus berproses mengembangkan kebudayaannya? Masyarakat Jember, sebagaimana masyarakat Pendalungan lainnya, terdiri atas orang-orang merdeka yang tidak terpenjara dalam kerangkeng sejarah kebudayaannya sendiri. Mereka tidak memiliki beban kultural yang berat yang mengharuskan mereka taat pada tradisi adiluhung warisan nenek moyang. Inilah alasan utama mengapa masyarakat Pendalungan begitu mudahnya menyerap produk budaya yang *sangat asing*, kemudian membumikannya sehingga menjadi tradisi yang mewarnai kehidupan masyarakat.

Hasilnya? JFC dapat menjadi contoh paling nyata. Awal-awal tahun kehadiran JFC, secara kultural, masyarakat belum siap menerimanya. JFC menyuguhkan sebuah lompatan budaya yang terkesan mendadak dan tanpa landasan historis pada masyarakat sehingga memberi beban kultural yang cukup berat saat itu. Masyarakat Jember, sebagai tuan rumah perhelatan JFC, membutuhkan waktu sekitar lima hingga delapan tahun untuk melewati masa transisi dari menolak hingga menerima JFC. Pertanyaannya, setelah melewati masa transisi itu, apakah masyarakat sudah bisa menerima produk-produk budaya lain sekaliber JFC? Tampaknya sebagian masyarakat Indonesia sudah bisa menerima. Salah satu indikatornya ialah sebagian masyarakat Indonesia ingin dan telah mereproduksi keberhasilan JFC dalam berbagai bentuk dan versi.

Sementara itu, pada saat ini sebagian masyarakat Indonesia masih berada di *extended transition phase* yang membutuhkan waktu yang lebih panjang, baik secara moral, mental, dan kultural, untuk bisa menerima karya cipta seperti JFC atau sejenisnya. Walaupun demikian, tidak berarti mereka *udik, ndesit*, ketinggalan zaman, atau

semacam itu karena JFC tidak bisa dijadikan indikator. Mungkin saja mereka punya selera lain.

Sekarang memang JFC baru berumur 15 tahun. Belum ada dua atau tiga generasi sebagaimana biasa disyaratkan pada sesuatu untuk layak dianggap sebagai sebuah tradisi. Penulis tidak sepenuhnya menyepakati anggapan semacam itu. Harus kita lihat kasusnya. Penulis beranggapan bahwa 15 tahun yang telah dilalui dengan keajekan yang terjaga serta dampak sedahsyat itu maka JFC layak untuk disebut sebagai sebuah produk kultural tradisional masyarakat Pendalungan. Bahkan, Banyuwangi dan Solo yang selama ini dikenal sebagai daerah kaya raya dalam hal produk budaya tradisional, tidak mampu melakukannya. Jadi, tradisi juga mencakup berbagai aktivitas yang memiliki tingkat keajekan yang memadai dan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang melaksanakannya walaupun belum dilakukan secara turun-temurun.

Inilah saatnya kita mengkaji ulang makna kata *tradisional*. Dalam kerangka pengembangan seni budaya daerah, pemakaian kata *tradisional* ini penulis anggap masih diperlukan. Akan tetapi, ketika kita sungguh-sungguh menguji dengan data sejarah, konsep para seniman tentang *tradisi* sering kali hanya sebatas “kulit” dan dalam beberapa hal justru bersifat sangat kontemporer.

Dalam menilai JFC, kita tidak bisa hanya berdasarkan pada *grand show* yang ditampilkan selama beberapa jam di hamparan *catwalk* jalanan sepanjang 3,6 km itu saja. Ada proses panjang yang telah dilewati sebelum karnaval busana itu digelar. Selama berbulan-bulan para peserta dididik dan digembleng di ruang-ruang kelas, baik secara teoretis maupun praktis, bagaimana menjadi seorang kreator. Dengan demikian, sejatinya yang tampil di *catwalk* jalanan itu bukan hanya seorang model atau peraga, melainkan juga sekaligus seorang kreator.

4. Menyikapi JFC

Di wilayah Pendalungan, yang masyarakatnya secara kultural dianggap *tidak memiliki apa-apa*, para seniman justru memiliki keuntungan lebih besar jika dibanding dengan mereka yang berada di wilayah

mapan, seperti Banyuwangi, Ponorogo, dan Solo. Para seniman Pendalungan tidak perlu repot-repot mencari akar pijakan filosofis yang rumit dalam berkesenian sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam berkarya. Konsekuensinya lahirlah produk budaya yang liar, memberontak, dan tidak *mainstream*, seperti JFC.

Setelah memperhatikan perkembangan JFC, sekarang kita dapat membandingkannya dengan perkembangan yang terjadi di Banyuwangi. Wilayah yang disokong masyarakat Using dan Pendalungan ini telah memperlihatkan perkembangan pariwisata yang mengagumkan dalam dua dasawarsa terakhir. Berkenaan dengan hal ini, tentu saja kita boleh bertanya-tanya atau merasa khawatir terhadap kelangsungan *keajaiban perkembangan pariwisata budaya Banyuwangi* yang mungkin dibangun berdasarkan landasan yang lemah. Betapa tidak? JFC, dengan segala keterbatasan anggarannya, mampu menarik lebih banyak kehadiran turis asing *ketimbang* Banyuwangi yang limpah ruah akan kekayaan seni budaya dan promosi agresif ratusan miliarnya.

Ketika Jember menjadikan JFC sebagai ikon pariwisata budaya daerah, ini merupakan keputusan yang strategis. Lahirnya produk budaya yang mendapatkan sambutan luas, baik secara nasional maupun internasional, tidak hanya patut disyukuri karena telah membawa dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Jember pada khususnya serta Indonesia pada umumnya, tetapi juga harus disikapi secara rasional. Artinya, semua pihak tidak boleh hanya memetik manfaat ekonomis sebesar-besarnya atas penyelenggaraan JFC, tetapi juga harus turut menjaganya agar tidak sampai menyeret masyarakat pada suatu gaya hidup baru yang hanya menonjolkan sisi hiburan dan bisnisnya. Kehadiran JFC tidak boleh menjauhkan masyarakat dari kebanggaan terhadap kekayaan budaya sendiri.

Kaum intelektual di lingkungan perguruan tinggi harus membantu mendorong pertumbuhan industri budaya menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya meningkatkan derajat kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jika tanpa wawasan kultural

dan filosofis, industri budaya akan menuntun lahirnya manusia “berkacamata kuda”—manusia berdimensi tunggal. Marcuse (1964) telah mengkritik masyarakat di negara-negara maju, seperti Jerman, yang mengalami keguncangan dan ketersinggan dengan dunianya karena telah berubah menjadi manusia berdimensi tunggal, padahal secara kodrati manusia itu sebenarnya multidimensi.

F. *City Branding*: Jember Kota Pendalungan

Dalam waktu relatif pendek, masyarakat Jember telah “dibombardir” topik hangat mengenai Pendalungan. Pada tanggal 2 Mei 2016, Rumah Budaya Pandhalungan dan Komunitas Pandhalungan diresmikan di Desa Ajung, Jember. Dua hari berikutnya, yakni pada tanggal 4 Mei, RRI Jember mengadakan Sarasehan Budaya Pandhalungan yang menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai kalangan.¹⁰ Yang paling heboh ialah pada tanggal 13–14 Mei, Kantor Pariwisata Jember menggelar Festival Pandhalungan. Puncaknya, Bupati Jember mencanangkan Jember sebagai Kota Pandhalungan. Uniknya ketiga acara tersebut berdiri sendiri-sendiri, bukan suatu rangkaian yang telah dipersiapkan dan dirancang sebelumnya.

Gairah apakah yang menjangkiti masyarakat Jember sehingga menghadirkan topik tersebut? Secara substansial, penulis melihat hal itu sebagai sebuah desain untuk “menjual daerah”. Sebuah kesadaran mengenai *city branding strategy*.

Sejak beberapa tahun yang lalu, kita menyaksikan tayangan iklan pariwisata di televisi *Malaysia Truly Asia* dengan intensitas penayangan yang cukup tinggi. Itu adalah upaya yang dilakukan Malaysia untuk menjual potensi wisatanya ke seluruh dunia. Sungguh sulit dibayangkan, dalam era milenium seperti sekarang ini, Malaysia justru menstempel atau melabeli dirinya sebagai “benar-benar Asia”! Dan hasilnya? Dalam beberapa tahun terakhir kunjungan wisatawan asing ke sana melonjak drastis (Indonesia masuk tiga besar

¹⁰ Penulis turut diundang dalam forum ini sebagai salah seorang pembicara. Makalah yang penulis presentasikan berjudul “Memahami Masyarakat dan Kultur Pandalungan”.

pengunjung ke Malaysia). Jumlah wisatawan asing yang datang ke Malaysia jauh mengungguli Indonesia serta beberapa negara tetangga lainnya. Itulah yang disebut dengan penjenamaan (*branding*).

Malaysia, Singapura, dan Thailand adalah tiga negara tetangga kita yang menyadari pentingnya penjenamaan. Mereka membuat konsep yang mengedepankan keunikan negara masing-masing, kemudian mempublikasikannya ke seluruh dunia dengan sangat serius dan terencana melalui berbagai media massa. Di Indonesia saja, pada masa awal promosinya, Malaysia mendirikan dua buah posko sosialisasi slogan “Malaysia Truly Asia”, yaitu di Jakarta dan Medan. Berkali-kali Deputi Menteri Pariwisata Malaysia *keluyuran* ke beberapa kota besar di Indonesia. Dia mengundang sejumlah kalangan untuk *dinner* di hotel berbintang lima sembari beriklan tentang alangkah nyamannya melancong ke Malaysia.

Sebagaimana yang dilakukan Malaysia, apa yang dilakukan Pemkab Jember dengan memberi julukan pada kota Jember sebagai *Kota Pandhalungan* pada dasarnya merupakan konsep *city branding*. Hal semacam ini sebelumnya sudah sering dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya pada era Orde Baru. Penulis mempunyai beberapa catatan mengenai *branding* di kota-kota lain di Indonesia, yang biasanya tidak disertai implementasi yang sungguh-sungguh nyata dan berkesinambungan.

City branding sering kali disederhanakan sebagai persoalan menciptakan logo, slogan, dan promosi segencar-gencarnya, padahal persoalan yang sesungguhnya ialah jauh lebih dalam lagi. Oleh karena itu, *city branding* harus dipandang dengan perspektif holistik dan komprehensif. Sebuah strategi boleh diawali dengan kata-kata, tetapi selanjutnya harus diwujudkan dengan tindakan nyata yang terencana. Logo dan slogan hanyalah gambaran visi bersama dan tidak akan berdampak cukup berarti tanpa tindakan nyata. Promosi hanya menghasilkan perhatian dan ketertarikan sesaat. Akan tetapi, kecil kemungkinannya untuk dapat mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan yang kita harapkan.

Tujuan akhir sebuah penjenamaan, jika diletakkan di ranah pariwisata, adalah memikat para wisatawan agar sudi berkunjung. Itu berarti devisa bagi daerah/negara. Selain itu, proses penjenamaan akan membuka atau menggairahkan beberapa lapangan kerja bagi masyarakat, misalnya perajin. Bukankah para turis gemar membeli suvenir untuk kenang-kenangan? Sektor-sektor lain yang dikelola masyarakat, misalnya hotel dan restoran, juga akan ikut menikmatinya. Oleh karena itu, makin panjang *length of stay* para wisatawan, makin besar keuntungan yang akan diperoleh masyarakat.

Sekali lagi apa yang harus dipahami adalah bahwa penjenamaan bukan hanya persoalan beriklan. Penjenamaan adalah masalah yang sangat kompleks. Bukan saja mengenai pengelolaan tempat wisata yang indah dan menarik, sarana jalan dan transportasi yang memadai, penginapan dan makanan yang mengesankan, serta sikap masyarakat yang santun, melainkan juga upaya pencitraan secara menyeluruh. Dengan demikian, jika Jember ingin mewujudkan *city branding*, hal itu tidak mungkin “dipikul” oleh dinas pariwisata sendirian. Seluruh komponen masyarakat Jember harus terlibat. “Menjual Jember” tidak berarti pemkab hanya menawarkan eksotisme Jember pada orang luar, tetapi pada saat yang sama juga *selling the brand inside* secara terus-menerus untuk *menerpa* benak masyarakat dengan jenama yang kita tawarkan. Upaya internalisasi nilai-nilai semacam ini tidak bisa instan. Proyek ini adalah proyek sosiokultural yang ambisius sekaligus sebuah variabel jangka panjang. Nah, di sinilah, antara lain, urgensi keterlibatan *gerakan publikasi*.

Oleh karena itu, *city branding* akan lebih efektif apabila didukung dengan *mass campaign strategy*. Singapura berhasil melakukan *mass campaign* atau *mengiklankan diri* dengan memberi penekanan pada beberapa negara sekaligus. Negara yang mem-*branding* dirinya sebagai “New Asia” itu kini tidak hanya didatangi orang-orang kaya yang ingin berbelanja, tetapi juga mereka yang ingin berobat dan menimba ilmu. Dokter-dokter dan rumah sakit terbaik ada di sana; para ilmuwan dan perguruan tinggi terbaik juga ada di sana. Hal ini tidak dicapai Singapura secara mudah dan instan. Melalui *Great*

Sale yang dilakukan perwakilan Singapore Tourism Board di berbagai negara, Singapura terus mengiklankan dirinya sebagai sebuah negara dengan *new opportunities and lifestyle*.

Yogyakarta sudah pernah mencoba menjenama dirinya sebagai sebuah kota dengan label “Never Ending Asia”. Tidak main-main, Hermawan Kertajaya, seorang tokoh *marketing* kenamaan, ditunjuk sebagai konseptornya. Namun, proyek itu ternyata gagal total dan jauh dari capaian minimum yang diharapkan. Alasannya klasik, yakni implementasi yang buruk di lapangan. Selanjutnya, Jakarta getol mempromosikan “Enjoy Jakarta”. Apakah berhasil? Hingga saat ini penulis belum tahu pasti karena belum ada kajian yang dipublikasikan mengenai hal itu.

1. Beberapa Pelajaran

Identitas yang *marketable* sungguh sulit diperoleh. Hal ini begitu sulit sehingga banyak daerah di berbagai penjuru tanah air yang melakukan penjenamaan secara serampangan dan akhirnya mubazir. Kediri memang memiliki produk tahu spesial, yang berbeda dari daerah-daerah lain, tetapi apakah sebutan “Kota Tahu” cukup mengundang selera turis? Apa sebutan itu membanggakan masyarakatnya? Apa yang dijanjikan Situbondo sebagai “Kota Santri” bagi para pelancong? Surabaya menyebut dirinya “Kota Pahlawan”, tetapi justru telah menghancurkan banyak bangunan bersejarah. Bukti kepahlawanan apa yang bisa dilihat dan dinikmati para turis? Di sini tampak bahwa penjenamaan yang dilakukan menegasikan kualitas, hanya nama, dan bersifat permukaan saja.

Dinas Pariwisata DKI Jakarta, misalnya, untuk mem-*branding* kota Jakarta terlebih dahulu melakukan beberapa tahap aktivitas. Pertama, melakukan *consumer audit*, yakni menyebar kuesioner pada para wisatawan, menanyakan persepsi dan kesan mereka tentang Jakarta. Kedua, melakukan *travel show audit*, atau datang ke pameran-pameran, *travel markets*, untuk mengetahui pandangan mereka tentang Jakarta. Ketiga, melakukan *communication audit*, yakni meneliti apa dan sejauh mana yang telah dilakukan pemerintah daerah selama ini

untuk mengkomunikasikan Jakarta. Keempat, melakukan audit ke CEO perusahaan-perusahaan penerbangan, biro perjalanan, asosiasi, dan lain-lain. Kelima, melakukan *competitor audit*, menyimak apa saja yang telah dilakukan oleh para kompetitor. Pada akhirnya, berdasarkan pada langkah-langkah tersebut dapat diketahui bahwa Jakarta cukup memberikan *enjoyable experience* sehingga dipilihlah *tag line* “Enjoy Jakarta”.

Di luar negeri, telah sejak lama, kota-kota menjenama dirinya. Adelaide (sebuah kota di Australia Selatan), misalnya, pada tahun 2013 menghabiskan dana lebih dari \$1 juta (sekitar Rp10 miliar) untuk sebuah logo baru. Contoh lain adalah Mississauga, kota terbesar keenam di Kanada yang berpenduduk 757.000 jiwa, berusaha membangun citra diri sebagai magnet baru bagi dunia internasional. Itu tidak mudah karena harus keluar dari bayang-bayang Kota Toronto yang berjarak sekitar 30 km. Dengan menggunakan slogan “Fokus pada Masa Depan”, strategi yang dikembangkannya adalah “*a multi-year brand-building*”.

Untuk itu, Mississauga melakukan banyak hal, termasuk merancang bisnis regional dan global, mencoba menarik perhatian dan minat masyarakat internasional dengan menawarkan lingkungan hidup dan suasana yang berkualitas tinggi serta program layanan dan penyambutan yang terencana dengan baik. Kota ini mengubah dirinya menjadi tempat yang sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Pemerintah kota membentuk tim pelaksana proyek dengan tugas yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) mempromosikan kota Mississauga sebagai tempat yang dinamis dan nyaman untuk hidup, bekerja, belajar, dan berekreasi;
- 2) menciptakan narasi yang menarik untuk merangkul masyarakat kota secara keseluruhan; dan
- 3) mengedukasi khalayak internal—para pegawai negeri, mitra kunci, serta warga untuk menjadi duta bagi nama baik kota mereka.

Perencanaan proyek penjenamaan ini dimatangkan dengan survei masukan dari 500 warga dan 100 pengusaha kecil, wawancara dengan

23 anggota Dewan Kota Mississauga dan para mitra, dan pelaksanaan empat lokakarya penjenamaan yang diikuti lebih dari 100 peserta (pegawai pemerintah kota, penduduk, pebisnis, dan LSM).

Selain mahal, proyek *city branding* bukan perkara mudah. Menurut North (2014), kegagalan kampanye *city branding* mencapai 86%. Ini tentu saja angka yang cukup mengejutkan. North melihat bahwa pelaksanaan kampanye-kampanye oleh para pejabat kota tersebut dianggap dapat merevitalisasi kota dan menjadikannya tempat yang lebih menonjol di peta. Namun, pada akhirnya, para pejabat kota tersebut menemukan bahwa harapan mereka sia-sia belaka. *City branding* hanyalah “petasan basah” yang sudah terlanjur dibeli dengan harga mahal. Jadi, mengapa setiap kota seolah-olah harus melakukan penjenamaan? Menurut North, dari perspektif internasional, merek besar merupakan aset berharga. Ia dapat membantu sebuah kota untuk menarik wisatawan, investor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan; meningkatkan ekspor; dan meningkatkan kebanggaan seluruh warga kota.

2. Mencari Trademark untuk Jember

Menurut José Torres dari Bloom Consulting (dalam North, 2014), “Selalu ada sesuatu yang khusus pada setiap kota. Oleh karena itu *city branding* bukan persoalan menciptakan sesuatu, melainkan tentang menemukan apa yang sesungguhnya sudah ada.” Nah, merujuk pada pendapat Torres tersebut, frasa manakah yang lebih tepat dijadikan sebagai merek dagang (*trademark*) dalam rangka pengembangan pariwisata Jember: Jember Kota Suwar-suwigir (nama produk jajanan khas Jember, berbahan dasar tape), Jember Kota Tembakau, Jember Kota Seribu Bukit, Jember Kota Karnaval, atau Jember Kota Pendalungan?

Sehubungan dengan suwar-suwigir dan tembakau, penulis teringat pada Pak Sutikno, mantan pimpinan Bank Indonesia Jember yang pernah menyarankan agar stempel “Kota Suwar-suwigir” bagi Jember diganti dengan “Kota Tembakau”. Alasan beliau adalah bahwa suwar-suwigir tidak mencitrakan hal utama, baik sebagai produk akhir,

bahan, maupun nilai ekonominya. Sebaliknya, tembakau adalah sebuah komoditas yang secara nyata disangga masyarakat luas di daerah Jember dan mampu menautkan daerah ini dengan dunia internasional. Negara memperoleh devisa cukup besar dari ekspor tembakau. Akan tetapi, buru-buru Prof. Ayu Sutarto, seorang peneliti budaya dan guru besar Universitas Jember, memberi *peringatan* pada kita tentang konsekuensi tembakau sebagai merek dagang. Kita semua tahu bahwa dunia kesehatan internasional sangat memusuhi tembakau. Kampanye soal ini terus bergulir tanpa ada pihak yang bisa membendung. Ada “hari tanpa tembakau” dan ruang bagi para perokok makin dipersempit di mana-mana di seluruh dunia.

Memang kedua pandangan tersebut tidak salah. Untuk keperluan penjenamaan, kita harus menemukan slogan, yakni perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu, seperti *Jogja never ending Asia*, *Enjoy Jakarta*, atau *Malaysia truly Asia*. Nah, dengan rekayasa apa pun, suwar-suwar dan tembakau cukup sulit untuk dimasukkan ke dalam sebuah slogan yang sanggup menyenangkan banyak pihak.

Bagaimana dengan “seribu bukit”? Sebaiknya kita lupakan frasa yang satu ini karena begitu parahnya tindakan perusakan lingkungan yang terjadi di Jember. Memang Jember memiliki lebih dari 1.500 buah bukit (masyarakat Jember menyebutnya *gumuk*). Akan tetapi, bukit-bukit tersebut terancam punah karena penambangan batu dan pasir yang terkandung di dalamnya. Tanpa campur tangan dan ketegasan Pemkab Jember, dua atau tiga dasawarsa mendatang mungkin tidak ada bukit lagi di seantero kabupaten ini.

Selanjutnya, bagaimana dengan slogan “Jember Kota Karnaval”? Ya, memang di Jember ada JFC sejak tahun 2003 dan selalu mendapatkan respons luar biasa dari masyarakat Jember dan sejumlah kalangan di tanah air, bahkan luar negeri. Harus diakui bahwa keberadaan JFC sungguh strategis dan sudah terbukti berpotensi besar mengibarkan panji eksistensi pariwisata Jember ke dunia internasional. Oleh sebab itu, JFC harus diapresiasi dan didukung. Namun, menjenama

Jember sebagai “Kota Karnaval” masih belum memiliki dasar-dasar argumentasi yang memadai. Untuk menjadikan Jember sebagai “Kota Karnaval” yang sesungguhnya, harus ditancapkan sebanyak-banyaknya tiang penyangga, bukan hanya tiang tunggal.

Kedudukan slogan ini cukup penting karena dari situlah kita mulai membangun *mind identity* (segala sesuatu yang dipikirkan) masyarakat. Misalnya, kita telah sepakat untuk menganggap bahwa Jember adalah produk *melting pot* Jawa-Madura-Using, lalu kita bersepakat menganggap masyarakat Jember sebagai masyarakat “Pendalungan” alias “Jawa/Madura Baru”. Dengan demikian, yang kemudian harus ditanamkan pada benak masyarakat adalah *kita bukan Jawa, bukan Madura, bukan Using. Kita adalah Pendalungan!* *Mind identity* ini, jika “tersemaikan” dengan baik, secara bertahap akan tumbuh dan berkembang menjadi *behaviour identity* (segala sesuatu yang dilakukan), yang kemudian membawaakan *visual identity* (segala sesuatu yang tampak).

Slogan tempo dulu “Jember Terbina” bukanlah slogan yang ideal untuk menjenama Jember. Keadaan suatu daerah yang *tertib, bersih, indah, dan aman* adalah idaman setiap daerah dan kondisi ini akan dikejar oleh daerah mana pun. Oleh karena itu, tidak ada yang spesifik di dalamnya. Contoh daerah yang lumayan bagus dalam menjenama dirinya adalah Ponorogo, yang menganggap dirinya sebagai “Kota Reog”. Penulis menilainya sebagai sebuah penggalian identitas yang tepat. Di Ponorogo, reog ada di dalam pikiran setiap warganya (*mind identity*). Sikap mereka terhadap reog positif (*behaviour identity*) sehingga reog terus ada dan bisa disaksikan (*visual identity*). Contoh lain adalah Banyuwangi. Daerah ini sangat beruntung memiliki kesenian gandrung yang hingga kini terus hidup subur di tengah-tengah masyarakatnya sehingga bisa menganggap dirinya sebagai “Kota Gandrung”. Bali, dengan tradisi dan ritualnya, adalah pernik-pernik budaya dan kesenian yang eksotis nan memberi warna sehingga sangat pantas jika Bali menyebut dirinya “Pulau Dewata”.

Akan hal apabila ada wisatawan yang datang berkunjung ke Jember, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, mereka tidak

akan merasa tertipu oleh promosi yang telah mendorong kehadiran mereka. Pertama, mereka ingin melihat *visual identity* yang berada di lingkaran paling luar, kemudian *behaviour identity* pada lingkaran yang lebih dalam, dan pada akhirnya *mind identity* pada lingkaran terdalam. Apa yang ada di dalam materi promosi ada dalam kenyataan.

3. Wacana Baru: Jember Kota Pendalungan

Bupati Jember, dr. Faida, MMR., telah mencanangkan Jember sebagai Kota Pendalungan. Hal ini, pertama-tama, harus dibaca sebagai niat baik Pemkab Jember dalam membangun masyarakat. Melegitimasi masyarakat Jember sebagai masyarakat Pendalungan merupakan suatu praktik ideologis-politis yang, menurut dugaan penulis, dilakukan dalam rangka membentengi masyarakat Jember dari berbagai pengaruh budaya asing yang tidak terkendali. Selain itu, pengentalan identitas kultural Pendalungan yang dilakukan bupati tersebut dapat dibaca sebagai bahasa perlawanan atau sikap kehati-hatian terhadap arus globalisasi yang tidak terkendali. Identitas Pendalungan diharapkan mampu menjadi perekat bagi masyarakat Jember untuk memperkuat jati diri dalam menghadapi perkembangan zaman.

Benteng kultural yang sengaja dibangun berdasarkan ekosistem dan kearifan lokal semacam ini tampaknya akan lebih mudah diterima masyarakat karena konteks dan rasionalitasnya cukup tinggi. Slogan “Jember Kota Pendalungan” adalah sebuah ajakan untuk bertransformasi dari kondisi egoisme etnosentrism menuju masyarakat yang harmonis; dari masyarakat yang tidak memiliki kejelasan perspektif menuju masyarakat yang membumi. Bu Farida memulainya dengan sebuah slogan.

Slogan baru ini bisa kita diskusikan dari berbagai aspek, misalnya perihal isinya (kultural, politis, historis, kecerdasan konsep makna), bentuknya (pilihan kata, keindahan bunyi), dan implementasinya (kontekstual atau tidak; rasional atau tidak). Namun, di atas semua itu, slogan yang baik biasanya dapat berumur panjang asalkan rasional dan ditunjang oleh konsep komunikasi (serta komunikator)

yang tepat. Slogan yang baik akan menjadi abadi apabila berada di ranah yang kontekstual, lalu diimplementasikan secara luwes dan berkesinambungan. Abadi adalah berguna sekaligus bermakna. Artinya, slogan yang baik sangat mungkin untuk digunakan sebagai *starting point* menuju titik tertentu yang dituju, yakni sebuah makna yang diimpikan dapat diperoleh. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan pemkab di bidang sosiokultural harus didasarkan pada etika sosial, nilai-nilai tradisi, dan norma-norma agama yang dianut masyarakat Jember. Kebijakan-kebijakan ini juga harus menghindari kepentingan atau pragmatisme politik yang bersifat jangka pendek.

Sejak dahulu orang Jawa sudah mengenal istilah *desa mawa cara, negara mawa tata*. Ini berarti konsep penanganan suatu wilayah yang dituangkan dalam sebuah slogan sudah lama ada. Meskipun demikian, belum ada satu pun sumber sejarah yang dapat menggambarkan secara tepat pada kita, seperti apa dan bagaimana prestasi yang telah dicapai orang Jawa waktu itu. Oleh karena itu, yang dapat kita ketahui adalah bahwa sejauh ini Indonesia belum pernah benar-benar berhasil dalam *membangun desa dan kota*—setidaknya secara substansial. Walaupun demikian, secara struktural keberhasilan itu relatif mudah ditemukan dan memang dalam hal ini Orba adalah jagonya.

Pertanyaannya apakah kegagalan tersebut terletak pada tataran konsep ataukah tahap implementasi? Kalau konsepnya yang salah, bisa dipastikan implementasinya juga akan mengalami kegagalan. Seperti halnya seorang dokter yang mendiagnosis pasien. Jika diagnosisnya salah, obat yang diberikan pada si pasien tentu juga akan salah. Namun, kalau berdasarkan diagnosis dan obat yang salah tersebut ternyata pasiennya dapat sembuh, itulah yang namanya *ndilalah* atau serba kebetulan. Tentunya kita tidak ingin membangun tanah air dengan jurus semacam itu. Oleh karena itu, belajar dari berbagai keberhasilan dan kegagalan proyek sejenis sebelumnya, pertama-tama kita harus jelas akan konsep atau *special design* di belakang pencanangan Jember sebagai Kota Pendalungan.

Persoalan konsep ini harus menjadi pemikiran serius. Pemkab perlu membuka diri terhadap gagasan inovatif kreatif yang datang

dari pihak mana pun. Berbagai komponen masyarakat perlu didengar suaranya. Bahkan, jika perlu, ke depan konsep “Kota Pendalungan” dikembangkan lagi hingga menjadi “Bumi Pendalungan”. Artinya, identitas kultural Pendalungan tidak hanya disandang oleh masyarakat di wilayah perkotaan, tetapi meliputi seluruh warga Kabupaten Jember. Apakah slogan “Jember Kota Pendalungan” bisa menjadi slogan abadi dalam benak setiap warga Jember ataukah lenyap berbarengan dengan spanduknya yang diturunkan hanya waktu yang akan membuktikannya.

4. Pendalungan dan Jagat Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu fenomena dunia modern yang mencengangkan. Dari tahun ke tahun jumlah total wisatawan internasional menunjukkan pertumbuhan yang begitu fantastis. Jumlah wisatawan melonjak dari 25 juta orang pada tahun 1950 menjadi 278 juta orang pada tahun 1980, kemudian naik ke 528 juta orang pada tahun 1995, dan menjadi 1,1 miliar orang pada tahun 2014. Sektor pariwisata menyediakan 1 dari 11 lapangan kerja yang dapat diserap masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada saat ini makin banyak negara di seluruh dunia memilih menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan (*sektor unggulan*).

Sejalan dengan realitas pariwisata dunia, pariwisata Indonesia mengalami tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi mutakhir pariwisata berada pada peringkat ketiga penyumbang terbesar bagi kinerja perekonomian nasional. Tahun 2014 industri pariwisata menyumbang 9% terhadap capaian PDB Indonesia dengan kontribusi sebesar Rp140 triliun. Sektor ini juga berhasil menyediakan lapangan pekerjaan bagi 11 juta jiwa. Kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2014 mencapai 9 juta orang. Dengan demikian, industri pariwisata pada tahun 2019 ditargetkan mampu memberikan sumbangan sebesar 15% terhadap PDB atau sebesar Rp280 triliun. Selain itu, industri pariwisata tahun 2019 diharapkan menyerap 13 juta tenaga kerja melalui 20 juta kunjungan wisman. Portofolio pariwisata Indonesia memiliki komposisi, yaitu (1) wisata budaya (60%), (2) wisata alam (35%), dan (3) wisata buatan (5%; Ratman, 2016).

Berdasarkan data di paragraf sebelumnya, kiranya ini tidak berlebihan jika sektor pariwisata pada saat ini menjadi prioritas pemerintah dan sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk menambah anggaran pemasaran pariwisata sebesar empat hingga lima kali lipat dari sebelumnya. Pada tahun 2015 anggaran pariwisata di APBN sebesar Rp2,4 triliun, kemudian pada tahun 2016 melonjak drastis menjadi Rp5,4 triliun. Anggaran untuk pemasaran yang semula sebesar Rp300 miliar di tahun 2015 melonjak jadi Rp1 triliun pada tahun 2016. Pada tahun 2017 anggaran untuk pemasaran tersebut akan dinaikkan lagi menjadi Rp2 triliun. Dana sebesar itu tentunya cukup untuk membiayai pembuatan dan pendistribusian iklan pariwisata Indonesia di seluruh dunia.

Sejauh ini Indonesia hanya berani menargetkan kunjungan 20 juta wisman pada tahun 2019, padahal pada tahun 2014 saja Malaysia sudah mampu mendatangkan 27,4 juta wisman, diikuti Thailand dengan 24,8 juta wisman. Menurut World Economic Forum (2015), posisi dunia pariwisata Indonesia pada *Travel & Tourism Competitiveness Index 2015* adalah peringkat ke-50 dunia. Posisi ini meningkat cukup tajam jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-70. Destinasi unggulan pariwisata Indonesia saat ini ditempati oleh Bali yang menyumbang 40% wisman, Jakarta 30%, dan Kepulauan Riau 20%.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir di Indonesia, ada mulai banyak daerah yang mencapai sukses dalam upaya menjadikan pariwisata sebagai *brand image*. Tingkat keberhasilan beberapa daerah dalam mengembangkan pariwisata biasanya terkait langsung dengan besarnya keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan, baik dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Artinya, dalam jangka menengah dan panjang pariwisata memang sengaja diprioritaskan dan dijagokan, tidak sekadar ditangani sambil lalu.

Selanjutnya, pengembangan dunia pariwisata akan menjadi pilihan yang tak terelakkan bagi semua bangsa di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia juga telah mulai bersungguh-sungguh mengembangkan pariwisata, baik wisata alam maupun budaya, meskipun upaya ini terhitung terlambat jika dibanding dengan beberapa negara tetangga, misalnya Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pariwisata Indonesia hanya menempati peringkat ke-74 dari 139 negara. Indonesia masih kalah jauh dengan Singapura yang mencapai peringkat ke-10 dan Malaysia di peringkat ke-35. Meskipun secara internal kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai rekor tertinggi pada tahun 2013, yakni 8,8 juta jiwa, tetapi perolehan itu masih kalah jauh jika dibanding dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Malaysia, misalnya, mampu mendatangkan 24,7 juta wisatawan. Dalam hal pendapatan dari pariwisata pun, Indonesia kalah jauh. Pendapatan tertinggi Indonesia, yang diterima pada 2013, mencapai US\$10 miliar, sementara Thailand sudah mampu memperoleh tiga kali lipatnya pada tahun 2011, yakni US\$30,9 miliar.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah telah mendorong destinasi-destinasi wisata unggulan baru yang patut dipromosikan secara internasional, salah satunya adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BTS) di Jawa Timur. Pemerintah telah membentuk Badan Otoritas Bromo Tengger Semeru menyusul masuknya obyek wisata bertaraf internasional ini dalam sepuluh destinasi wisata secara nasional. Badan otoritas ini mulai aktif pada bulan Mei 2016. Pembentukan Badan Otoritas BTS ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi kunjungan wisata di daerah ini. Ada tiga rencana prioritas yang menjadi sasaran Badan Otoritas BTS ini, yaitu soal aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Persoalan aksesibilitas ini menyangkut infrastruktur seperti sarana dan prasarana. Kawasan Taman Nasional BTS ini meliputi empat wilayah kabupaten, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Artinya, akses dari empat daerah ini menuju kawasan Bromo harus benar-benar disiapkan. Faktor amenitas menjadi salah satu faktor penting lain. Faktor ini meliputi sarana pendukung, misalnya bagaimana keberadaan bandar

udara serta pelabuhan. Sementara itu, atraksi wisata ialah berupa keindahan alam ataupun keunikan budayanya. Kunjungan wisata ke daerah ini ditargetkan mencapai 1 juta orang pada 2019.

Untuk mengoptimalkan Bromo sebagai kawasan wisata utama, perlu pengembangan destinasi penunjang di masing-masing daerah pendukung. Kawasan Pendalungan memiliki peluang besar untuk hal itu.

5. Pendalungan sebagai Zona Pariwisata

Menjadikan kawasan Pendalungan sebagai zona pariwisata, mungkinkah? Bagi seorang kepala daerah yang visioner seperti Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, hal itu tidaklah *jauh panggang dari api*. Dalam waktu relatif singkat, dia telah berhasil menjadikan Banyuwangi sebagai zona pariwisata nasional yang diperhitungkan. Sayang sekali tidak banyak kepala daerah yang visioner sepertinya. Meskipun banyak daerah telah menyadari manfaat besar yang dapat diperoleh dari sektor pariwisata, sangat sedikit kepala daerah yang bersungguh-sungguh dalam menangani dan mengembangkan pariwisata.

Pemkab Banyuwangi tampaknya sangat menyadari daya jual lingkungan alam serta kebudayaan masyarakatnya sehingga sektor pariwisata mendapatkan perhatian yang cukup besar. Memang telah terbukti bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara cepat, mampu menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan dan standar hidup masyarakat, serta merangsang pertumbuhan sektor-sektor produktif lainnya. Dengan kata lain, pada masa kini pariwisata merupakan sektor potensial bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan mempunyai efek berantai yang cukup panjang. Banyak bidang usaha di sektor pariwisata terkait langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Pendit (1990), sektor pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi,

dan memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, dan pengangkutan. Pariwisata juga mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sasana budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya. Semua hal itu dapat memberikan keuntungan dan kesenangan, baik kepada masyarakat setempat maupun kepada wisatawan.

Di Banyuwangi terlihat bahwa pengembangan pariwisata budaya memiliki konsekuensi, yakni masyarakat yang menjadi objek pariwisata harus menilai keberadaan diri sendiri dan membandingkannya dengan orang lain. Pemerintah kabupaten, melalui dinas priwisata, tampaknya cukup berhasil dalam membina masyarakat. Mereka juga harus pandai-pandai merespons program pembangunan nasional dan pembentukan serta pemertahanan identitas kultural. Keduanya tidak boleh bertabrakan, tetapi harus saling melengkapi dan menguatkan.

Sektor pariwisata merupakan industri *supply and demand*, lahir dari interaksi terus-menerus antara permintaan, penawaran, dan kebijakan strategis. Oleh karena itu, pemkab perlu memperhatikan berbagai sarana dan prasarana yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi pariwisata. Misalnya, perencanaan pariwisata terkait keagamaan di Lumajang. Meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan hanya sedikit saja yang beragama Hindu, Lumajang memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata agama Hindu. Di Lumajang terdapat Pura Mandara Giri Semeru Agung, tempat beribadah bagi umat Hindu. Masyarakat yang beragama Hindu, baik dari Bali maupun dari daerah-daerah lain, akan makin banyak yang berkunjung ke Lumajang. Di Jember sejumlah pelaku pariwisata telah menciptakan mata rantai pariwisata yang dinamis dan sadar terhadap potensi yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian. Mereka membentuk organisasi Destinasi Wisata Jember (DWJ), kemudian mendayagunakan aset-aset pariwisata yang ada dengan menitikberatkan pada hubungan yang saling mencukupi di antara mereka. Dengan demikian, terciptalah lingkungan yang diharapkan mampu memancing penanaman

investasi bagi pengembangan pariwisata ataupun pengembangan produk-produk pendukung.

6. Pariwisata dan Identitas Budaya

Secara global, pariwisata telah berpola sebagai sebuah industri yang digerakkan oleh pasar. Artinya, pasarlah yang menentukan apakah sebuah destinasi wisata yang dijual layak dibeli atau tidak. Oleh karena itu, penjualan produk pariwisata tidak bisa dilakukan dengan cara biasa sebagaimana layaknya produk pertanian atau produk-produk dagangan konvensional lainnya. Menurut Spillane (1994), pariwisata adalah komoditas dalam ruang lingkup pasar dan politik ekonomi global. Oleh sebab itu, pariwisata di Indonesia perlu ditangani dengan lebih bersungguh-sungguh. Bagaimana merumuskan pembangunan sektor pariwisata di Indonesia sehingga strategi pembangunan pariwisata nasional dapat terealisasi? Tiga unsur pokok yang secara terpadu diperlukan bagi kesuksesan rekayasa industri pariwisata: wisatawan, tuan rumah atau penyedia sarana wisata, dan promotor atau perantara bisnis pariwisata.

Apakah pembangunan pariwisata secara masif mampu memengaruhi identitas etnis dan representasinya? Kajian antropologis McKean (1977) dan Crystal (1977) tentang pengembangan dunia pariwisata pada masa awal di Indonesia menunjukkan hal menarik, khususnya mengenai efek pariwisata pada budaya dan identitas lokal. McKean menangkap adanya rasa pesimistik pada masa-masa awal pengembangan dunia pariwisata Indonesia. Pengembangan pariwisata dianggap dapat secara masif akan menghancurkan budaya tradisional. McKean tidak sepakat dengan pernyataan bahwa pertunjukkan budaya dan cendera mata yang diproduksi untuk pasar pariwisata telah kehilangan esensinya. Dia bahkan menyatakan bahwa realitas pariwisata di Bali jauh dari kesan merendahkan budaya Bali dan justru mengarahkannya pada revitalisasi. Dia memperlihatkan bahwa ternyata orang Bali dapat memisahkan antara produk budaya yang asli dan pariwisata. McKean juga memperlihatkan bahwa pariwisata telah menyumbangkan pendapatan tinggi bagi masyarakat Bali. Pendapatan

tersebut, antara lain, mereka menggunakan untuk membiayai pelatihan musik, tari, dan pembuatan kerajinan tangan. Minat wisatawan terhadap kebudayaan Bali telah menumbuhkan rasa kebanggaan pada para seniman serta mendorong masyarakat untuk memperkuat identitas budayanya.

Sementara itu, Crystal (1977) menguraikan bahwa pembangunan pariwisata Tana Toraja di Sulawesi Tengah telah menyumbang berbagai efek positif bagi masyarakat untuk memelihara dan merevitalisasi ritual dan tradisi mereka. Masyarakat Toraja didorong untuk menunjukkan identitas dan sifat-sifat *kotorajaan* mereka. Crystal mengungkapkan bagaimana pada awal tahun 1970-an pemerintah Indonesia mulai menjajaki kemungkinan menarik minat para wisatawan ke Toraja dan menjadikannya sebagai Bali yang lain. Upacara *Aluk To Dolo* atau upacara penguburan dianggap sebagai atraksi utama yang potensial. Berbagai fasilitas pendukung pariwisata, misalnya transportasi, hotel, dan *homestay*, dibangun. Dalam waktu singkat kunjungan wisata ke Toraja meningkat pesat secara mengesankan. Selama tahun 1980-an, pariwisata Toraja telah menjadi agenda internasional.

Picard (1996) memperlihatkan bagaimana masyarakat Bali secara dinamis mengubah identitas budaya mereka dalam konteks pembangunan dunia pariwisata. Memang ada pihak-pihak tertentu yang menilai bahwa pariwisata merendahkan dan merusak budaya. Akan tetapi, Picard berpendapat bahwa orang Bali dapat membangun batasan antara budaya yang sakral dan budaya yang diperuntukkan bagi pariwisata. Menurut Picard, yang esensial bukanlah pertanyaan “apakah kebudayaan Bali dapat bertahan terhadap masuknya pariwisata?”, melainkan bagaimana budaya Bali telah dibentuk dan diubah dari dalam oleh pariwisata. Bagi Picard, “budaya turistik” bukanlah kekuatan luar yang hadir untuk mengubah budaya Bali, melainkan sebuah proses perubahan masyarakat Bali dari dalam yang secara aktif melibatkan masyarakat Bali dalam mengubah budaya mereka sendiri seiring dengan tumbuhnya kesadaran etnis dalam merespons peluang dunia pariwisata.

7. Paradigma Baru: Pariwisata Berbasis Komunitas

Strategi pengembangan pariwisata adalah segala daya upaya yang dikerahkan oleh berbagai pihak terkait untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi suatu objek wisata sehingga menjadi lebih baik. Dengan cara demikian, destinasi wisata tersebut akan dikunjungi lebih banyak wisatawan serta mampu memberikan manfaat maksimal, khususnya bagi masyarakat di sekitarnya, serta memberi pemasukan bagi pemerintah. Ada empat pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang dikemukakan Getz (1987).

- 1) *Booster Approach* adalah suatu pendekatan yang melihat pariwisata sebagai suatu atribut positif untuk suatu tempat. Masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan daya dukung wilayah tidak cukup dipertimbangkan.
- 2) *The Economic-indusry Approach* adalah suatu pendekatan yang mendahulukan tujuan ekonomi dibanding dengan tujuan-tujuan sosial ataupun lingkungan, yakni menjadikan pengalaman dan tingkat kepuasan pengunjung sebagai sasaran utama.
- 3) *The Physical-spatial Approach* adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada tradisi *penggunaan lahan* secara geografis. Strategi pengembangan sektor pariwisata ini berdasarkan perencanaan yang berbeda-beda melalui prinsip-prinsip tata ruang. Misalnya, pengelompokan atau pemisahan pengunjung di suatu kawasan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Pendekatan ini kurang mempertimbangkan dampak sosial dan kultural pengembangan wisata.
- 4) *The Community Approach* adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan pada pentingnya keterlibatan masyarakat setempat di dalam proses pengembangan. Pendekatan ini menganggap penting suatu pedoman pengembangan yang dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*).

Saat ini kecenderungan dunia global dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan menerapkan suatu strategi yang membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat luas untuk

berpartisipasi. Hal ini juga terjadi dalam dunia pariwisata. *Community based tourism* (CBT), kepariwisataan berbasis masyarakat, telah dibakukan sebagai strategi pembangunan di bidang pariwisata. Secara konseptual, prinsip dasar CBT adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama—melalui pemberdayaan—dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penyelenggaraan industri pariwisata. Konsep CBT ini diterapkan sebagai strategi untuk memobilisasi masyarakat setempat agar berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan pariwisata dengan tujuan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat tersebut.

Murphy (1985) adalah orang yang pertama kali mempopulerkan konsep CBT. Menurutnya, produk pariwisata secara lokal harus diartikulasikan dan dikonsumsi. Produk wisata serta konsumennya harus *visible* bagi penduduk lokal. Pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan sebab masyarakat lokallah yang harus menanggung dampak kumulatif perkembangan wisata.

Pariwisata berbasis komunitas adalah pariwisata yang bersifat kerakyatan. Konsep strategisnya menekankan pada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kesenian, adat istiadat, masakan, dan bangunan. Setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata. Pendekatan ini cukup berbeda dengan pendekatan pembangunan pariwisata pada umumnya. Di sini daya dukung utama pengembangan pariwisata diperoleh dari masyarakat setempat dengan tujuan utama meningkatkan standar kehidupan mereka. Oleh karena itu, fokus pembangunan pariwisata tidak hanya pembangunan sarana dan prasarana fisik belaka. Kata kuncinya adalah pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pembangunan objek dan daya tarik wisata. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menuntut koordinasi dan kerja sama serta peran yang berimbang di antara berbagai unsur pemangku kepentingan, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam pendekatan CBT, yang tidak bisa ditawarkan adalah perlakuan masyarakat lokal sejak dalam

proses perencanaan program-program pariwisata hingga pelaksanaan dan pengawasan.

Jika dilihat dari jangkauan dan dampaknya, konsep CBT cocok untuk diterapkan dalam penyelenggaraan wisata alam, kuliner, budaya, dan lingkungan sehingga membantu proses pelestarian sumber daya lokal baik, sumber daya alam maupun budaya. Dewasa ini ada kecenderungan pihak wisatawan asing untuk berwisata dalam dimensi tradisional seperti mengunjungi desa-desa yang memiliki keunikan. Kecenderungan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah di Tapal Kuda yang masih memiliki banyak desa tradisional.

Salah satu contoh penerapan CBT yang berhasil adalah pengelolaan wisata alam Teluk Cinta di Jember. Suto Wijoyo, dibantu oleh keluarga, kerabat, dan sejumlah warga Desa Payangan, memprakarsai pengembangan Teluk Cinta secara mandiri dan memperoleh keberhasilan yang signifikan hanya dalam beberapa tahun saja. Bandingkan dengan wisata Watu Ulo, yang terletak di sebelah Teluk Cinta, yang telah berpuluhan-puluhan tahun dikelola oleh Pemkab Jember. Bukan kemajuan yang diperoleh, melainkan keterpurukan yang makin berlarut.

Di Lumajang ada Tempoeran Tubing Adventure. Olahraga air ini dikelola oleh Komunitas Tempoeran sejak tahun 2014. Pada usianya yang ke-3, popularitas objek wisata ini berkembang cukup baik di kalangan anak-anak muda di Jawa Timur. Wisata petualangan ini menyusuri aliran sungai yang melintasi empat desa dengan jarak tempuh kurang lebih 4 kilometer dalam rentang waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam. Masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas pariwisata yang dikelola secara mandiri ini. Sementara itu, Pemkab Lumajang juga mendapatkan pemasukan melalui retribusi.

8. Pariwisata Kota

Pada beberapa dasawarsa terakhir, ada kecenderungan di seluruh dunia bahwa wisatawan tidak hanya ingin bersantai sambil menikmati

sea, sand, and sun. Pola konsumsi wisatawan secara pasti mulai mengarah pada jenis wisata dengan selera yang meningkat, yaitu menikmati produk atau kreasi budaya (*culture*) dan peninggalan sejarah (*heritage*). Kota yang dikembangkan dengan basis kebudayaan terbukti menjadi destinasi wisata utama di mana-mana di seluruh dunia.

Tren wisata kota tersebut mengisyaratkan bahwa fungsi kota telah mengalami pergeseran dari industri barang menjadi industri jasa, hiburan, dan informasi. Pabrik-pabrik digeser lokasinya ke pinggiran kota dan selanjutnya kota menjadi pusat konsumsi. Kota menjadi destinasi wisata baru. Yogyakarta dan Bandung adalah contoh terbaik untuk kasus ini.

Pendekatan pembangunan perkotaan berbasis pariwisata tidak begitu populer di wilayah Tapal Kuda. Beberapa pihak masih menganggap sektor pariwisata identik—atau paling tidak berimpitan—with kemaksiatan dan hal-hal negatif lainnya, seperti perjudian dan pelacuran. Sesungguhnya ini tidak perlu terjadi jika pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan kepada berbagai pihak yang menolak. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan bahwa pembangunan perkotaan berbasis pariwisata adalah bagaimana mentransformasikan berbagai kegiatan masyarakat perkotaan, baik yang rutin maupun temporer, dalam bentuk kepariwisataan secara terencana dan terjadwal sepanjang tahun. Selain itu, seluruh titik awal pengembangan pariwisata daerah sebaiknya dimulai dari kota, kemudian membentuk jejaring menuju titik-titik destinasi lainnya.

Jember, sebagai sebuah kota kecil dan relatif tertinggal, membutuhkan berbagai sentuhan khusus untuk dapat dikatakan sebagai kota yang telah siap menjalankan program pariwisata kota. Ketika acara JFC digelar, misalnya, salah satu kendala yang muncul adalah tidak tertampungnya wisatawan di hotel-hotel di Jember sehingga meluber hingga Bondowoso dan Banyuwangi. Untuk mengatasi persoalan ini, mestinya pemkab bisa menggalakkan aset akomodasi yang telah dimiliki oleh masyarakat, misalnya *homestay*. Dinas pariwisata sebaiknya memopulerkan sekaligus mengontrol

keberadaan *homestay* melalui prosedur pengenalan dan sertifikasi sehingga masyarakat merasa nyaman ketika mempromosikan kesiapan Kota Jember kepada calon wisatawan. Selain itu, seluruh produk wisata harus menggambarkan identitas lokal. Mengenai hal ini, tampaknya telah ada upaya berbagai daerah di Tapal Kuda untuk mencari keunggulan kompetitif di daerahnya masing-masing.

9. Pemberian Sumber Daya Manusia dan Birokrasi

Pariwisata internasional menuntut standardisasi kualitas produk dan pelayanan wisata. Artinya, apa yang harus dicapai oleh setiap lembaga penyelenggara pariwisata adalah kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar industri pariwisata internasional. Untuk menjawab tuntutan tersebut, setiap daerah yang menjadi destinasi wisata tidak bisa mengelak dari kewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Titik ini adalah salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global yang makin kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan sertifikasi dan standar kompetensi tenaga kepariwisataan.

Ketika Indonesia memasuki era otonomi daerah, secara otomatis jajaran birokrasi di daerah memiliki peran yang lebih strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pariwisata. Namun, sejauh ini harus diakui bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia pada lingkup birokrasi pariwisata menjadi variabel utama penghambat pembangunan pariwisata daerah. Salah satu titik lemah pembangunan pariwisata daerah terletak pada sektor perencanaan. Hal ini disebabkan oleh tidak memadainya ketersediaan aparatur birokrasi. Masih agak lumayan jika seorang kepala daerah mengangkat seseorang yang dianggapnya memiliki kapasitas untuk menjadi kepala dinas pariwisata, mungkin seseorang tersebut akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan bekal kemampuan manajerialnya. Namun, yang sering terjadi adalah kepala daerah memilih kepala dinas karena pertimbangan-pertimbangan lain di luar bidang keahlian. Misalnya, karena seseorang telah berjasa sebagai *pejuang* yang membelaanya di waktu pilkada. Di sini kompetensi tidak menjadi pertimbangan

utama. Akibatnya, daerah akan selalu menghadapi kesulitan untuk menghasilkan produk-produk pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar internasional. Menjual produk pariwisata jelas berbeda dengan menjual produk-produk industri lainnya. Menjalankan kerja sama lintas sektoral untuk mengurus bidang pariwisata jelas perlu strategi yang tidak sama dengan mengurus bidang kehumasan atau pertanian.

Aparatur birokrasi di ranah pariwisata tidak saja dituntut untuk menguasai substansi industri kepariwisataan, tetapi juga mampu mewadahi berbagai kepentingan para *stakeholders*. Pada titik ini yang harus dijunjung tinggi adalah prinsip-prinsip *good governance*, yakni penerapan mekanisme perencanaan dan pengelolaan segala sumber daya ekonomi dan sosial dengan melibatkan unsur birokrasi, masyarakat, serta pihak swasta secara kolektif. Selanjutnya, pihak birokrasi menjadi teladan utama dalam mengontrol dan mematuhi segala kebijakan dan kewenangan yang telah dirumuskan bersama.

10. Masa Depan Pariwisata Pendalungan

Situasi dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat di kawasan Pendalungan saat ini memperlihatkan makin berkurangnya lahan pertanian dan lapangan pekerjaan. Lingkungan pun makin rusak akibat kegiatan manufaktur dan aneka kegiatan ekonomi lainnya yang mengeksplorasi sumber daya alam secara serampangan. Oleh karena itu, sektor pariwisata perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber ekonomi andalan. Selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bidang pariwisata juga tidak merusak lingkungan, bahkan sebaliknya dapat merangsang pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dimengerti karena pengembangan suatu destinasi wisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup sebagai salah satu elemen penunjang destinasi wisata tersebut. Para wisatawan tentunya tidak akan terkesan ketika mendatangi sebuah objek wisata yang bagus, tetapi kondisi lingkungan sekitarnya buruk.

Patut disayangkan sejauh ini perhatian pemerintah masih berkisar pada angka-angka, misalnya seberapa besar jumlah wisman yang berkunjung, berapa devisa yang diperoleh, serta berapa banyak

lapangan kerja yang diciptakan. Memang semua itu penting, tetapi yang tak kalah penting dan masih belum memperoleh porsi perhatian yang memadai adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai dan kualitas. Laju angka-angka tersebut tidak akan dapat dicapai, tanpa disertai nilai-nilai dan kualitas.

Pada masa yang akan datang, kebutuhan berwisata akan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dunia serta peningkatan taraf hidup. Penduduk dunia yang membutuhkan *refreshing* akan makin banyak akibat makin tingginya kesibukan dan beban kerja. Selain itu, pengembangan pariwisata mutlak perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan di sektor pariwisata. Oleh sebab itu, mengapa pengelolaan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Dalam kerangka ini sektor pariwisata perlu mengembangkan paket-paket wisata baru, seperti agrowisata atau ekowisata. Jenis wisata semacam ini, selain tidak membutuhkan modal raksasa, juga dapat berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat sekitar. Jika diikutsertakan secara langsung, mereka pun dapat merasakan keuntungan secara langsung.

Pengembangan pariwisata harus berada dalam suatu proses perencanaan yang sistematis, terintegrasi, terarah, dan terukur. Tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan oleh para pengelola sejumlah destinasi wisata berskala kecil, tetapi sudah seharusnya dilakukan oleh manajemen destinasi wisata besar, contohnya kawasan wisata Gunung Bromo. Berbagai “cacat bawaan” pariwisata daerah, yang selama ini menjadi kendala utama pengembangan pariwisata, harus segera diatasi.

Kendala-kendala *klasik* yang masih dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Tapal Kuda, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, masalah keamanan bagi para wisatawan akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelindungan konsumen. Persoalan ini berkaitan dengan mentalitas masyarakat yang belum menyadari bahwa wisatawan adalah aset yang harus dijaga. *Kedua*, rendahnya kualitas pelayanan para penyelenggara pariwisata serta adanya

persaingan yang tidak sehat di antara para pelaku pariwisata. *Ketiga*, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata. Di berbagai tempat banyak rencana pengembangan pariwisata yang gagal dalam pelaksanaannya karena kurang mendapat dukungan masyarakat setempat. *Keempat*, kurangnya modal dan rendahnya sumber daya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal pengelolaan pariwisata. Sumber daya manusia merupakan komponen penentu, terutama pada jajaran garda depan, yakni mereka yang bertugas memberi pelayanan langsung kepada para wisatawan. *Kelima*, infrastruktur yang belum memadai, misalnya fasilitas transportasi dan akomodasi. *Keenam*, perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang bersifat *top-down*, sentralistik, dan kurang memberdayakan potensi masyarakat setempat.

Bab 7

Pendalungan di Ruang Proses: Sebuah Penutup

Kebudayaan Pendalungan Raya di wilayah Tapal Kuda dibangun berdasarkan pluralisme kebudayaan yang dilandasi sikap kesetaraan. Berbagai etnis yang ada di wilayah ini hidup secara harmonis dan mampu mengembangkan sikap toleran. Setiap etnik telah terbukti tidak berusaha gigih mempertahankan identitas partikularisme tradisionalnya, bahkan mereka saling membuka diri terhadap elemen-elemen budaya yang dimiliki oleh anggota masyarakat lainnya.

Dalam banyak hal, perwujudan antara kebudayaan Pendalungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain di sekitarnya terdapat banyak kesamaan. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Tapal Kuda untuk tetap bangga dengan identitas Pendalungan. Perspektif pemajuan kebudayaan yang patut diperkuat dan ditonjolkan bukanlah berbagai perbedaan antarsubetnis, melainkan berbagai keunggulan yang mereka miliki.

Saya merasa cukup yakin bahwa kebudayaan Pendalungan selanjutnya—berdasarkan data dan fakta yang bisa kita peroleh—akan menuju ke arah penguatan kebudayaan multikultural. Hanya pada situasi multikultural seperti itulah kondisi ideal bagi suatu masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok etnis dapat dicapai. Kelompok-

kelompok etnis ini mendambakan hidup berdampingan secara harmonis, bebas bereksplorasi dan mengekspresikan gagasan-gagasan terbaik mereka, bebas melestarikan adat istiadat, kepercayaan, agama, bahasa, serta memperoleh perlindungan dan pelayanan yang setara atas hak-hak kewarganegaraan.

Dengan demikian, totalitas konsep multikulturalisme sesungguhnya tidak hanya bersangkut paut dengan keberagaman budaya, tetapi juga berkaitan dengan hal yang lebih mendasar, yaitu kehendak setiap pribadi untuk mengakui, menghormati, dan menghargai kemajemukan dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini, fakta sosiokultural justru menjadi berkah, bukan alat untuk menjadikan masyarakat terpecah belah.

Tidak hadirnya kekuatan dominan di wilayah ini bukan merupakan suatu kelemahan. Sebaliknya, keberimbangan sosial justru akan memberikan peluang lebih besar bagi terbentuknya medan pertukaran simbolis yang produktif. Dengan begitu, identitas hibrida, yakni identitas baru yang terbentuk dari hasil pertemuan elemen-elemen terbaik dari tiap-tiap pihak, akan lebih mudah tercipta. Identitas kultural semacam itulah yang mungkin akan menjadi milik masyarakat Pendalungan secara keseluruhan, pada suatu ketika. Jika dikelola dengan bijaksana, pluralitas etnis dan budaya Pendalungan ini akan menjadi kekuatan besar dan kekayaan limpah ruah yang ada di setiap daerah di Tapal Kuda.

Upaya membangun kesadaran kebudayaan masyarakat Pendalungan tentu saja harus merujuk pada historisitas masyarakat Pendalungan sendiri yang multietnik. Dengan kata lain, membangun masyarakat kekinian yang berakar pada sejarahnya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme harus menjadi syarat mutlak bagi pelaksanaan otonomi daerah. Perlu disadari bersama bahwa otonomi daerah di tangan masyarakat yang belum memiliki kesadaran pluralistik dapat berubah menjadi arena keswenang-wenangan, pembodohan massal, atau justru akan memicu terjadinya kekerasan yang tidak produktif.

Persentuhan kultural dan hubungan dialogis pada masyarakat Pendalungan harus terus-menerus ditumbuhkan dan dibina semenjak

dini untuk meminimalkan disintegrasi. Persentuhan kultural berarti mengenali etnis lain dengan lebih baik. Pelajaran multikulturalisme atau *field study* di sekolah-sekolah yang selama ini terbatas pada tataran permukaan saja, seperti sekadar mengenali dan membahas suatu objek wisata, bangunan, pakaian daerah, dan makanan khas, harus diperlakukan dalam kualitasnya sehingga mencapai tataran manusia dan segenap nilai-nilai budaya yang dimilikinya.

Perlu dipahami bahwa pada masyarakat plural, segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok subkebudayaan yang dalam batas-batas tertentu berbeda satu dengan yang lain biasa terjadi. Keadaan seperti ini mengakibatkan kerawanan konflik sosial di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Langkah-langkah untuk mereduksi kemungkinan terjadinya konflik adalah sebagai berikut. Pertama, kesediaan masyarakat, secara keseluruhan, mengembangkan nilai-nilai yang bersifat dasar. Kedua, kesediaan masyarakat menghindari terjadinya dominasi politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Dengan kata lain, ada kesepakatan bahwa kebudayaan Pendalungan adalah milik bersama masyarakat Pendalungan.

Dalam pusaran globalisasi yang begitu kuat dan tak mungkin dihindari, masalah paling krusial yang dihadapi oleh setiap kelompok masyarakat adalah persoalan identitas kultural. Oleh karena globalisasi bersifat tak terhindarkan, masyarakat harus memiliki strategi untuk menyesuaikan diri sekaligus mempertahankan identitas kultural masing-masing. Diperlukan suatu strategi yang mampu mengurai hambatan-hambatan sosial dalam masyarakat multikultural.

Jika dahulu setiap orang yang datang ke wilayah Tapal Kuda hanya perlu bekal yang cukup untuk menjawab tantangan alam, kini mereka harus membekali diri untuk dapat menjawab tantangan sosial dan kultural. Hal itu tidak mudah karena dunia global beserta seluruh kekuatan supernya telah mengepung siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, pendidikan formal diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah dan masyarakat bisa mewujudkannya melalui forum-forum informal. Seni pertunjukan, misalnya, dapat

menjadi media alternatif pemecah kebuntuan yang berfungsi mentransformasikan nilai-nilai multikultural.

Stigma minor terhadap masyarakat Pendalungan sebagai masyarakat yang tidak memiliki akar budaya, tidak memiliki tata krama berbahasa, dan sebagainya, telah dijawab secara positif oleh masyarakat Tapal Kuda dengan cara menunjukkan berbagai keunggulan yang hanya bisa dihasilkan oleh masyarakat yang *tidak memiliki akar budaya dan tidak memiliki tata-krama berbahasa*. Kini masyarakat Pendalungan telah dan tetap harus memperkuat pemahaman mereka mengenai relativitas budaya bahwa tidak ada suatu kebudayaan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kebudayaan lainnya. Dengan demikian, masyarakat Pendalungan berkewajiban memberi kesempatan yang sama kepada semua adat istiadat, kesenian, agama yang terdapat dalam masyarakat. Tentu saja ini tidak mudah karena upaya memahami suatu kebudayaan harus disertai dengan pemahaman terhadap kompleksitas simbolisme yang teranyam dalam unsur-unsur kebudayaan tersebut. Dalam konsep relativitas budaya, tidak ada satu pun budaya atau tradisi yang dapat dianggap aneh, rendah, kuno, atau menjijikkan hanya karena budaya atau tradisi itu berbeda dari apa yang kita miliki. Sebaliknya, kita harus berusaha memahami suatu kebudayaan berdasarkan konsep/nilai/simbol yang telah melekat pada kebudayaan itu (Robbins & Dowty, 2016).

Hingga hari ini kebudayaan masyarakat Pendalungan Jember ataupun Pendalungan Raya tetap berada dalam ruang proses: terus bertumbuh sesuai dengan hasrat, orientasi, dan penghayatan masyarakat pendukungnya serta mengalir mengikuti arus pertarungan zaman yang tidak akan pernah berakhir di muara mana pun. Hasil nyata proses kebudayaan tersebut belum tentu dapat dilihat hasilnya dalam waktu dekat. Bisa jadi membutuhkan waktu panjang, bergenerasi-generasi.

A. Membangun Seni Budaya Daerah

Pemerintah Orde Baru, dalam rangka *nation building*, pernah menerapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah

Desa. Implementasi peraturan ini merupakan upaya penguatan nilai-nilai nasionalisme dengan cara menyeragamkan model seluruh pemerintahan desa di Indonesia yang beraneka ragam. Jelas sekali undang-undang tersebut mengabaikan keberagaman yang ada yang seharusnya dipelihara dan dilindungi sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang yang baru ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan dan merencanakan program pembangunan yang relevan dengan aspirasi masyarakat dan karakteristik geografis serta budaya setempat, tanpa ada diskriminasi, etnosentrisme, serta sentimen etnisitas yang berlebihan.

Isu pengembangan seni budaya daerah tidak bisa berhenti pada bagaimana pemimpin daerah berpikir dan bersikap. Isu ini akan terus bergulir hingga mengenai bagaimana membangkitkan keterlibatan yang konsisten seluruh aparat daerah dari atas ke bawah sampai ke masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, harus dibangun suatu pemahaman bersama bahwa implementasi program pengembangan seni budaya daerah bukan sekadar masalah pelayanan teknis. Ada tantangan yang lebih berat daripada hal itu, yakni bagaimana mendorong perubahan sikap dan kesadaran masyarakat terkait dengan masalah seni budaya. Jadi, untuk menambah daya dorong pengembangan seni budaya daerah, dibutuhkan keterlibatan secara aktif para pemimpin setempat dan seluruh tokoh masyarakat. Sebagai konsekuensinya, bupati/walikota harus mengembangkan kebijakan untuk memperkuat keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin organisasi kemasyarakatan, antara lain, dengan mendorong agar mereka melaksanakan berbagai diskusi dan pelatihan pengelolaan seni budaya secara berkesinambungan.

Keputusan politik yang telah diambil untuk memulai program pengembangan seni budaya dapat saja dengan mudah tidak membawa hasil. Pada masa Orde Baru, pemerintah sering kali menyampaikan tujuan-tujuan mereka yang ambisius. Tujuan-tujuan

itu didasari prinsip-prinsip yang amat tinggi sembari mengeklaim bahwa mereka memiliki prasarana dan kemampuan besar untuk mewujudkannya. Namun, apa yang menjadi harapan bertentangan dengan anggaran yang terbatas dan berbagai kekurangan dalam hal administrasi. Tambahan lagi, tidak solidnya koordinasi secara vertikal.

Hingga sekarang kemacetan pengembangan seni budaya daerah terjadi di mana-mana karena para pimpinan daerah tidak mampu menemukan mitra berpikir yang sebanding. Dewan kesenian yang semula digadang-gadang mampu menjadi mitra dalam menggagas berbagai kebijakan strategis seni budaya daerah, ternyata rentan terjebak pada kegiatan praktis dan teknis. Akhirnya, dewan kesenian hanya menjadi semacam sanggar yang oleh pemerintah daerah sering dianggap selalu *ngrecokin* dalam hal pendanaan, padahal dewan kesenian secara *de jure* merupakan *think-tank* pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengembangan seni budaya yang secara substansial membantu atau setidaknya memberi pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan. Seharusnya dewan kesenian berikhtiar mengembangkan serangkaian proyek simpatik di lapangan. Proyek-proyek yang mampu menstimulasi dan menggerakkan sanggar-sanggar dan berbagai kelompok kesenian dari *provider* yang pasif menjadi aktif serta berorientasi pada karya.

Program pemerintah, untuk memberikan bantuan pada kelompok-kelompok seni, memang menyenangkan dan cukup berarti setidaknya untuk jangka pendek. Sungguhpun demikian, sesungguhnya yang lebih penting dari itu adalah membantu kelompok-kelompok seni tersebut agar lebih berdaya dan berkemampuan melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, jika terdapat sekelompok masyarakat yang sedang berjuang mengembangkan seni budaya daerah, Anda sebagai seorang kepala daerah harus *berada di sana*. Apa pun bantuan praktis yang diberikan, Anda harus dapat menghimpun semua sumber daya yang ada serta memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Anda berada di sana untuk memberikan dukungan dan penghormatan atas upaya kreatif mereka.

Pertanyaan mengenai mengapa kesenian tradisional dapat tumbuh secara mengesankan di beberapa daerah, misalnya di Banyuwangi dan Ponorogo, dapat dijelaskan dengan jawaban sederhana. Selain masyarakat di daerah-daerah tersebut memiliki minat berkesenian yang cukup besar, pemerintah daerahnya tidak tinggal diam. Mereka melakukan pendekatan budaya birokrasi *ketimbang* sekadar pendekatan kebutuhan pembangunan seni budaya. Artinya, pemerintah daerah tidak bisa hanya duduk menunggu datangnya inisiatif dari masyarakat. Pengembangan seni budaya daerah dalam jangka panjang membutuhkan program yang lebih jelas dan aplikatif yang diintegrasikan ke dalam kegiatan kecamatan dan desa sehingga secara struktural mempunyai akar yang lebih kuat di masyarakat.

Apa yang terjadi di Banyuwangi dan Ponorogo tersebut, jika diamati secara seksama, adalah model khas pemerintah Orde Baru. Model pendekatan pembangunan, termasuk pengembangan seni budaya, yang dilakukan pemerintah pusat pada masa Orde Baru cukup khas. Mereka merumuskan tujuan-tujuan kebijakan nasional dalam bidang tertentu dengan jelas secara praktis dan sederhana. Kemudian, tujuan-tujuan ini diumumkan kepada para pimpinan pemerintah daerah dan selanjutnya dikoordinasikan serta digerakkan kepada semua elemen masyarakat, bahkan sampai tingkat yang paling bawah untuk segera menerima dan menjalankan kebijakan tersebut.

Secara normatif, setiap pemerintah daerah memang harus menggerakkan para seniman kesenian tradisional agar lebih giat berkarya. Sungguhpun demikian, pemerintah daerah juga wajib mempromosikan kesejahteraan para seniman. Penulis *kira*, jika ingin lebih berpihak pada seni tradisional, pemerintah daerah lebih perlu memprioritaskan pembangunan sebuah panggung terbuka yang representatif daripada sebuah gedung kesenian. Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Ponorogo telah melakukannya sejak lama dengan hasil yang cukup menjanjikan bagi promosi dan pengembangan kesenian rakyat.

B. Beberapa Langkah Strategis

Pemahaman terhadap masyarakat dan budaya Pendalungan akan makin lengkap jika ditindaklanjuti dengan sejumlah langkah strategis. *Pertama*, perlu dilakukan riset mendalam yang menguraikan peran elite pengambil kebijakan dalam produksi identitas kebudayaan Pendalungan beserta hal-hal atau siapa saja yang memengaruhinya. Jadi, bukan hanya tentang si pengambil keputusan dan apa yang dia putuskan. Hal ini penting karena suatu keputusan diambil berdasarkan pada hal-hal tertentu atau pengaruh pihak-pihak tertentu.

Kedua, apa yang terjadi di banyak tempat selama ini adalah bahwa pemerintah daerah selalu tampak kurang berdaya dalam mengawal proses transformasi dan rekonstruksi kebudayaan daerah karena selalu mengalami kesulitan untuk menemukan mitra yang memadai dalam hal pemikiran. Pemerintah daerah hanya menemukan makelar-makelar yang hanya pandai menghabiskan anggaran daerah untuk menyelenggarakan acara pementasan seni budaya, bukan bagaimana berpikir secara strategis bagaimana mengembangkan kebudayaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih bersungguh-sungguh dalam memikirkan dunia seni budaya di daerah masing-masing dengan cara meniadakan berbagai proyek basa-basi dan pencitraan.

Ketiga, pemerintah daerah harus segera merancang dan konsisten melaksanakan sebuah strategi yang logis, baik secara teknis maupun administratif. Pemda mesti bekerja *melampaui tugas formal pembangunan budaya* sehingga aktivitas berkesenian menjadi tradisi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara realistik yang bisa ditempuh adalah mengintegrasikan gagasan-gagasan pengembangan seni budaya dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Cara inilah yang penulis anggap paling memungkinkan dan realistik dapat melahirkan masyarakat Pendalungan yang berkebudayaan di masa depan.

Keempat, perlu ada kerangka teoretis dan filosofis untuk melihat secara komprehensif proses (re)produksi identitas kultural, yang

selanjutnya dapat digunakan untuk memahami praktik-praktik yang memengaruhi proses (re)produksi identitas kultural masyarakat Pendalungan. Hal ini bukan soal sederhana karena proses produksi identitas kultural merupakan suatu operasi budaya yang kompleks, ambivalen, penuh kontestasi, dan tidak mudah untuk diprediksi.

Kelima, kita perlu melihat secara lebih seksama praktik-praktik sosial masyarakat Pendalungan, termasuk praktik bermedia mereka secara holistik. Namun, perlu “ditarisbawah” bahwa praktik produksi tersebut harus dilihat tidak semata sebagai bagian dari pertarungan pasar global sebagaimana kerap mendominasi kajian politik-ekonomi. Akan tetapi, praktik produksi dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses sejarah sosial, pembentukan kebudayaan, dan kehidupan sehari-hari (Ortner, 2009). Media massa tidak bisa kita pandang sebagai cermin bening yang dapat memantulkan realitas sosial secara apa adanya, padahal ia sarat dengan berbagai kepentingan, baik ekonomi, politik, maupun ideologi. Melalui studi yang memiliki cakupan cukup luas, kita perlu melihat praktik bermedia masyarakat Pendalungan, baik dalam hubungannya dengan berbagai praktik sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kita perlu meletakkannya dalam struktur sosial yang lebih besar. Dengan cara ini—penulis yakin—kita akan bisa memahami masyarakat Pendalungan secara lebih holistik dan komprehensif.



Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2006). *Konstruksi dan rekonstruksi kebudayaan*. Pustaka Pelajar.
- Adisasmita, K. S. (1979). *Pustaka centhini: Ikhtisar seluruh isinya*. Penerbit U.P. Indonesia.
- Alwi, H. (2001). Kebijakan bahasa daerah. Dalam D. Sugono, & A. R. Zaidan (Ed), *Bahasa daerah dan otonomi daerah*. Pusat Bahasa.
- Anderson, B. (2008). *Imagined community reflection on the origin and spread of nationalism*. Vesco.
- Appadurai, A. (2005). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.
- Arifin, E. B. (2006, 14–17 November). *Pertumbuhan Kota Jember dan munculnya budaya Pandhalungan* [Presentasi makalah]. Konferensi Nasional Sejarah VIII, Jakarta.
- Arybowo, S. (2010). Kajian budaya dalam perspektif filosofi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(2), 209–230. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/110>
- Askew, K., & Wilk, R. R. (Ed.). (2002). *The anthropology of media a reader*. Wiley-Blackwell.
- Barker, C. (2004). *Cultural studies: Teori & praktik* (Nurhadi, Penerj.). Kreasi Wacana.

- Barth, F. (Ed.). (1969). *Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference*. Waveland Press, Inc.
- Baudrillard, J. P. (2004). *Masyarakat konsumsi*. Kreasi Wacana.
- Boas, F. (1989). *A Franz Boas reader: The shaping of American anthropology, 1883–1911*. University of Chicago Press.
- Blum, L. (1991). *Philosophy and the values of a multicultural community*. University of Massachusetts.
- Bourdieu, P. (1984). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Jumlah dan distribusi penduduk*. Diakses pada 27 Februari, 2017, dari <https://sensus.bps.go.id/topik/dataset/sp2010/1>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2015). *Kabupaten Jember dalam angka 2015*. Diakses pada 27 Februari, 2017, dari <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2016/01/22/a563170067d6eda084ab9532/kabupaten-jember-dalam-angka-2015.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2024). *Kabupaten Jember dalam Angka 2024*. <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/06ff1b2512ce355752be8d2f/kabupaten-jember-dalam-angka-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023, 30 Mei). *Jumlah penduduk provinsi Jawa Timur menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin 2022*. Diakses pada 27 Februari 2017 dari <https://jatim.beta.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjY5NyMx/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-2022.html>
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (t.t.). *Peta wilayah*. Diakses pada 17 Mei, 2024, dari <https://jatim.bpk.go.id/peta-wilayah/>
- Crystal, E. (1977) Tourism in Toraja. Dalam V. L. Smith (Ed.), *Hosts and guests: The anthropology of tourism* (109–125). University of Pennsylvania Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (1985). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi 2). Gramedia Pustaka Utama.
- Eliade, M. (2002). *Myth and religion*. Routledge.
- Foster, G. M., & Anderson, B. G. (1978). *Medical anthropology*. Alfred A. Knopf.
- Furnivall, J. S. (1967). *Netherlands India: A study of plural economy*. Cambridge University Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Geertz, C. (1976). *The religion of Java*. University of Chicago Press.

- Getz, D. (1987, 5–6 November). *Tourism planning and research: Traditions, models and futures* [Presentasi artikel ilmiah]. The Australian Travel Research Workshop, Bunbury, Western Australia.
- Giddens, A. (1995). *Politics, sociology and social theory: Encounters with classical and contemporary social thought*. Stanford University Press.
- Hadi, Y. S. (2016). *Asal usul Pandhalungan*. Salam Nusantara.
- Hall, S. (1980). Cultural studies: Two paradigms. *Media, Culture and Society*. 2(1), 57–72. <https://doi.org/10.1177/016344378000200106>
- Hall, S. (1991). Old and new identities, old and new ethnicities. Dalam A. D. King (Ed.), *Culture, globalization and the world system: Contemporary conditions for the representation of identity*. Macmillan.
- Harris, M. (1988). *Culture, people, nature: An introduction to general anthropology* (5th ed.). Harper & Row.
- Hatley, R. (1984). *Other Javas away from the kraton*. Monash University.
- Hefner, R. W. (Ed.). (2001). *The politics of multiculturalism: Pluralism and citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. University of Hawaii Press.
- Hsiao, H.-H. M. (2005). NGOs, the state, and democracy under democratization. Dalam R. P. Weller (Ed.), *Civil life, globalization and political change in Asia: organizing between family and state*. Roudledge.
- de Jonge, H. (1989). *Madura dalam empat zaman: Pedagang, perkembangan ekonomi, dan Islam*. Gramedia.
- Ilham, M. (2015). *Kelir mancawarna: Strategi kelisahan seni pertunjukan janger Banyuwangi* [Disertasi]. Universitas Gadjah Mada.
- Kartodirdjo, S. (2003). *Multidimensi pembangunan bangsa: Etos nasionalisme dan negara kesatuan*. Kanisius.
- Kecik, H. (2011). *Pemikiran militer 4: Bangsa Indonesia abad 21 timbulnya filosofi baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kivisto, P. (2014). *Religion and immigration: Migrant faiths in North America and Western Europe*. Polity Press.
- Koentjaraningrat. (1986). *Pengantar ilmu antropologi*. Aksara Baru.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. (2002). *Perubahan sosial dalam masyarakat agraris: Madura 1850-1940*. Mata Bangsa.
- Lee, E. S. (2000). *Teori migrasi*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

- Levitt, T. (1983). *Marketing imagination*. The Free Press.
- Lombard, D. (2000). *Nusa Jawa: Silang budaya 1*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (1982). *Creative and mental growth*. Macmillan.
- Marcuse, H. (1964). *One dimensional man*. Beacon Press.
- Margana, S. (2007). *Ujung timur Jawa 1763–1818: Perebutan hegemoni Blambangan*. Pustaka Ifada.
- Mazzarella, W. (2004). Culture, globalization, mediation. *Annual Review of Anthropology*, 33(1), 345–67. <https://dx.doi.org/10.1146/annurev.anthro.33.070203.143809>
- McKean, P. (1977). Towards a theoretical analysis of tourism: Economic dualism and cultural involution in Bali. Dalam V. L. Smith (Ed.), *Hosts and guests: The anthropology of tourism*. University of Pennsylvania Press.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: Extension of man*. A Signet Book.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A community approach*. Methuen.
- Naroll, R., Berndt, R. M., Bessac, F. D., Chapple, E. D., Dole, G. E., Driver, H. E., Ducey, P., Ember, M., Fuchs, H., Hoffmann, H., Jaspan, M., Landy, D., Leach, E., Von Mering, O., Messing, S. D., Moore, F. W., Mukherjee, R., Murdock, G. P., Neiva, A. H., ... John W. M. Whiting. (1964). On ethnic unit classification [and comments and reply]. *Current Anthropology*, 5(4), 283–312. <http://www.jstor.org/stable/2740256>
- North, S. (2014). *Why do most city branding campaigns fail?* City Monitor. Diakses pada 1 Juni, 2016, dari <http://www.citymetric.com/business/why-do-most-city-branding-campaigns-fail>
- Ortner, S. B. (2009). Studying sideways: Ethnographic access in Hollywood. Dalam V. Mayer, M. J. Banks, & J. T. Caldwell (Ed.), *Production studies: Cultural studies of media industries*. Routledge.
- Padmodiwirio, S. (2001). *Memoar Hario Kecik II*. Yayasan Obor Indonesia.
- Pelto, P. J. (1970). *Anthropological research the structure of inquiry*. Harper & Row Publishers.
- Pendit, N. S. (1990). *Ilmu pariwisata: Sebuah pengantar perdana*. Pradnya Paramita.
- Picard, M. (1996). *Bali: Cultural tourism and touristic culture*. Archipelago Press.

- Poerwadarminta, W. J. S. (1939). *Baoesastra Djawa*. J.B. Wolters.
- Prawiroatmojo, S. (1989). *Bausastra Jawa-Indonesia II*. Haji Masagung.
- Prasisko, Y. G. (2016, 10 Desember). *Pedalungan: Orang-orang perantauan di Ujung Timur Jawa* [Makalah seminar]. Seminar Membincang Kembali Terminologi Budaya Pandalungan, Jember, Indonesia
- Purwandaya, B. (2011). Poverty, growth and water: The case of East Java, Indonesia. Dalam *The Asian conference on the social sciences* (263–275).
- Raharjo, C. P. (2006, 13 Agustus). *Pendalungan: Sebuah 'periuk besar' masyarakat multikultural* [Presentasi makalah]. Kegiatan Jelajah Budaya, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Indonesia.
- Rahman, A. A. (2015). Pengaruh bahasa Madura dan bahasa Jawa terhadap bahasa masyarakat Kabupaten Jember. *Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra III*, 555. Universitas Sebelas Maret.
- Ratman, D. R. (2016, 27 Januari). *Pembangunan destinasi pariwisata prioritas 2016–2019* [Paparan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata]. Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata, Jakarta, Indonesia.
- Robbins, R. H., & Dowty, R. (2016). *Global problems and the culture of capitalism*. Pearson/Allyn & Bacon.
- Robson, S., & Wibisono, S. (2002). *Javanese english dictionary*. Periplus Edition.
- Safari, A. O. (2010). *Ruwatan Murwakala Cirebon* [Makalah tidak diterbitkan].
- Salikin, H. (2016). Masa depan bahasa Madura di Kabupaten Jember: Sebuah ancaman di depan mata. Dalam N. Anoegrajekti (Ed.), *Jejak langkah perubahan: Dari Using sampai Indonesia* (55–63). Penerbit Ombak. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77006>
- Sasongko, Y. A. T., & Wahyuni, E. S. (2012). Diaspora Madura: Analisis modal sosial dalam usaha sektor informal oleh migran Madura di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 52–63. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.9390>
- Saukko, P. (2003). *Doing research in cultural studies*. Sage Publications.

- Setiawan, I., & Subaharianto, A. (2016, 6 Agustus). *Bukan sekadar mencampur budaya: Hibriditas sebagai politik kultural masyarakat Using dan titik-baliknya di masa kini* [Presentasi makalah]. Temu Ilmiah Nasional Jejak dan Langkah Bahasa, Sastra, dan Budaya: Dari Using untuk Indonesia, Jember, Indonesia.
- Spillane, J. J. (1994). *Pariwisata Indonesia: Siasat ekonomi dan rekayasa kebudayaan*. Penerbit Kanisius; Lembaga Studi Realino.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Strathern, M. (1987). *Dealing with inequality: Analyzing gender relations in Melanesia and beyond*. Cambridge University Press.
- Stern, R. M. (2000). *Globalization and international trade policies*. World Scientific.
- Sukimi, M. F. B. (2004). Carok sebagai elemen identiti manusia Madura (Carok and the formation of Madurese identity). *Akademika*, 65(1), 91–110. <https://jurnalarticle.ukm.my/4266/1/akademika65%5B02%5D.pdf>
- Suparlan, P. (2002, 16–19 Juli). *Menuju masyarakat indonesia yang multikultural* [Presentasi makalah]. Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
- Sutarto, A. (2006, 7–10 Agustus). *Sekilas tentang masyarakat Pendalungan* [Presentasi makalah]. Jelajah Budaya, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, Indonesia.
- Shahab, Y. (Ed.). (1997). *Betawi dalam perspektif kontemporer: Perkembangan, potensi, dan tantangannya*. LKB.
- Soetomo, I. (1985). *Pokok-pokok pikiran tentang multilingualisme dalam sastra*. Universitas Diponegoro.
- Sudjana, I. M. (2001). *Nagari tawon madu: Sejarah politik Blambangan abad XVIII*. Larasan-Sejarah.
- Sutarto, A., & Sudikan, S. Y. (2004). *Pendekatan kebudayaan dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur.
- Tulistyantoro, L. (2005). Makna ruang pada tanean lanjang di Madura. *Dimensi Interior*, 3(2), 137–152. <https://doi.org/10.9744/interior.3.2>.
- Taylor, E. B. (1871). *Primitive culture: Researches into the development of mythology* (Vol. 1). John Murray.

- Universitas Negeri Yogyakarta, & Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas Dikpora DIY. (t.t.). *Kamus Bahasa Jawa (online)*. Diakses pada 28 Januari, 2017, dari http://202.152.135.5/web_kamusbahasajawa/index.php?view=tentang.
- Wahjono, S. I. (2011, 28 Juni). *Aktualisasi budaya pendalungan untuk kesinambungan perusahaan keluarga dalam rangka memperkuat ketahanan nasional* [Presentasi makalah]. Konferensi Nasional Meningkatkan Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Era Globalisasi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, Indonesia.
- Wasino. (2011, 7 Juli). *Multikulturalisme dalam perspektif sejarah sosial* [Presentasi makalah]. Seminar Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.
- Wibisono, B., & Sofyan. A. (2001). Latar belakang psikologis pemilihan bahasa pada masyarakat multilingual (Studi kasus pemakaian bahasa oleh masyarakat etnik Madura di Jember). *Jurnal Ilmu-ilmu Humaniora*, 2(1), 1–13.
- Winarni, R. (2012). *Bertahan di tengah menguatnya kekuasaan kolonial dan modernisasi bupati-bupati Karesidenan Besuki Jawa Timur 1820-an-1830-an* [Disertasi]. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Wiyata, A. L. (2002, 19 Maret). *Mencermati kondisi sosial budaya pengungsi Sampit di Kabupaten Jember* [Presentasi makalah]. Seminar Kajian Konflik di Kalimantan, Jakarta, Indonesia.
- World Economic Forum. (2015). The travel & tourism competitiveness report 2015. Diakses pada 27 Februari, 2017, dari https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
- Yuswadi, H. (2008). Budaya Pendhalungan bentuk multikulturalitas dan budaya antar etnik. Dalam A. Sutarto, & S. Y. Sudikan (Ed.), *Pemetaan kebudayaan di Provinsi Jawa Timur sebuah upaya pencarian nilai-nilai positif*. Perpustakaan Nasional.
- Yuswadi, H. (2005). *Melawan demi kesejahteraan, perlawanannya petani jeruk terhadap kebijakan pembangunan pertanian*. Kompyawisda.
- Zoebazary, M. I. (2010). *Kamus istilah televisi dan film*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zoebazary, M. I. (2014). *Pikiran-pikiran (dari) kampung*. Visart Global Media.

Tentang Penulis



Mochamad Ilham lahir di Desa Kandangan, Kediri, pada Oktober 1962. Ia bersekolah di desanya hingga SMP, kemudian melanjutkan ke SMAN I Malang. Pada tahun 1982, ia menempuh kuliah di Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Jember, lalu melanjutkan studi magister di bidang Kajian Media dan Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga. Gelar doktor diraihnya pada tahun 2015 di Universitas Gadjah Mada pada bidang ilmu sastra (kajian tradisi lisan). Hingga kini ia memilih menetap di Jember dan menjadi dosen di almamaternya di Jurusan Sastra Inggris dan PSTF (Program Studi Televisi & Film) FIB, Universitas Jember.

Sejak SMA, penulis telah aktif menulis naskah drama dan menyutradarainya. Selanjutnya, dia lebih intens berkarya pada penulisan skenario. Sejumlah skenario sinetron yang ditulisnya, antara lain, serial *GKD* (1996–1997), *Maling Aguna* (2004), *Sate Madura* (2005), dan *Dewi Rengganis* (2006). Dua serial lainnya, *Sang Duda* dan *Luka di Atas Luka*, telah diproduksi sebuah PH Malaysia pada tahun 1998/9.

Di sela-sela kesibukan mengajar, penulis masih sempat menulis cerpen, puisi, novel, dan skenario film. Skenario film pendek yang ditulis

dan disutradarainya, antara lain, *Rumah Putih di Kaki Langit* (2001)—yang terpilih sebagai Film Terbaik FFII 2001; Sutradara Terbaik dan Aktris Terbaik FFII—*Gaco* (2002) yang masuk 10 besar FFII SCTV 2002, *Sepenggal Kepala di Sepenggal Waktu* (2003), dan *Nyanyian Sebilah Pedang* (2005) yang menjadi salah satu film pilihan FFII Global TV 2005. Beberapa bukunya yang telah diterbitkan, antara lain, *Gandrung dan Orang-orang Bawah Tanah* (VGM, 2009) yang berisi kumpulan naskah drama, *Kamus Istilah Televisi & Film* (Gramedia, 2010), sebuah novel *Titik Balik Kesunyian* (VGM, 2012), kumpulan esai *Pikiran-pikiran (dari) Kampung* (VGM, 2013), *Mosaik Kebudayaan Pendalungan* (PPJ, 2021), dan *Janger Banyuwangi: Bertahan Melintasi Zaman* (BRIN, 2022).

Selama lebih dari sepuluh tahun, bersama kawan-kawannya yang tergabung dalam Grup Kentrung Djos, ia menjadi pengisi rutin sejumlah acara siaran pedesaan di TVRI Surabaya. Sejak tahun 2016 ia juga aktif di bidang pengembangan seni budaya di Rumah Budaya Pandhalungan Jember.



Indeks

- Abdullah, 8, 63, 65, 78, 162, 185
Alex Jokomulyo, 105
alih kode, 96, 98
Alwi, 101, 185
Ambulu, 3, 98, 114
Anderson, 27, 29, 185, 186
Appadurai, 10, 51, 134, 185
Arek, 6, 31, 32, 36, 42, 44, 46
Arifin, 50, 185
Arya Wiraraja, 84
Arybowo, 141, 143, 185
Askew, 135, 185

bahasa Jemberan, 67, 98, 99, 100
Bali, 6, 10, 37, 47, 49, 51, 79, 101,
 105, 108, 128, 137, 138,
 139, 140, 145, 156, 160,
 163, 164, 165, 188, 190
Banyuwangi, 6, 9, 17, 27, 33, 34,
 42, 43, 44, 47, 49, 51, 84,
 97, 104, 105, 106, 108, 114,
 118, 121, 123, 126, 127,
 134, 139, 147, 148, 156,
 162, 163, 169, 181, 187, 194

Barker, 8, 132, 185
Barth, 9, 186
Baudrillard, 134, 186
Bentham, 12
Besuki, 49, 51, 191
bilingual/multilingual, 96, 97
Blambangan, 6, 32, 37, 47, 49, 188,
 190
Blum, 69, 186
Boas, 26, 27, 186
Bondowoso, 29, 33, 34, 42, 43, 44,
 49, 50, 51, 84, 89, 97, 104,
 111, 114, 116, 126, 137, 169
Bourdieu, 10, 186
budaya Arek, 6, 46
budaya Panji, 6
budaya urban, 59, 141

campur kode, 96, 98
campursari, 106, 114, 138
Cina, 5, 50, 51, 63, 77, 132
city branding, 149, 150, 151, 154,
 188

Buku ini tidak diperjualbelikan.

- community based tourism*, 167
 Crystal, 164, 165, 186
cultural bomb, 3
- de Jonge, 54
 Demak, 37
 Denys Lombard, 22
 Dewan Kesenian, 2
 dhalung, 18, 19, 20
 Dynand Faris, 143
- eksonim, 17
 Eliade, 73, 186
 endonim, 17
 era perkebunan, 40
- Faida, 3, 4, 11, 93, 157
 Fariz, 145, 146
 Festival Pandhalungan, 3, 93, 107,
 149
 Foster, 27, 186
 Foucault, 12
 Furnivall, 76, 186
- Geertz, 8, 76, 82, 133, 186
 Getz, 166, 187
 Giddens, 14, 187
 globalisasi, 13, 131, 132, 133, 135,
 137, 138, 139, 141, 157, 177
 Gus Dur, 35
- hadrah, 118
 Hall, 8, 11, 59, 66, 187
 Harris, 27, 187
 Hatley, 31, 34, 187
- Hefner, 71, 72, 187
 hibridisasi budaya, 18, 61, 83, 145
 Hsiao, 138, 187
- identitas budaya, xvi, 5, 9, 15, 58,
 64, 65, 94, 108, 139, 165
 Ilham, iv, xvii, xx, 4, 97, 123, 187
- Jawa, xv, xvi, xvii, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10,
 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31,
 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40,
 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50,
 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69,
 76, 79, 80, 83, 84, 85, 86,
 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96,
 97, 98, 99, 100, 101, 103,
 104, 105, 108, 113, 114,
 116, 117, 118, 127, 132,
 137, 144, 145, 156, 158,
 161, 168, 186, 187, 188,
 189, 190, 191
- Jemberan, 67, 98, 99, 100
 JFC, 1986
- Kartodirdjo, 132, 187
 kaum abangan, 42
 Kentrung Djos, 61, 104, 125, 126,
 127, 128, 129, 194
 Kivistö, 76, 187
 Koentjaraningrat, 7, 32, 108, 144,
 187
 Komunitas Pandhalungan, 3, 120,
 149
 Komunitas Sastra Pendalungan, 4

- Kota Pendalungan, 2, 93, 94, 149, 154, 157, 158, 159
 Kuntowijoyo, 52, 53, 54, 187
- Leang Leong, 113
 Lee, 27, 48, 53, 187
 Lekkerkerker, 47
 Levitt, 132, 188
 Lombard, 23, 87, 188
 Lowenfeld dan Brittain, 124
 Lumajang, 5, 33, 34, 42, 44, 84, 97, 104, 107, 114, 116, 117, 161, 163, 168
- Macanputih, 37
 macapat, 22, 118
 Madiun, 6, 32, 69, 127
 Madura, xv, xvii, 2, 5, 9, 14, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 127, 137, 144, 156, 188, 190, 191, 193
 Mahmud, 101
 Majapahit, 6, 37, 84, 107
 majemuk, xvii, 14, 72, 74, 75, 76, 78
 Malang, 6, 33, 46, 51, 84, 90, 118, 161, 193
 Malaysia, 71, 149, 150, 155, 160, 161, 187, 193
 Mancanegari, 32
- Mangkurat I, 86
 Margana, 37, 47, 188
 Maryani, 127
 Mataram, 6, 22, 32, 36, 37, 45, 49, 86
 Mataraman, 6, 20, 23, 30, 31, 32, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 127
 Mazzarella, 135, 139, 188
 McKean, 164, 188
 McLuhan, 13, 188
melting pot, 73, 74, 76, 92, 156
 Mendalungan, xvii, 37
 Mitra Jawilan, 80
mode of domination, 13
 multietnik, 11, 72, 77, 78, 83, 176
 multikultural, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 86, 87, 92, 105, 175, 177, 178, 190
 multikulturalisme, 11, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 93, 95, 176, 177
 Murphy, 167, 188
 musik patrol, 112
- Nahdlatul Ulama, 42
 Naroll, 29, 188
 Ndalungnesia, 3
 North, 154, 187, 188
- Oosthoek, 36
 Opera Pendalungan, 4
 Orde Baru, 9, 14, 35, 55, 150, 178, 179, 181
 Ortner, 183, 188
- Padmodiwirio, 23, 188

- Pakubuwono V, 22
- Panaragan, 30, 31, 32, 44, 46
- Pandalungan, xv, xvi, 6, 93, 105, 149, 189, 190
- Pandhalungan, xvi, xix, 3, 4, 6, 93, 107, 120, 149, 150, 185, 187, 194
- Pandhalungan Night Show, 3, 4
- Panopticon, 12
- Pasuruan, 27, 33, 37, 41, 42, 44, 54, 86, 114, 161
- Pelto, 27, 188
- pemerintah Kolonial Belanda, 38
- Pendalungan Raya, xvii, 18, 33, 39, 40, 61, 91, 106, 111, 124, 137, 175
- Pendhalungan, xvi, 3, 6, 191
- Pendit, 162, 188
- Picard, 165, 188
- Pike, 27
- platform, 11, 62, 74, 75, 79
- pluralisme, 63, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 95, 175, 176
- Poerwadarminta, 20, 189
- Prawiroatmodjo, 18
- Probolinggo, 2, 5, 24, 33, 34, 42, 44, 54, 84, 86, 97, 107, 114, 117, 161
- Pujiono, 23
- Purwandaya, 36, 45, 189
- Puslit Budaya Etnik dan Komunitas, xv
- Radar Jember, 3
- Raden Wijaya, 84
- Raharjo, 6, 18, 25, 35, 67, 68, 87, 98, 100, 113, 116, 189
- Rahman, 98, 100, 189
- rasisme, 69
- regenschap, 55
- Retsikas, 24, 26
- Robbins dan Dowty, 178
- Robson, 19, 189
- Robson dan Wibisono, 19
- Rumah Budaya Pandhalungan, xix, 3, 149, 194
- Safari, 23, 189
- Salikin, 101, 102, 189
- Samin, 31, 33
- Sanggar Seni Kartika Budaya, 3
- Saukko, 8, 189
- Semipro, 107
- Serat Centhini, 20, 21, 22, 23
- Shahab, 82, 190
- Singapura, 71, 150, 151, 152, 161
- Singasari, 6, 84
- Soetomo, 102, 190
- Spillane, 164, 190
- Spradley, 7, 190
- Stern, 133, 190
- Strathern, 51, 190
- Sudikan, 31, 190, 191
- Sudjana, 37, 190
- Sultan Agung, 22, 37, 86
- Suparlan, 75, 76, 190
- Suparto, 4, 127
- Surabaya, 6, 24, 32, 33, 36, 46, 47, 60, 78, 84, 152, 194

- Sutarto, xv, 18, 31, 33, 34, 36, 42, 85, 86, 90, 104, 105, 138, 140, 155, 190, 191
- Sutikno, 154
- Suyatno, 127
- Tanahsabrang Wetan, 32
- Tapal Kuda, xvi, xvii, xix, 1, 9, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 66, 69, 71, 79, 80, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 103, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 118, 123, 136, 137, 139, 140, 168, 169, 170, 172, 175, 176, 177, 178
- Tari Lahbako, 121
- Taylor, 6, 7, 97, 190
- Tengger, xv, 17, 31, 33, 161
- Thailand, 150, 160, 161
- Thamrin, iv, 83
- Tionghoa, 68, 79, 80, 81, 95, 98, 104, 113, 137
- Trio Noer, 126
- Trunojoyo, 86
- Tulistyantoro, 52, 190
- Universitas Jember, xv, 2, 5, 56, 114, 125, 155, 193
- Universitas Muhammadiyah, xv
- Using, xv, 6, 9, 17, 31, 33, 34, 38, 42, 44, 47, 48, 51, 68, 80, 95, 98, 105, 108, 113, 137, 148, 156, 189, 190
- Wahjono, 86, 87, 191
- Wasino, 74, 191
- Wayang Golek, 23
- Wibisono dan Sofyan, 99, 100
- Winarni, 36, 37, 49, 51, 105, 116, 191
- wisata alam, 159, 161, 168
- wisata buatan, 159
- wisata budata, 159
- Yasadipura II, 22
- Yuswadi, 18, 25, 83, 191
- Zoebazary, 4, 12, 131, 132, 191

Pendalungan adalah istilah yang disematkan oleh pihak lain kepada masyarakat yang hidup di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Orang Pendalungan merupakan masyarakat multikultur yang menetap di area Pendalungan Raya yang tersebar di 9 wilayah administratif kota dan kabupaten mulai Kabupaten Pasuruan di utara hingga Kabupaten Banyuwangi di Selatan. Masyarakat Pendalungan memiliki identitas kultural yang beragam yang telah menjaga dan mempraktikan multikulturalisme dan pluralisme sejak lama, bahkan sebelum memasuki era kemerdekaan.

Buku *Orang Pendalungan* ini berusaha memperkenalkan siapa dan bagaimana masyarakat Pendalungan. Meskipun turut mengupas karakteristik masyarakat Pendalungan yang ada di beberapa wilayah Tapal Kuda, buku ini secara khusus mengungkapkan identitas masyarakat Pendalungan yang berada di wilayah Jember, baik dalam konsep Pendalungan, kesenian, bahasa, hingga tantangan-tantangan global yang mesti diantisipasi.

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik sebagai bacaan maupun sumber rujukan berharga untuk pemerintah, akademisi, dan semua pihak yang menaruh ketertarikan dan perhatian terhadap budaya dan masyarakat Pendalungan.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.858



ISBN 978-623-8372-76-8



Buku ini